

**MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD**

OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PROGRAM : Program Kepegawaian Daerah

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Program Kepegawaian Daerah Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan : Pengelolaan Assesment Center Tujuan : Terlaksana Pelantikan Pejabat Struktural dan	- Jumlah ASN yang memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan eselon II adalah sebanyak 122 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 83 dan perempuan sebanyak 39 orang. - Jumlah ASN yang menduduki Esselon II Kabupaten Dharmasraya sebanyak 26 orang terdiri dari	Akses: - Masih kurangnya Pejabat perempuan yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Ess.II Partisipasi: - Esselon II laki-laki lebih banyak dari pada eselon II perempuan - Persentase : Laki-laki = 88,5 %	- Kurangnya sosialisasi tentang pelaksanaan pengisian jabatan eselon II - Masih rendahnya kompetensi ASN Perempuan - Masih kurangnya data ASN Perempuan yang memenuhi	- Kurangnya percaya diri dan minat PNS perempuan untuk menjabat Esselon II karena dilakukan uji kompetensi - Kurangnya dukungan dari pihak keluarga seperti suami	- Terlaksana Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional baik yang perempuan maupun yang laki-laki	- Meningkatkan sosialisasi tentang pelaksanaan pengisian jabatan eselon II - Melaksanakan Pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk perempuan - Melakukan pendataan PNS	- Jumlah ASN yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan Esselon II, sebanyak 122 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 83 orang dan perempuan sebanyak 39 orang - Jumlah ASN yang sudah menduduki	- Output - Bertambahnya jumlah Pejabat Ess.II Perempuan - Input - Jumlah anggaran yang dibutuhkan pada tahun 2024 adalah Rp.168.361.000,

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Fungsional baik yang perempuan maupun yang laki-laki	23 laki-laki dan 3 orang perempuan. - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Syarat JPT Pratama : 1. Memiliki kualifikasi paling rendah Sarjana atau Diploma IV 2. Memiliki kompetensi	Perempuan = 11,5 % Control: - Pentingnya komitmen bersama untuk memprioritaskan perempuan untuk menduduki jabatan Ess.II Manfaat : -	kriteria untuk menduduki jabatan Ess.II - Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender dalam pemangku jabatan eselon. - Kurangnya pemahaman pengambil kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender - Belum optimalnya koordinasi antara BKPSDM dan			perempuan yang memenuhi kriteria untuk menjabat Ess.II. - Mengoptimalkan koordinasi antara BKPSDM dan Kepala OPD lain.	Jabatan Esselon II sebanyak 26 orang, dimana laki laki sebanyak 23 orang dan perempuan sebanyak 3 orang. Atau dengan persentase: Laki-laki = 88,5 % Perempuan = 11,5 %	yang diperuntukkan untuk mendukung rencana aksi dan pelantikan pejabat struktural dan fungsional - Outcome Tersedianya pemangku jabatan Ess.II baik laki-laki maupun perempuan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi social kultural sesuai standard kompetensi jabatan yang ditetapkan. 3. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun. 4. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas yang baik.		Kepala OPD.					

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	5. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun. 6. Sehat jasmani dan rohani.							

Pulau Punjung, Juni 2024

Kepala Badan Kependidikan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



H. YUSRIAL SKM.MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680324 199003 1 002

Tim Verifikasi			
 Inspektur Drs. Ardy Sumanto, CfrA Nip.196812201990091001	 Kepala BKD Asril A.P.M.Si Nip.19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida Paryanto S.Sos.MT Nip.196906091989021001	 Kepala Dinas Sosial P3A PPKB Martin Efendi S. Hut. MM Nip. 19790905 200801 1 018

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Kepegawaian Daerah
KODE PROGRAM	5.03.02
KEGIATAN	Pengembangan Kompetensi ASN
HASIL/OUTPUT	Bertambahnya jumlah pejabat eselon II perempuan
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah ASN yang memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan eselon II pada tahun 2023 adalah sebanyak 122 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 83 orang dan perempuan sebanyak 39 orang. ➤ Jumlah PNS yang menduduki Esselon II Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023 sebanyak 26 orang terdiri dari 23 laki-laki dan 3 orang perempuan. ➤ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. ➤ Syarat JPT Pratama : <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kualifikasi paling rendah Sarjana atau Diploma IV - Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi social kultural sesuai standard kompetensi jabatan yang ditetapkan. - Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun. - Memiliki rekam jejak jabatan, integritas yang baik. - Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun. - Sehat jasmani dan rohani. <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih kurangnya Pejabat perempuan yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Esselon II. ➤ Esselon II laki-laki lebih banyak dari pada eselon II perempuan ➤ Persentase : <ul style="list-style-type: none"> Laki-laki = 88,5 % Perempuan = 11,5 % ➤ Pentingnya komitmen bersama untuk memprioritaskan perempuan untuk menduduki jabatan Esselon II. <p>b. Penyebab Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kurangnya sosialisasi tentang pelaksanaan pengisian jabatan eselon II b) Masih rendahnya kompetensi ASN Perempuan c) Masih kurangnya data ASN perempuan yang memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan Esselon II. d) Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender dalam pemangku jabatan eselon. e) Kurangnya pemahaman pengambil kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender f) Belum optimalnya koordinasi antara BKPSDM dan Kepala OPD. <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya percaya diri dan minat PNS perempuan untuk menjabat Esselon II, karena dilakukan Uji Kompetensi - Kurangnya dukungan dari pihak keluarga seperti suami

RENCANA AKSI	Komponen	Penempatan ASN Sesuai Kompetensi	
		Tujuan	Menempatkan Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi
		Alokasi	168.361.000,-
		Anggaran	
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur: Pejabat struktural yang memahami manajemen pemerintahan		
	2. Indikator dan Target Kinerja : <ul style="list-style-type: none"> Bertambahnya jumlah Pejabat Ess.II Perempuan Terseleksinya Pejabat Eselon II baik perempuan maupun yang laki-laki. Terlaksananya pelantikan pejabat Eselon dan Fungsional tertentu, Terlaksananya pengambilan sumpah/janji PNS 		



Pinjung, Juni 2024

Kepala Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. YUSRIAL, SKM, MM


Pemula Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680324 199003 1 002

Tim Verifikasi			
Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapperida	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB
Desa Andy Sumanto, Cfra NIP. 196812201990091001	Asri, A.P.M.Sj NIP. 197502251995011001	Paryanto, S.Sos.MT NIP. 196906091989021001	Martin Efendi, S. HUT, MM NIP. 197909052008011018

FORM KAK/TOR

Program	Kepegawaian Daerah	
Sasaran Program	Pejabat Struktural	
Kegiatan	Pengembangan Kompetensi ASN	
Sub Kegiatan	Pengelolaan Assesment Center	
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
	Gambaran Umum	Untuk Mengisi kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Seleksi Terbuka (Shelter) Asessment atau Uji Kompetensi untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
Kegiatan	Uraian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Uji Kompetensi - Pelantikan Pejabat Struktural - Pelantikan Pejabat Fungsional - Pelantikan Sumpah Janji CPNS ke PNS
	Indikator Kinerja	Persentase Penempatan ASN Sesuai Kompetensi
	Batasan Kegiatan	Pejabat Administrator yang sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
Maksud dan Tujuan	Terdapatnya Pejabat JPT yang memiliki Kompetensi sesuai dengan keahliannya	
Cara Pelaksanaan	Pembentukan Tim Seleksi Terbuka JPT yang terdiri dari Pejabat Internal dan External	
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Di luar Kabupaten Dharmasraya	
Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Kegiatan	Pelaksana : PPTK sub Kegiatan Asessment Center Penanggung Jawab : Kepala BKPSDM	
Jadwal	Januari s/d Desember 2025	
Biaya	168.361.000,-	

Pulu Punjung, Juni 2024
 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. YUSRIAL SKM.MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19680324 199003 1 002

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Kesenjangan Gender antara Laki – Laki dan Perempuan

OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Politik melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

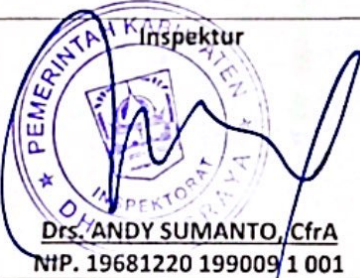
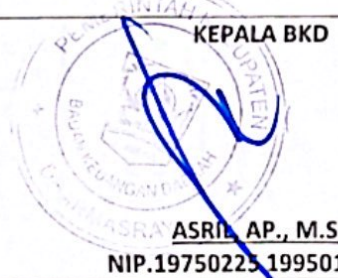


Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p>Program : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Politik melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</p> <p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi politik</p> <p>Tujuan : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Pengurus Partai Politik tentang Pertanggungjawaban keuangan Partai Politik</p>	<p>Jika di lihat dari sudut pandang sebelumnya bahwa peserta pengurus inti Partai politik di dominasi oleh kaum laki-laki makanya dengan adanya kegiatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya politik tidak tertutup kemungkinan Kaum Perempuan juga memiliki Peran yang baik dan bahkan juga bisa berpartisipasi dalam dunia politik agar tidak terjadi kesenjangan gender. Dalam Kegiatan ini mengundang 30 Peserta Pengurus Inti.</p> <p>Sesuai dengan Data Jumlah Pengurus Inti dari Keseluruhan Partai Politik berjumlah 30 Orang, Terdiri 25 orang laki-laki (90 %) dan 5 orang Perempuan</p>	<p><u>Akses:</u> Pada umumnya Pengurus Inti Partai Politik di dominasi oleh kaum laki-laki</p> <p><u>Partisipasi:</u> Perempuan Kurang Aktif dalam Ke ikut sertaan sebagai Pengurus Inti Partai Politik.</p> <p><u>Control:</u> Masih kurangnya Pemahaman pengetahuan tentang pembinaan administrasi dalam pengajuan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik bagi pengurus partai politik</p> <p><u>Manfaat :</u> Anggapan bahwa keikutsertaan Pengurus Inti dalam Partai Politik ini hanya</p>	<p>Keterbatasan perempuan dalam ikut serta sebagai pengurus parpol dan mengikuti berbagai kegiatan di pengaruhi oleh kodratnya sebagai wanita yang salah satunya mengutamakan kepentingan keluarga</p>	<p>Anggapan di masyarakat bahwa keorganisasian wanita didalam partai politik tidaklah memiliki peran banyak dan Tidak Tertalu Aktif, sebaliknya hanya di Dominasi Oleh Laki-laki</p>	<p>1. Menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan terpenuhi dalam berkegiatan.</p> <p>2. Meningkatnya pemahaman tentang administrasi partai politik</p>	<p>1. Mengundang Pengurus Partai Politik yang responsive gender</p> <p>2. Memfasilitasi pengurus Parpol dalam rangka pembinaan administrasi keuangan sehingga pengurus parpol mampu mengelola dana bantuan parpol dengan benar sesuai aturan dan peraturan yang berlaku</p>	<p>Dalam Kegiatan ini akan mengundang 30 Orang Peserta dari Pengurus Partai politik</p>	<p><u>Input :</u> Jumlah Dana Kegiatan ini sebesar Rp.43.294.000</p> <p><u>Output:</u> Jumlah orang yang Paham yang mengikuti Pelatihan pada Bimtek Pembinaan administrasi keuangan Partai Politik bagi pengurus Partai Politik yang Responsif Gender</p> <p><u>Outcome :</u> Meningkatnya pendidikan Politik masyarakat</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	(10%)	bermanfaat bagi kaum laki-laki.						

Pulau Punjung, Juni 2024

KEPALA
ASRI S.Pd, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19691225 199109 1 001

TIM VERIFIKASI ,

 Inspektur <u>Drs. ANDY SUMANTO, CfrA</u> NIP. 19681220 199009 1 001	 KEPALA BKD <u>ASRI AP., M.Si</u> NIP.19750225 199501 1 001	 Kepala BAPPERIDA <u>PARYANTO,S.Sos, M.T</u> NIP.19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB <u>MARTIN EFENDI, HS, S.Hut, MM</u> NIP. 19750905 200801 1 018
---	--	---	---

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

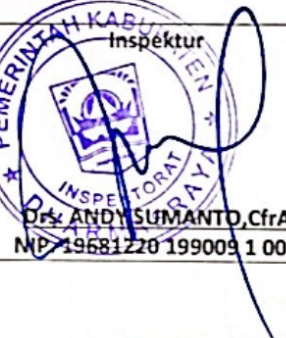



SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Politik melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		
KEGIATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
KODE KEGIATAN	8.01.03		
HASIL / OUTPUT	Meningkatnya pemahaman tentang administrasi Partai Politik bagi pengurus Partai Politik yang Responsif Gender		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Jika di lihat dari sudut pandang sebelumnya bahwa peserta pengurus inti Partai politik di dominasi oleh kaum laki-laki makanya dengan adanya kegiatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya politik tidak tertutup kemungkinan Kaum Perempuan juga memiliki Peran yang baik dan bahkan juga bisa berpartisipasi dalam dunia politik agar tidak terjadi kesenjangan gender. Dalam Kegiatan ini mengundang 30 Peserta Pengurus Inti. Sesuai dengan Data Jumlah Pengurus Inti dari Keseluruhan Partai Politik berjumlah 30 Orang, Terdiri 25 orang laki-laki (90 %) dan 5 orang Perempuan (10%)</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p><u>Akses:</u> Pada umumnya Pengurus Partai Politik di dominasi oleh kaum laki-laki</p> <p><u>Partisipasi:</u> Perempuan Kurang Aktif dalam Ke ikut sertaan sebagai Pengurus Partai Politik.</p> <p><u>Control:</u> Masih kurangnya Pemahaman pengetahuan tentang pembinaan administrasi dalam pengajuan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik bagi pengurus partai politik</p> <p><u>Manfaat :</u> Anggapan bahwa ke ikut sertaan Pengurus dalam Parta Politik ini hanya bermanfaat bagi kaum laki-laki.</p> <p>b. Penyebab Internal Keterbatasan perempuan dalam ikut serta sebagai pengurus parpol dan mengikuti berbagai kegiatan di pengaruhi oleh kodratnya sebagai wanita yang salah satunya mengutamakan kepentingan keluarga</p> <p>c. Penyebab Eksternal Anggapan di masyarakat bahwa keorganisasian wanita didalam partai politik tidaklah memiliki peran banyak dan Tidak Terlalu Aktif, sebaliknya hanya di Dominasi Oleh Laki-laki</p>		
RENCANA AKSI	<ol style="list-style-type: none"> Mengundang Pengurus Partai Politik yang responsive gender Memfasilitasi pengurus Parpol dalam rangka pembinaan administrasi keuangan sehingga pengurus parpol mampu mengelola dana bantuan parpol dengan benar sesuai aturan dan peraturan yang berlaku 		
CAPAIAN PROGRAM	<ol style="list-style-type: none"> Tolak Ukur Jumlah Dana sebesar Rp. 43.294.000 Indikator dan Target Kinerja <u>Input :</u> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dana Kegiatan ini sebesar Rp. 43.294.000 <u>Output:</u> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pemahaman tentang administrasi Partai Politik bagi pengurus Partai Politik yang Responsif Gender <u>Outcome :</u> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pendidikan Politik masyarakat 		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 23.134.178.480,- (Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah)		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Mengundang Pengurus Partai Politik yang responsive gender	
	Masukan	Rp.43.294.000,-	
	Keluaran	Memfasilitasi pengurus Parpol dalam rangka pembinaan administrasi keuangan sehingga pengurus parpol mampu mengelola dana bantuan parpol dengan benar sesuai aturan dan peraturan yang berlaku	
	Hasil	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Pengurus Partai Politik tentang Pertanggungjawaban keuangan Partai Politik	

Pulau Punjung, Juni 2024

KEPALA
ASRI, S.Pd, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19691225 199109 1 001

VERIFIKASI KEGIATAN

 <p>Inspektur <u>Dr. ANDY SUMANTO, CfrA</u> NIP. 19681220 199009 1 001</p>	 <p>KEPALA BKD <u>ASRI, AP. M.Si</u> NIP. 19750225 199501 1 001</p>	 <p>Kepala BAPPERIDA <u>PARYANTO, S.Sos, M.T</u> NIP. 19690609 198902 1 001</p>	 <p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB <u>MARTIN EFENDI, HS, S.Hut, MM</u> NIP. 19750905 200801 1 018</p>
---	--	---	--

FORM KAK/ TOR

Program		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
Sasaran Program		Pengurus Partai Politik
Kegiatan		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Sub Kegiatan		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Latar Belakang	Dasar Hukum	➤ Permendagri 36 tahun 2018 tentang tata cara perhitungan penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan bagi Partai Politik.
	Gambaran Umum	Kegiatan Administrasi Partai Politik dilaksanakan setiap tahun.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Partai Politik
	Indikator Kinerja	Terlaksananya pembinaan Administrasi Partai Politik bagi Pengurus Partai Politik
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Menambah Pengetahuan pengurus partai politik tentang Pembinaan administrasi partai politik
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Sosialisasi tentang Pembinaan Administrasi Partai Politik
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Menyesuaikan
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Penanggung Jawab : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2024
Biaya		Rp. 43.294.000

Pulau Punjung, Juni 2024


ASRI, S.Pd, MM
 Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP. 19691225 199109 1 001

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024

Urusan : Pemerintahan umum		
Unit Organisasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Sub Unit Organisasi	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program	8.01.03	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta budaya politik
Kegiatan	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan di bidang pendidikan politik etika budaya politik peningkatan demokrasi pesilitasi kelembagaan pemerintah perwakilan dan partai politik pemilihan umum /pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik
Sub Kegiatan	8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang pendidikan politik etika budaya politik peningkatan demokrasi pesilitasi kelembagaan pemerintah perwakilan dan partai politik pemilihan umum /pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah
Sumber Pendanaan		APBD
Lokasi Kegiatan		Menyesuaikan
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2024
Kelompok Sasaran		Pengurus partai Politik
Jumlah 2022		
Jumlah 2023		
Jumlah 2024		Rp. 43. 294.000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil		
Rincian Hitungan		
Kode Rekening	Uraian	Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah

Padang Panjang, Juni 2024
KEPALA

A. R. G. P. d. MM
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19691225 199109 1 001














MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
SERVIVE DELIVERY

OPD : Badan Keuangan Daerah
PROGRAM : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi	- 90% pendapata n masih bersumber pada dana pusat (dana transfer) Perbandingan persentase antara wajib pajak laki-laki dan	Akses: Kurangnya akses informasi bagi kelompok perempuan dalam hal pelayanan dan konsultasi pajak daerah Partisipasi: Kurangnya partisipasi bagi kelompok perempuan untuk ikut terlibat	- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami tentang pajak - Kurangnya media informasi berupa sosialisasi dalam bentuk media sosial - Belum adanya Petunjuk Teknis	Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak beserta manfaatnya	Meningkatn ya jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah yang responsif gender	-sosialisasi mengenai pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang responsif gender - Juknis atas kesetaraan gender dalam sosialisasi/penyuluhan terkait	- Perbandingan persentase antara wajib pajak laki-laki dan perempuan selama lima tahun terakhir yaitu laki-laki sebanyak 63% dan perempuan sebanyak	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan : Pengelolaan pendapatan daerah Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Pajak Daerah Tujuan : - Tersedianya Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang Responsif Gender Sasaran : Wajib Pajak	perempuan selama lima tahun terakhir yaitu laki-laki sebanyak 63% dan perempuan sebanyak 37% - Petugas pelayanan berjumlah 4 orang dengan 3 petugas perempuan dan 1 petugas laki-laki - jumlah objek	dalam kegiatan sosialisasi/penyuluhan terkait konsultasi pajak daerah Kontrol: Yang berwenang dan para pengambil keputusan dalam pelayanan dan konsultasi pajak daerah masih belum memperhatikan kebutuhan gender dan belum semua masyarakat menyadari manfaat dari	(Juknis) atas kesetaraan gender dalam sub output sosialisasi/penyuluhan sehingga pelaksana tidak dapat menentukan kuota jumlah undangan perempuan dan laki-laki yang dapat mengikuti kegiatan sosialisasi/penyuluhan				37% - Petugas pelayanan berjumlah 4 orang dengan 3 petugas perempuan dan 1 petugas laki-laki - jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya sebanyak ±85000 objek pajak pada kabupaten dharmastraya	Input : - Total Pendapatan : 964.168.007.61 2,00- Jumlah PAD : 105.162.132.16 0,00- Jumlah Dana Transfer : 850.258.147 .517,00.- Output: Terlaksananya pelayanan dan konsultasi pajak daerah dari berbagai unsur perempuan dan anak

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	pajak yang disesuaikan NJOP nya sebanyak ±85000 objek pajak pada kabupaten dharmastraya	konsultasi pajak daerah Manfaat : Membantu mengurangi kesenjangan gender dalam masalah pelayanan dan konsultasi pajak daerah						Outcomes : Persentase pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang responsif gender

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9				
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL					
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja				
<div style="text-align: right;"> Pulau Pinjung, Juni 2023  <u>ASRI, A.P, M.Si</u> NIP 19750225-199501 1 001 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Tim Verifikasi : </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  <u>Dis. ANDY SUMANTO, CfrA</u> NIP 19681220 199009 1 001 </td> <td style="width: 25%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  <u>ASRI, A.P, M.Si</u> NIP 19750225-199501 1 001 </td> <td style="width: 25%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  <u>PARYANTO, S.Sos, M.T</u> NIP 19690609-198902 1 001 </td> <td style="width: 25%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  <u>MARTIN EFENDI, S.Hut, MM</u> NIP 1970905 200801 1 018 </td> </tr> </table>									 <u>Dis. ANDY SUMANTO, CfrA</u> NIP 19681220 199009 1 001	 <u>ASRI, A.P, M.Si</u> NIP 19750225-199501 1 001	 <u>PARYANTO, S.Sos, M.T</u> NIP 19690609-198902 1 001	 <u>MARTIN EFENDI, S.Hut, MM</u> NIP 1970905 200801 1 018
 <u>Dis. ANDY SUMANTO, CfrA</u> NIP 19681220 199009 1 001	 <u>ASRI, A.P, M.Si</u> NIP 19750225-199501 1 001	 <u>PARYANTO, S.Sos, M.T</u> NIP 19690609-198902 1 001	 <u>MARTIN EFENDI, S.Hut, MM</u> NIP 1970905 200801 1 018									

GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) SERVIVE DELIVERY	
SKPD	: BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN	: 2024
PROGRAM	Pengelolaan Pendapatan Daerah
KODE PROGRAM	5.02.04
KEGIATAN	Pengelolaan Pendapatan Daerah
SUB KEGIATAN	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
HASIL/OUTPUT	Layanan dan konsultasi pajak daerah yang responsif gender
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90% pendapatan masih bersumber pada dana pusat (dana transfer) - Perbandingan persentase antara wajib pajak laki-laki dan perempuan selama lima tahun terakhir yaitu laki-laki sebanyak 63% dan perempuan sebanyak 37% - Petugas pelayanan berjumlah 4 orang dengan 3 petugas perempuan dan 1 petugas laki-laki - jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya sebanyak ±85000 objek pajak pada kabupaten dharmasraya <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor kesenjangan</p> <p><u>Akses:</u> Kurangnya akses informasi bagi kelompok perempuan dalam hal pelayanan dan konsultasi pajak daerah</p> <p><u>Partisipasi:</u> Kurangnya partisipasi bagi kelompok perempuan untuk ikut terlibat dalam kegiatan sosialisasi/penyuluhan terkait konsultasi pajak daerah</p> <p><u>Kontrol:</u> Yang berwenang dan para pengambil keputusan dalam pelayanan dan konsultasi pajak daerah masih belum memperhatikan kebutuhan gender dan belum semua masyarakat menyadari manfaat dari konsultasi pajak daerah</p>

	<p>Manfaat ; Membantu mengurangi kesenjangan gender dalam masalah pelayanan dan konsultasi pajak daerah</p> <p>b. Sebab Kesenjangan Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami tentang pajak - Kurangnya media informasi berupa sosialisasi dalam bentuk media sosial - Belum adanya Petunjuk Teknis (Juknis) atas kesetaraan gender dalam sub output sosialisasi/penyuluhan sehingga pelaksana tidak dapat menentukan kuota jumlah undangan perempuan dan laki-laki yang dapat mengikuti kegiatan sosialisasi/penyuluhan <p>c. Sebab Kesenjangan Eksternal Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak beserta manfaatnya</p>		
RENCANA AKSI	Sub Kegiatan	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
		Tujuan	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan dan konsultasi pajak daerah dari setiap unsur gender khususnya perempuan
		Alokasi Anggaran	Rp. 177.214.000,00,-
CAPAIAN PROGRAM	<ul style="list-style-type: none"> • Output: Terlaksananya pelayanan dan konsultasi pajak daerah dari berbagai unsur perempuan dan anak • Outcomes: Persentase pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang responsif gender 		

Pulau Pinang, Juni 2024

ASRI A.P.M.Si
NIP 19750225 199501 1 001

TIM VERIFIKASI

 INSPEKTUR ANJAY S. MANUJAYA NIP 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD ASRI A.P.M.Si NIP 19750225 199501 1 001	 Kepala Kepala BAPPERIDA PARYANTO, S. S. M. T NIP 19690609 198902 1 001	 Kepala DINSOSP3APPKB MARTIN EFFENDI, S. Hut, MM NIP 19790905 200801 1 018
--	---	--	--

KAK/ TOR

Program		Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sasaran Program		Kepala OPD, Instansi Vertikal, Masyarakat
Kegiatan		Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Permendagri Nomor 67 tahun 2011 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
	Gambaran Umum	Di kab DM dari sekian OPD, Instansi vertikal tergabung mempunyai 38 OPD, 2 Instansi Vertikal. Untuk terlaksananya kualitas pajak yang baik maka perlu dilakukan konsultasi pelayanan pajak.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Indikator Kinerja	Meningkatnya jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah
	Batasan Kegiatan	Pada kegiatan konsultasi dibahas tentang peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah
Maksud dan Tujuan		Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan dan konsultasi pajak daerah dari setiap unsur gender khususnya perempuan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Melalui sosialisasi, diskusi, pemaparan dan tanya jawab
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB Penanggung Jawab : Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2024
Biaya		Rp. 177.214.000,00,-

Pulau Punjung, Juni 2024

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,
KABUPATEN DHARMASRAYA**



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) CAPAIAN SASARAN RPJMD

OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

PROGRAM : Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
Program : Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Tujuan : - Terselenggaranya Musrenbang RKPD	1. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang perencanaan partisipatif, bottom-up, top-down, teknokratik, politik 2. Musrenbang salah satu instrument untuk menjawab pendekatan bottom up 3. RKPD 2024 porsi terkait dengan isu gender masih minim di Bab II, Bab III, Bab IV dan bab V	Akses: - Orang yang menghadiri sudah ditentukan (undangan menghadiri untuk orang tertentu/ tidak menjangkau semua komponen) Partisipasi: (dalam menyampaikan aspirasi) - Keterlibatan mayoritas laki-laki pada musrenbang Musrenbang RKPD Kabupaten - Partisipasi perempuan lebih sedikit dibanding peserta laki-laki,	- ASN yang berperan sebagai Fasilitator dan narasumber tidak memahami konsep responsif Gender - Kesenjangan Gender dimana laki-laki lebih banyak menduduki jabatan penting daripada perempuan - Petunjuk Musrenbang belum Responsif Gender	- Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsep Gender yang menganggap gender sebagai mendahulukan perempuan - Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsep gender - Budaya Patriarki yang mengutamakan Pria sebagai pemimpin dalam hal kepala keluarga, tokoh masyarakat, ketua kelompok, dll - Terbatasnya akses dan partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan, dimana perempuan dianggap lebih mendahulukan perasaan dibanding fakta	Terakomodir nya usulan masyarakat berbasis gender dalam dokumen perencanaan	- sosialisasi dan undangan secara adil dan merata - partisipasi kelompok perempuan yang mewakili gender minimal 30% - sosialisasi tentang yang akan dibahas dalam perencanaan pembangunan guna meningkatkan kualitas peserta musrenbang	- pelaksanaan musrenbang RKPD Tahun 2025 jumlah peserta laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan (69,73%) atau 70%	Input : Dana untuk pelaksanaan kegiatan musrenbang tahun 2025 sebesar Rp.115,000,000.- Output: Dokumen perencanaan (RKPD) yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas Outcomes : Terakomodirnya perencanaan pembangunan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
	<p>4. Jumlah penduduk Dharmasraya secara keseluruhan pada tahun 2023 sebanyak 234.713 dimana jumlah penduduk laki-laki : 119.505 dan perempuan : 115.208</p> <p>5. Jumlah peserta musrenbang dari 434 Orang, 4 orang dari forum anak, disabilitas -, laki-laki 280 orang atau 65 % perempuan 154 orang atau 35 %</p> <p>6. Usulan masyarakat lebih banyak</p>	<p>dan kualitas perwakilan perempuan relatif pasif dibandingkan peserta laki-laki sehingga tidak bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan</p> <p>- Utusan Perwakilan dari kecamatan pada kegiatan musrenbang didominasi laki-laki dibanding perempuan, karena terkait petugas/pejabat wewenang nagari didominasi kaum laki-laki</p> <p>Control:</p> <p>- Kemampuan masyarakat menentukan usulannya tergantung pada prioritas, keselarasan pembangunan daerah, provinsi</p>				(khususnya) perempuan -jknis yang responsif gender dalam proses musrenbang (advokasi, sosialisasi Pengarusutamaan gender)		yang responsif gender

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
	pada bidang fisik dan prasarana minim usulan yang menjadi kebutuhan mayoritas perempuan	Manfaat : - Porsi pengelolaan anggaran lebih banyak ditentukan oleh pendekatan <i>topdown</i> dan politik						

Pulau Punjung, 25 Juni 2024



Kepala BAPPERIDA
KABUPATEN DHARMASRAYA

PARYANTO, S.Sos., MT.
NIP. 19690609 198902 1 001

Tim Verifikasi

 Inspektur Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD Asri AP, M. Si NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala BAPPERIDA Paryanto, S. Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala DINSOSP3APPKB MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018
--	--	---	---

GENDER BUDGET STATEMENT

INDIKATOR KINERJA UTAMA : CAPAIAN SASARAN RPJMD

SKPD : BAPPERIDA DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
KODE PROGRAM	5.01.02		
KEGIATAN	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
HASIL/ OUTPUT	Dokumen perencanaan (RKPD) yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permendagri 86 Tahun 2017 tentang perencanaan partisipatif, bottom-up, top-down, teknokratik, politik - Musrenbang salah satu instrument untuk menjawab pendekatan bottom up - RKPD RKPD 2024 porsi terkait dengan isu gender masih minim di Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V - Jumlah peserta musrenbang dari 214 Orang, 3 orang dari forum anak, disabilitas -, laki-laki 138 orang atau 65 % perempuan 76 orang atau 35 % - Usulan masyarakat lebih banyak pada bidang fisik dan prasarana - Minim usulan yang menjadi kebutuhan mayoritas perempuan <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orang yang menghadiri sudah ditentukan (undangan tidak menjangkau semua komponen) - Keterlibatan mayoritas laki-laki pada musrenbang Musrenbang RKPD Kabupaten - Partisipasi perempuan lebih sedikit dibanding peserta laki-laki, dan kualitas perwakilan perempuan relatif pasif dibandingkan peserta laki-laki sehingga tidak bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan - Utusan Perwakilan dari kecamatan pada kegiatan musrenbang didominasi laki-laki dibanding perempuan, karena terkait petugas/pejabat wewenang nagari didominasi kaum laki-laki - Kemampuan masyarakat menentukan usulannya tergantung pada prioritas, keselarasan pembangunan daerah, provinsi - Porsi pengelolaan anggaran lebih banyak ditentukan oleh pendekatan topdown dan politik <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASN yang berperan sebagai fasilitator dan narasumber tidak memahami konsep responsif gender - Kesenjangan Gender dimana laki-laki lebih banyak menduduki jabatan penting daripada perempuan - Petunjuk Musrenbang belum Responsif Gender <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsep Gender yang menganggap gender sebagai mendahulukan perempuan - Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsep gender - Budaya Patriaki yang mengutamakan Pria sebagai pemimpin dalam hal kepala keluarga, tokoh masyarakat, ketua kelompok, dan lain-lain - Terbatasnya akses dan partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan, dimana perempuan dianggap lebih mendahulukan perasaan dibanding fakta 		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Sosialisasi tentang yang akan dibahas dalam perencanaan pembangunan	
		Tujuan	Meningkatkan kualitas peserta musrenbang (khususnya) perempuan
		Alokasi Anggaran	Rp. 115,000,000,-
	Komponen/ Aktifitas 2	Juknis yang responsif gender dalam proses musrenbang	
		Tujuan	Fasilitasi gender dalam musrenbang
		Alokasi Anggaran	Rp. 115,000,000,-
	Total Anggaran	Rp. 115,000,000,-	

Capaian Program

Out put : RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2025 yang responsif Gender

Out come : Terakomodirnya usulan masyarakat berbasis gender dalam dokumen perencanaan



Pulau Punjung, 25 Juni 2024

KEPALA BAPPERIDA,
KABUPATEN DHARMASRAYA

PARYANTO, S.Sos., MT.

NIP. 19680609 198902 1 001



Tim Verifikasi

Inspektur

Kepala BKD

Kepala BAPPERIDA

Kepala DINSOSP3APPKB

Drs. Andy Sumanto, CfrA

NIP. 19681220 199009 1 001

Asli, AP, M. Si

NIP. 19750225 199501 1 001

Paryanto, S. Sos, M.T

NIP. 19680609 198902 1 001

MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M

NIP. 19790905 200801 1 018

FORM KAK/ TOR

Program		Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sasaran Program		Optimalisasi keterlibatan stakeholder dalam RKPD
Kegiatan		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub Kegiatan		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
	Gambaran Umum	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional
	Indikator Kinerja	Tertaksananya Musrenbang RKPD Kab. Dharmasraya
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Terakomodirnya hasil musrenbang dalam RKPD
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Mengundang utusan nagari, utusan kecamatan, stakeholker terkait untuk merumuskan usulan prioritas dalam musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten, murenbang provinsi dan musrenbang nasional dalam waktu yang telah ditentukan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Penanggung Jawab : Kepala BAPPERIDA
Jadwal		Bulan Januari-Mei 2024
Biaya		Rp. 115.000.000,-

Pulau Punjung, 25 Juni 2024


KEPALA BAPPERIDA,
KABUPATEN DHARMASRAYA
PARYANTO, S.Sos., MT
 NRP. 19690609 198902 1 001





GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
KESENJANGAN GENDER ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

OPD : BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETAIAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program : <i>Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</i> Kegiatan : <i>Pelaksanaan dan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi</i> Sub Kegiatan: <i>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Tujuan Menyediakan informasi</i>	Data Pembuka Wawasan : - Jumlah Angkatan Kerja Laki-laki 75.776 Perempuan 47.748 - Pengangguran Laki-laki 3.223 Pengangguran Perempuan 4.966 - Peraturan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi no 8 tahun 2014 tentang	Faktor Kesenjangan : <u>Akses :</u> - Akses: kuato pelatihan dan Anggaran blm memadai - Partisipasi Jumlah Pengangguran yang dibina laki2 60 orang dan Perempuan 100 orang Control: Jumlah Pengangguran yang ada di Dharmasraya	Sebab Kesenjangan Internal - Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas untuk menampung dan meningkatkan keberdayaan peserta pelatihan - masih belum adanya kerjasama dengan pihak swasta yang mau menerima /mempekerjaka n peserta pelatihan - tidak adanya tindak lanjut	Sebab Kesenjangan Eksternal - Rendahnya penampungan bagi peserta Perempuan untuk mendapatkan pekerjaan	Reformulasi Tujuan - Meningkatkan keterampilan bagi angkatan kerja dan mengurangi kerentanan ekonomi	Rencana Aksi - Dengan Instansi melakukan perekrutan peserta pelatihan - Melakukan identifikasi peserta pelatihan berdasarkan jenis kelamin, usia - Meningkatkan sarana dan prasarana sehingga kegiatan yang dilakukan dapat maksimal - memberikan	Data Dasar (Baseline) - merekrut peserta yang mengikuti pelatihan berjumlah 160 orang dari keseluruhan dengan satu paket kegiatan dengan peserta 16 orang per paket	Indikator Gender - Output Jumlah Angkatan kerja yang mengikuti pelatihan yang Respon if Gender - Outcome *Meningkatkan kompetensi peserta pelatihan * jumlah tenaga kerja yang terampil dan kompeten sehingga kehidupan Masyarakat lebih sejahtera

<i>lowongan untuk Angkatan Kerja</i>	<i>pedoman penyelenggara an pelatihan berbasis kompetensi</i>	Manfaat : <i>Jenis Pembinaan yang diberikan berupa Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>setelah kegiatan tersebut dilakukan</i>			<i>motivasi dan pengertian kepada peserta</i>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program : <i>Penempatan dan Tenaga Kerja</i> Kegiatan : <i>Pengelola Informasi Pasar Kerja</i> Sub Kegiatan : <i>Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online</i> Tujuan : <i>Menyediakan informasian bagi Pencari Kerja berdasarkan</i>	Data Pembuka Wawasan : <i>-Jumlah data pencari kerja 1.816 Laki-laki dan 2677 Perempuan</i> <i>-Permenaker no 39 tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja</i>	Faktor Kesenjangan : Akses : <i>-Akses Pelayanan Informasi lowongan kerja laki-laki dan Perempuan mendapatkan akses yang sama</i> <i>-Partisipasi Mendapatkan informasi lowongan kerja yang ada di dharmasraya</i>	Sebab Kesenjangan Internal <i>-Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dinas</i>	Sebab Kesenjangan Eksternal <i>-Masih kurangnya informasi tentang lowongan kerja yang terbuka baik offline maupun online</i>	Reformulasi Tujuan <i>Meningkatkan informasi tentang lowongan kerja sehingga bisa mengurangi terjadinya pengangguran</i>	Rencana Aksi <i>Meningkatkan Informasi Lowongan Tenaga Kerja</i>	Data Dasar (Baseline) <i>Penempatan tenaga kerja laki-laki 257 orang dan Perempuan 155 orang</i>	Indikator Gender Output: <i>-Meningkatnya pemenuhan kesempatan kerja</i> Outcome <i>-Mengurangi angka pengangguran</i>

TIM VERIFIKASI

 Inspektur <u>Drs. Andy Sumanto, CfrA</u> NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD <u>Asril, AP, M. Si</u> NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida <u>Parvanto, S. Sos, M.T</u> NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala DINSP3APPKB <u>MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M</u> NIP. 19790905 200801 1 018
--	--	---	---



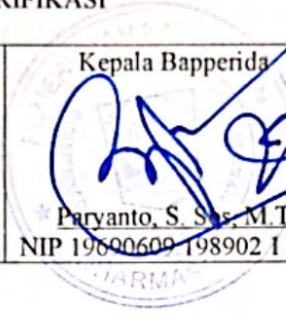

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
TAHUN : 2024			
PROGRAM	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja		
KODE PROGRAM	2.07.03		
KEGIATAN	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		
HASIL/OUTPUT	Meningkatkannya Angkatan Kerja yang terlatih dan berkompeten		
ANALISIS SITUASI	<div>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</div> <div><div>a. Merekrut 160 angkatan kerja Peserta Pelatihan yang lebih banyak diikuti peserta Perempuan dibandingkan laki-laki yaitu</div><div>Laki laki 38,5%</div><div>Perempuan 61,5%</div></div> <div><div>b. Adapun Instruktur pelatihan sebanyak 7 orang</div><div>c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan mendapatkan 18 Paket setiap paket pesertanya 16 orang Angkatan kerja</div></div> <div>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</div> <div><div>a. Faktor Kesenjangan</div><div><div>➤ Akses</div><div>Masih Kurangnya kuato pelatihan dan anggaran yang belum memadai</div></div><div><div>➤ Partisipasi</div><div>Jumlah pengangguran yang di bina, saat ini dengan jumlah laki- laki dan perempuan</div></div><div><div>➤ Manfaat</div><div>Meningkatnya pengarustamaan gender dalam mengikuti kegiatan Pendidikan dan pelatihan</div></div></div> <div><div>b. Penyebab Internal</div><div>Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas untuk menampung dan meningkatkan kebedayaan peserta pelatihan</div></div> <div><div>c. Penyebab Eksternal</div><div>Rendahnya penampungan bagi pesrta perempuan untuk mendapatkan pekerjaan</div></div>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Merekrut peserta Pendidikan dan pelatihan yang responsive gender	
		Tujuan	Meningkatnya Pendidikan dan keterampilan serta keahlian bagi Angkatan kerja
		Alokasi Anggaran	Rp. 51.465.900,-

	Komponen/ aktifitas 2	Tujuan	
		Alokasi Anggaran	
	Total anggaran		Rp. 51.465.900,-
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Output Meningkatkan ngkatan kerja yang terlatih dan berkompenten yang Responsif Gender Outcome Meningkatkan Angkatan kerja yang mempunyai kemampuan dengan keahlian dan terampilan sehingga kehidupan Masyarakat lebih Sejahtera dan berdaya guna.		


KEPALA DINAS,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NASDAM, S.Sos., MM
NIP. 19670607 199103 1 004

TIM VERIFIKASI

 Inspektur <u>Drs. Andy Sumanto, CfrA</u> NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD <u>Aril, AP, M. Si</u> NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida <u>Paryanto, S. Sos, M. T</u> NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala DINSP3APPKB <u>MARTIN EFENDI, S. Hut, M. M</u> NIP. 19790905 200801 1 018
--	---	---	---

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD	: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
TAHUN ANGGARAN	: 2024		
PROGRAM	Program Penempatan Tenaga Kerja		
KODE PROGRAM	2.07.04		
KEGIATAN	Pengelola Informasi Pasar Kerja		
HASIL/OUTPUT	Meningkatkannya Pemenuhan Kesempatan Kerja		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Pencaker 1.816 Laki-laki ➤ Jumlah Pencaker 2.677 Perempuan ➤ Permenaker No 29 Tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Akses</i> Pelayanan Informasi lowongan kerja laki-laki dan perempuan mendapatkan akses yang sama ➤ <i>Partisipasi</i> Mendapatkan informasi lowongan kerja yang ada di Dharmasraya ➤ <i>Manfaat</i> Meningkatkan pelestarian gender dalam penempatan tenaga kerja, informasi lowongan yang diberikan pada pencari kerja <p style="padding-left: 20px;">b. Penyebab Internal Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas.</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Penyebab Eksternal Masih kurangnya informasi tentang lowongan kerja yang terbuka baik secara offline maupun online.</p>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Mendata Tenaga Kerja yang responsive gender	
		Tujuan	Menyediakan informasi lowongan untuk Angkatan Kerja
		Alokasi Anggaran	Rp. 50.841.000,-
	Komponen/ aktifitas 2		
		Tujuan	

		Alokasi Anggaran	
	Total anggaran		50.841.000,-
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Output Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja Outcome Mengurangi angka pengangguran		


KEPALA DINAS,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KANDAM, S.Sos., MM
NIP. 19670607 199103 1 004

TIM VERIFIKASI

 <p>Inspektur</p> <p><u>Drs. Andy Sumanto, CfrA</u></p> <p>NIP. 19681220 199009 1 001</p>	 <p>Kepala BKD</p> <p><u>Asri, AP, M. Si</u></p> <p>NIP. 19750225 199501 1 001</p>	 <p>Kepala Bapperida</p> <p><u>Paryanto, S. Sos. M. I</u></p> <p>NIP. 19690609 198902 1 001</p>	 <p>Kepala DINSP3APPKB</p> <p><u>MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M</u></p> <p>NIP. 19790905 200801 1 018</p>
---	---	---	---

FORM KAK/ TOR

Program		Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
Sasaran Program		Meningkatnya Pelayanan
Kegiatan		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
Sub Kegiatan		Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan berbasis Kompetensi
	Gambaran Umum	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan setiap tahun
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan
	Indikator Kinerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Bertambahnya pengetahuan Pendidikan keterampilan dan keahlian bagi Angkatan Kerja
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Merekrut Angkatan Kerja untuk Mengikuti pelatihan dan Pendidikan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Menyesuaikan
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : UPT BLK Sungai Dareh Penanggung Jawab : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jadwal		Januari sd juni 2024
Biaya		Rp. 50.841.000,-


KEPALA DINAS,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KANDAM, S.Sos., MM
NIP. 19670607 199103 1 004

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat (Service delivery)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Penanggulangan Bencana Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota Tujuan : Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan SPM Sub Kebencanaan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Kebencanaan. Jumlah peserta pelatihan pada tahun 2024 sebanyak 100 orang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> Perempuan Dewasa : 70 orang Laki-laki dewasa : 30 orang 	Akses: Tidak sesuai dengan responsif gender jumlah laki-laki dengan perempuan yang menjadi peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. Partisipasi: (Minimnya minat kaum laki-laki mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana)	Peserta pelatihan kurang memahami tujuan dari pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dengan Pemerintah Nagari yang daerahnya termasuk daerah rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi lintas sector yang masih belum optimal Kurangnya minat peserta laki-laki untuk mengikuti kegiatan terkait pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 	Keseimbangan peserta laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Meminta Pemerintah Nagari yang daerahnya termasuk daerah rawan bencana untuk memprioritaskan peserta atau setidaknya sama banyaknya peserta laki-laki dan perempuan dalam mengikuti kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Meningkatnya kewasapadaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Out put : Meningkatnya jumlah peserta pelatihan dan gladi kesiapsiagaan bencana dari kaum laki-laki Out come Menurunnya tingkat resiko bencana bagi masyarakat rawan bencana.

<p>Kegiatan : Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</p> <p>Sub Kegiatan : Pencarian, Pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota</p> <p>Tujuan : Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban secara cepat dan tanggap</p>	<p>Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan SPM Sub Kebencanaan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Kebencanaan.</p> <p>Jumlah korban bencana pada tahun 2024 sebanyak 3766 jiwa</p>	<p>Akses: Lambatnya respon kaum perempuan terhadap informasi sehingga lambat proses pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana</p> <p>Partisipasi: Dalam proses pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kaum perempuan sering terikat dengan tanggung jawab yang lain(mengurus keluarga) serta keterbatasan fisik daripada kaum laki-laki</p>	<p>Adanya kebiasaan ketergantungan kaum perempuan terhadap laki-laki dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana</p>	<p>Adanya keterikatan budaya yang ada di daerah setempat yang selalu mendahulukan laki-laki daripada perempuan</p>	<p>Keseimbangan kaum laki-laki dan perempuan dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana</p>	<p>Meminta Pemerintah setempat untuk melakukan pelatihan kepada kaum laki-laki dan perempuan dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana</p>	<p>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana</p>	<p>Out put : Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana</p> <p>Out come Upaya penyelamatan dan evakuasi korban dapat dilakukan secara cepat dan tanggap</p>
--	---	--	---	--	---	---	---	---

Pulau Punjung, Juni 2024

KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN DHARMASRAYA

ELDISON, ST
Pembina IV/a

NIP. 1973712 200501 1 012

Inspektur,

Kepala BKD,

Drs. Andy Sumanto, CFA
NIP 19681220 199009 1 001

Asril, AP, M. Si
NIP 197502251995011001

Tim Verifikasi

Kepala Bapperida,

Kepala Dinas Sosial P3A PPKB

Paryanto, S.Sos,M.T
NIP 19690609 198902 1 001

Martin efendi, HS, S.Hut, MM
NIP 19790905 200801 1 018

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

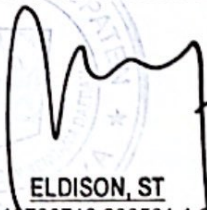
SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	PENANGGULANGAN BENCANA		
KODE PROGRAM	1.05.03		
KEGIATAN	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
HASIL/OUTPUT	Meningkatnya jumlah peserta pelatihan dan gladi kesiapsiagaan bencana dari kaum laki-laki		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <p>Jumlah Peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana pada tahun 2024 sebanyak 100 orang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perempuan Dewasa : 70 orang Laki-laki dewasa : 30 orang <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>a) Tidak sesuai dengan responsif gender jumlah laki-laki dengan perempuan yang menjadi peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana.</p> <p>b) (Minimnya minat kaum laki-laki mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana)</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <p>Peserta pelatihan kurang memahami tujuan dari pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dengan Pemerintah Nagari yang daerahnya termasuk daerah rawan bencana</p> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <p>a) Koordinasi lintas sektor yang masih belum optimal</p> <p>b) Kurangnya minat peserta laki-laki untuk mengikuti kegiatan terkait pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</p>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Meminta Pemerintah Nagari yang daerahnya termasuk daerah rawan bencana untuk memprioritaskan peserta atau setidaknya sama banyaknya peserta laki-laki dan perempuan dalam mengikuti kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	
		Tujuan	Meningkatnya kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana
		Alokasi	
		Anggaran	
	Komponen/ Aktifitas 2	Melaksanakan pelatihan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	
		Tujuan	Meningkatnya jumlah peserta pelatihan dan gladi kesiapsiagaan bencana dari kaum laki-laki
		Alokasi	
		Anggaran	
	Total Anggaran	Rp. 150.006.000,- (Seratu lima puluh juta enam ribu rupiah)	

Capaian Program	<p>Out put :</p> <p>Meningkatnya jumlah peserta pelatihan dan gladi kesiapsiagaan bencana dari kaum perempuan</p> <p>Out come</p> <p>Menurunnya tingkat resiko bencana bagi masyarakat rawan bencana</p>
-----------------	--

Pulau Punjung, Juni 2024

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ELDISON, ST
NIP. 19730712 200501 1 012

Tim Verifikasi




Inspektur
Drs. Andy Sumanto, CFrA
NIP. 19681220 199009 1 001



Kepala BKD
Asri, AP, M. Si
NIP. 19750226 199501 1 001



Kepala Bapperida
Paryanto, S.Sos, M.T
NIP. 19690609 198902 1 001



Kepala Dinas Sosial P3A
PPKB
Martin Efendi, HS, S.Hut, MM
NIP. 19790905 200801 1 018

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

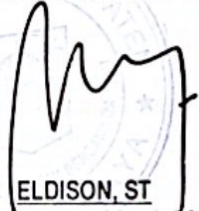
SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	PENANGGULANGAN BENCANA		
KODE PROGRAM	1.05.03		
KEGIATAN	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
HASIL/OUTPUT	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pencarian, pertolongan dan evaluasi korban bencana		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <p>Jumlah korban bencana pada tahun 2024 sebanyak 2.291 jiwa yang terdiri dari seluruh masyarakat</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>a. Lambatnya respon kaum perempuan terhadap informasi sehingga lambatnya proses pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana</p> <p>b. Dalam proses pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kaum perempuan sering terikat dengan tanggung jawab yang lain(mengurus keluarga) serta keterbatasan fisik daripada kaum laki-laki</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <p>Adanya kebiasaan ketergantungan kaum perempuan terhadap laki-laki dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana</p> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <p>Adanya keterikatan budaya yang ada di daerah setempat yang selalu mendahulukan laki-laki daripada perempuan</p>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Meminta Pemerintah setempat untuk melakukan pelatihan kepada kaum laki-laki dan perempuan dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	
		Tujuan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ Aktifitas 2		
		Tujuan	
		Alokasi Anggaran	
	Total Anggaran	41.008.000,- (Empat puluh satu juta delapan ribu rupiah)	

Capaian Program	<p>Out put :</p> <p>Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana</p> <p>Out come</p> <p>Upaya penyelamatan dan evaluasi korban dapat dilakukan secara cepat dan tanggap</p>
-----------------	--

Pulau Punjung, Juni 2024

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN DHARMASRAYA,


ELDISON, ST
NIP. 1930712 200501 1012

Tim Verifikasi


Inspektur


Drs. Andy Sumanto, CFA
NIP 19681220 199009 1 001


Kepala BKD

Asril, AP, M. Si
NIP 19750225 199501 1001


Kepala Bapperida

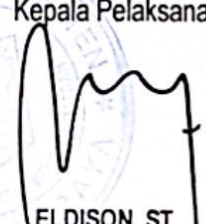
Paryanto, S. Sos, M.T
NIP 19690609 198902 1 001


Kepala Dinas Sosial P3A
PPKB

Martin Efendi, HS, S.Hut, MM
NIP 19790905 200801 1 018

FORM KAK/ TOR

Program		Program Penanggulangan Bencana
Sasaran Program		Terlaksananya penanggulangan bencana di daerah
Kegiatan		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Sub Kegiatan		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Kebencanaan
	Gambaran Umum	Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana bagi warga negara yang berada di kawasan rawan bencana
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Kegiatan berupa pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana sesuai dengan potensi bencana yang berada di kawasan rawan bencana
	Indikator Kinerja	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (orang)
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dalam menghadapi bencana
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Mengundang masyarakat dan tokoh masyarakat yang berdomisili di kawasan rawan bencana untuk mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana di tempat yang telah ditentukan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Menyesuaikan dengan kondisi tempat
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggung Jawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya
Jadwal		Bulan Maret 2024
Biaya		Rp. 150.006.000,-

Pulau Punjung, Juni 2024
Kepala Pelaksana,



ELDISON, ST
NIP. 19730712 200501 1012

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024

Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Unit Organisasi	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Kegiatan	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Sub Kegiatan	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota
Sumber Pendanaan		APBD
Lokasi Kegiatan		Dharmasraya
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2024
Kelompok Sasaran		Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana
Jumlah 2023		352.640.000,- (Tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
Jumlah 2024		150.006.000,- (seratus lima puluh juta enam ribu rupiah)
Jumlah 2025		

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

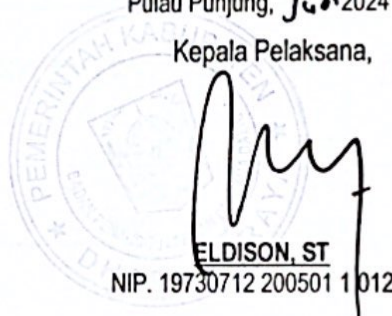
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Memperoleh layanan pencegahan & kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	150.006.000,-
Keluaran	Terlaksananya pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 orang
Hasil	Memperoleh layanan pencegahan & kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Hitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI					150.006.000
5.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA					150.006.000
5.1.2.01	BELANJA BARANG					51.370.000
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					6.370.000
	BBM Peralite	637	liter	10.000		6.370.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja pakaian dinas lapangan					45.000.000
	Pakaian seragam lapangan Spesifikasi :Bahan kaus	100	lembar	100.000		10.000.000
	Pakaian seragam pelatihan Spesifikasi: Bahan katun	40	lembar	500.000		20.000.000
	Rompi Spesifikasi: Logo bordir	100	lembar	150.000		15.000.000
5.1.02.02	Belanja jasa					30.850.000

5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					30.850.000
	ATK Kegiatan	100	paket	65.000		6.500.000
	Bahan Cetak	20	M1	45.000		900.000
	Honorarium					2.950.000
	Makanan dan Minuman					10.500.000
	Uang saku peserta					10.000.000
5.1.02..04.01	Belanja Perjalanan Dinas					67.786..000
5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan Biasa					44.686.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja perjalanan dalam kota					23.100.000
Grand Total						150.006.000

Pulau Punjung, Juli 2024

Kepala Pelaksana,



ELDISON, ST
NIP. 19730712 200501 1 012

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

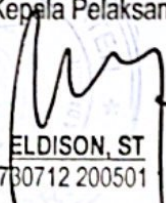
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024

Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Unit Organisasi	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
Sub Unit Organisasi	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
Program	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
Kegiatan	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
Sub Kegiatan	1.05.03.2.03.03	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana				
Sumber Pendanaan		APBD				
Lokasi Kegiatan		Dharmasraya				
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2024				
Kelompok Sasaran		Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana				
Jumlah 2023		Rp. 37.125.000,-(Tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)				
Jumlah 2024		Rp. 41.008.000,-(Empat puluh satu juta delapan ribu rupiah)				
Jumlah 2025						
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Program	Memperoleh layanan pencegahan & kesiapsiagaan terhadap bencana					
Masukan	Dana yang dibutuhkan					
Keluaran	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi					
Hasil	Jumlah/persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
Rincian Hitungan						
Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI					41.008.000
5.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA					41.008.000
5.1.2.01	BELANJA BARANG					5.000.000
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.000.000
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					5.000.000
	BBM Peralite	500	liter	10.000		5.000.000
5.1.02.02	Belanja jasa					26.000.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa tenaga penanganan bencana					26.000.000

5.1.2..04	Belanja Perjalanan Dinas					10.008.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa					5.608.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja perjalanan dalam kota					4.400.000
Grand Total						41.008.000

Pulau Punjung, Juni 2024

Kepala Pelaksana,


ELDISON, ST

NIP. 19730712 200501 012

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Penugasan Prioritas Nasional/Global seperti Pencapaian SDG's

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Program Pendaftaran Penduduk Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Tujuan : Tersedianya	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 memiliki Penduduk sejumlah 237.724 Jiwa. Terdiri dari Laki-laki 120.602 Jiwa dan Perempuan 117.122 Jiwa. - Jumlah penduduk usia 17 Tahun ke atas atau sudah menikah berjumlah 171.011 jiwa, dan yang telah melakukan perekaman 163.446 orang (95,58%) - Jumlah penduduk dibawah 17 tahun dan /atau belum menikah 	Akses: Masih timpangnya pengarusutamaan gender menyangkut pelayanan terutama pada masyarakat yang jauh dari pusat pelayanan Manfaat : Meningkatnya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Partisipasi: <ul style="list-style-type: none"> - Sudah Dilakukan Pelayanan, namun belum menyentuh masyarakat yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan yang masih belum tepat sasaran karena SDM belum memahami apa yang menjadi prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya anggaran untuk melakukan pelayanan yang responsif gender - Dukungan dari pihak eksternal 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun KAK rencana kegiatan dan strategi dalam mencapai tujuan 	1. Melakukan Sosialisasi 2. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang 3. Meningkatkan kapasitas SDM	Meningkatnya pelayanan dan cakupan dokumen kependudukan	Out put <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya persentase cakupan KTP-el KIA Out come <ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya Pelayanan yang responsif gender

Dokumen Administrasi Kependudukan.	sejumlah 70.504 orang dan yang telah memiliki Kartu Identitas Anak 46.678 orang (66,21%)	jauh dari pusat pelayanan Kontrol:						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



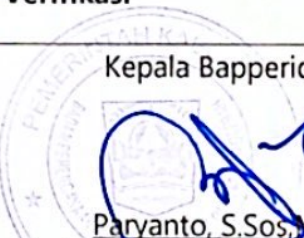
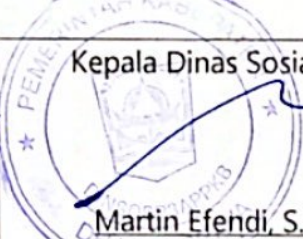
Pulau Punjung, Juni 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,
KABUPATEN DHARMASRAYA**



ABDI AMRI, SE
NIP. 19641231 198612 1 002

Tim Verifikasi

 Inspektur <u>Drs. Andy Sumanto, CFA</u> NIP 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD <u>Asri, AP. M.Si</u> NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida <u>Paryanto, S.Sos, M.T</u> NIP 19680609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial P3A PPKB <u>Martin Efendi, S. Hut. M. M</u> NIP. 19790905 200801 1 018
--	--	---	---

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN: 2024




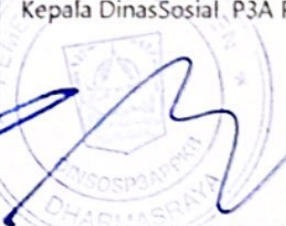
PROGRAM	Program Pendaftaran Penduduk		
KODE PROGRAM	2.12.02		
KEGIATAN	Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
HASIL/OUTPUT	Tersedianya Dokumen Administrasi Kependudukan.		
ANALISA SITUASI	<div>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</div> <div><div>- Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 memiliki Penduduk sejumlah 237.724 Jiwa. Terdiri dari Laki-laki 120.602 Jiwa dan Perempuan 117.122 Jiwa.</div><div>- Jumlah penduduk usia 17 Tahun ke atas atau sudah menikah berjumlah 171.011 jiwa, dan yang telah melakukan perekaman 163.446 orang (95,58%)</div><div>- Jumlah penduduk dibawah 17 tahun dan /atau belum menikah sejumlah 70.504 orang dan yang telah memiliki Kartu Identitas Anak 46.678 orang (66,21%)</div></div> <div>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</div> <div><div>a. Faktor Kesenjangan</div><div>Masih timpangnya pengarusutamaan gender menyangkut pelayanan terutama pada masyarakat yang jauh dari pusat pelayanan</div><div>b. Penyebab Internal</div><div><div>a) Pelayanan yang masih belum tepat sasaran karena SDM belum memahami apa yang menjadi prioritas</div><div>c. Penyebab Eksternal</div><div><div>A) Kurangnya anggaran untuk melakukan pelayanan yang responsif gender</div></div></div></div>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas	Melakukan Pelayanan jemput bola	
		Tujuan	Meningkatnya persentase cakupan KTP-el KIA
		Melengkapi sarana dan prasarana penunjang dlam pelaksanaan kegiatan pendataan	
		Tujuan	Meningkatnya persentase cakupan KTP-el KIA
	Total Anggaran	Rp. 40.091.250	
Capaian Program	<div>Out put</div> <div><div>- Meningkatkan persentase cakupan KTP-el dan KIA</div></div> <div>Out come</div> <div><div>- Terwujudnya Pelayanan yang responsif gender</div></div>		

Pulau Punjung, Juni 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,
KABUPATEN DHARMASRAYA,



Tim Verifikasi

 Inspektur Drs. Andri Sumanto, C.FrA NIP. 19681220.199009 1 001	 Kepala BKD ASRI AP, M.Si NIP. 19750225.199501 1 001	 Kepala Bapperida Paryanto, S.Sos.M.T NIP. 19690609.198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial, P3A PPKB MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905.200801 1 018
---	--	---	---


MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

OPD : DINAS KESEHATAN

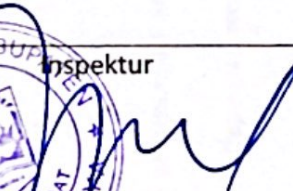

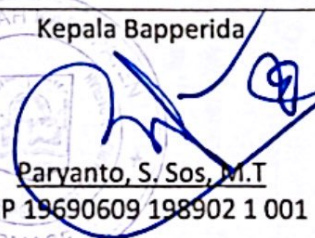

PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Masalah : Masih rendahnya kunjungan penderita hipertensi laki-laki 35,4% dari pada kunjungan penderita hipertensi perempuan 59,3% untuk cek kesehatan pengukuran tekanan darah satu kali sebulan	Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko dari kasus penyakit tidak menular yang terjadi akibat adanya peningkatan tekanan darah sistolik $\geq 140/90$ mmHg sehingga menyebabkan terjadinya angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) (Kemenkes RI, 2017) Data sasaran : Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun Total : 47.515 Laki-laki : 24.865 Perempuan : 22.650 Mendapat pelayanan kesehatan Laki-laki : 8.801 (35,4%) Perempuan : 13.425 (59,3%)	Akses : Masih ada jarak tempuh dari rumah penderita hipertensi jauh ke faskes Partisipasi : Masih rendahnya kesadaran laki-laki untuk melakukan cek kesehatan pengukuran tekanan darah minimal satu kali sebulan Kontrol : Masih kurangnya media promosi kesehatan di media cetak maupun elektronik tentang bahaya penyakit hipertensi Manfaat : Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat posbindu PTM	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat posbindu PTM Kurangnya promosi pelaksanaan kegiatan posbindu PTM pada masyarakat di wilayah setempat Kurangnya edukasi kepada penderita hipertensi terhadap perubahan gaya hidup sehat Kurangnya advokasi pada lintas sektor terhadap pelaksanaan posbindu PTM 	<ul style="list-style-type: none"> Pada saat siang hari laki-laki jarang di rumah karena berperan sebagai pemenuhan kebutuhan perekonomian keluarga Kurangnya pengetahuan keluarga terhadap bahaya penyakit hipertensi Masih kurangnya komitmen lintas sektor dan tokoh masyarakat dalam mendukung kegiatan posbindu PTM 	Meningkatkan kunjungan penderita hipertensi, laki-laki untuk melakukan pengukuran tekanan darah satu kali sebulan sebagaimana yang telah dilakukan oleh penderita hipertensi perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Mengupayakan peran lintas sector dan tokoh masyarakat dalam Kegiatan posbindu PTM di setiap Nagari Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat tentang manfaat dan pelaksanaan posbindu PTM Meningkatkan promosi kesehatan tentang bahaya penyakit hipertensi di medsos dan media cetak Tingkatkan edukasi kepada keluarga dan penderita hipertensi khusus laki-laki tentang pola hidup sehat, bahaya penyakit hipertensi dan kepatuhan minum obat hipertensi pada saat kunjungan rumah penderita hipertensi Tingkatkan kunjungan penderita hipertensi khususnya laki-laki dengan kegiatan posbindu PTM di masjid setelah sholat jum'at. 	Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun Total : 47.515 Laki-laki : 24.865 Perempuan : 22.650 Mendapat pelayanan kesehatan Laki-laki : 8.801 (35,4%) Perempuan : 13.425 (59,3%)	Output : Meningkatkan kunjungan penderita hipertensi laki-laki untuk melakukan cek kesehatan, pengukuran tekanan darah minimal satu kali sebulan Input : Tersedianya anggaran di Renja tahun 2025 sebanyak Rp.110.000.000,- Out Come : Pengawasan Penderita hipertensi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat menurunkan tingkat kematian yang disebabkan Penyakit Tidak Menular (PTM) hipertensi.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Tujuan : Meningkatkan peran serta penderita hipertensi , laki-laki untuk melakukan cek kesehatan pengukuran tekanan darah satu kali sebulan	-							

Pulaup Punjung, 26 Juni 2024
**Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Dharmasraya**

Hj. Yosta Defina, S.Farm, Apt, M.KM
NIP. 19690810 199102 2 001

Tim Verifikasi

 Inspektur Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD Asri AP, M. Si NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida Paryanto, S. Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial P3APKB Martin Efendi, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018
--	--	---	---

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

SKPD : DINAS KESEHATAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
KODE PROGRAM	1 02 02 2.02 0008
KEGIATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
HASIL/ OUTPUT	Meningkatkan kunjungan penderita hipertensi laki-laki untuk melakukan cek kesehatan, pengukuran tekanan darah minimal satu kali sebulan
ANALISA SITUASI	<p>Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <p>Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko dari kasus penyakit tidak menular yang terjadi akibat adanya peningkatan tekanan darah sistolik $\geq 140/90$ mmHg sehingga menyebabkan terjadinya angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) (Kemenkes RI,2017)</p> <p>Data sasaran :</p> <p>Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun</p> <p>Total : 47.515</p> <p>Laki-laki : 24.865</p> <p>Perempuan : 22.650</p> <p>Mendapat pelayanan kesehatan</p> <p>Laki-laki : 8.801 (35,4%)</p> <p>Perempuan : 13.425 (59,3%)</p>
	<p>Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses :</p> <p>Masih ada jarak tempuh dari rumah penderita hipertensi jauh ke faskes</p> <p>Partisipasi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Masih rendahnya kepedulian laki-laki terhadap kesehatan- Masih rendahnya kesadaran laki-laki untuk melakukan cek kesehatan pengukuran tekanan darah minimal satu kali sebulan <p>Kontrol :</p> <p>Masih kurangnya media promosi kesehatan di media cetak maupun elektronik tentang bahaya penyakit hipertensi</p> <p>Manfaat :</p> <p>Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat posbindu PTM</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none">- Kurangnya promosi pelaksanaan kegiatan posbindu PTM pada masyarakat di wilayah setempat- Kurangnya edukasi kepada penderita hipertensi terhadap perubahan gaya hidup sehat- Kurangnya advokasi pada lintas sektor terhadap pelaksanaan posbindu PTM <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none">- Pada saat siang hari laki-laki jarang di rumah karena berperan sebagai pemenuhan kebutuhan perekonomian keluarga- Kurangnya kepedulian keluarga terhadap bahaya penyakit hipertensi- Masih kurangnya komitmen lintas sektor dan tokoh masyarakat dalam mendukung kegiatan program posbindu PTM di nagari dan jorong

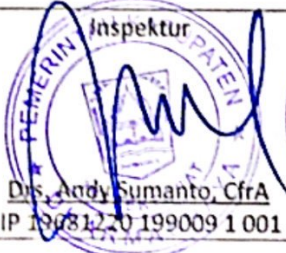

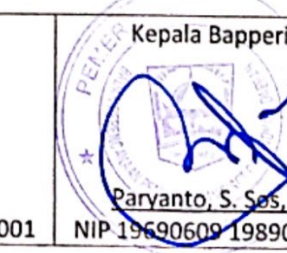
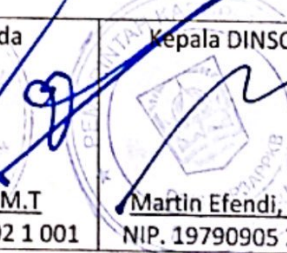
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengupayakan peran lintas sektor dan tokoh masyarakat dalam Kegiatan posbindu PTM di setiap Nagari - Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat tentang manfaat dan pelaksanaan posbindu PTM - Meningkatkan promosi kesehatan tentang bahaya penyakit hipertensi di medsos dan media cetak - Tingkatkan edukasi kepada keluarga dan penderita hipertensi khusus laki-laki tentang pola hidup sehat, bahaya penyakit hipertensi dan kepatuhan minum obat hipertensi pada saat kunjungan rumah penderita hipertensi - Tingkatkan kunjungan penderita hipertensi khususnya laki-laki dengan kegiatan posbindu PTM di masjid setelah sholat jum'at
		Alokasi Anggaran	Rp. 110.000.000,-
		Total Anggaran	Tersedianya anggaran di Renja tahun 2025 sebanyak Rp.110.000.000,-
	Capaian Program	<p>Out put Meningkatkan kunjungan penderita hipertensi laki-laki untuk melakukan cek kesehatan, pengukuran tekanan darah minimal satu kali sebulan</p> <p>Out come Pengawasan Penderita hipertensi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat menurunkan tingkat kematian yang di sebabkan Penyakit Tidak Menular (PTM) hipertensi.</p>	

Pulau Punjung, 26 Juni 2024

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Dharmasraya

Hj. Yosta Defina, S.Farm, Apt, M.KM
NIP. 19690810 199102 2 001

Tim Verifikasi

 Inspektur <u>Drs. Andy Sumanto, CfrA</u> NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD <u>Andi, AP, M. Si</u> NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida <u>Paryanto, S. Sos, M.T</u> NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala DINSOSP3APPKB <u>Martin Efendi, S. Hut. M. M</u> NIP. 19790905 200801 1 018
--	---	--	---

KERANGKA AJUAN KEGIATAN (KAK)

Trem Of Reference (TOR)

Program		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Sasaran Program		Penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun
Kegiatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Sub Kegiatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Latar Belakang	Dasar Hukum	1.Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan PTM 2.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2019 Tentang Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM (Standar Pelayanan Minimal)
	Gambaran Umum	Meningkatkan kunjungan penderita hipertensi
Kegiatan	Uraian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan sosialisasi tentang manfaat dan pelaksanaan posbindu PTM- Meningkatkan promosi dan mengupayakan peran lintas sector dan tokoh masyarakat dalam Kegiatan posbindu PTM di setiap Nagari dan Jorong- Tingkatkan edukasi kepada keluarga dan penderita hypertensi khusus laki-laki tentang pola hidup sehat ,bahaya penyakit hipertensi dan kepatuhan minum obat hipertensi pada saat kunjungan rumah penderita hipertensi- Tingkatkan kunjungan penderita hipertensi khususnya laki-laki dengan kegiatan posbindu PTM di masjid setelah sholat jum'at
	Indikator Kinerja	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
	Batasan Kegiatan	Meningkatkan peran serta penderita hipertensi , laki-laki untuk melakukan cek kesehatan pengukuran tekanan darah satu kali sebulan
Maksud dan Tujuan		Meningkatkan kunjungan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Sosialisasi pelaksanaan kegiatan posbindu PTM, Promosi kesehatan, Advokasi
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Posbindu PTM di setiap Nagari di wilayah setempat
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Kabid.Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelola program PTM
Jadwal		Bulan Januari. s/d Desember 2025.
Biaya		Rp. 110.000.000,-

Pulau Punjung, 26 Juni 2024

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Dharmasraya



Hj. Yosta Defina, S.Farm, Apt, M.KM

NIP. 19690810 199102 2 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

OPD : DINAS KESEHATAN

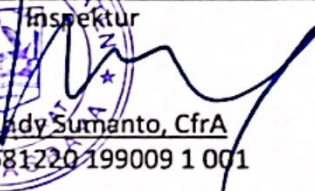

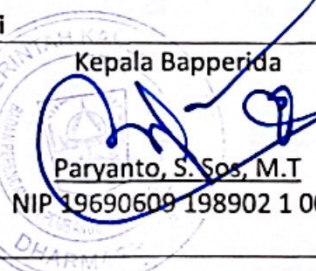
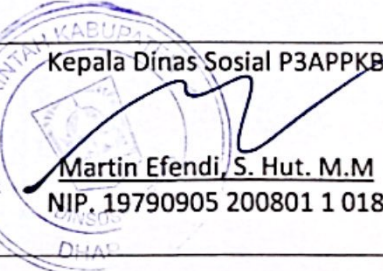
PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada usia lanjut Masalah : Kurang kunjungan lansia laki-laki ke posyandu lansia Tujuan : Meningkatkan kunjungan lansia laki-laki ke posyandu lansia untuk cek kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan lansia baik secara fisik maupun mental agar dimasa tua bahagia dan berdaya guna dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. hal tersebut upaya yang dilakukan adalah kegiatan promotif dan preventif yaitu cek kesehatan berkala melalui posyandu lansia, di Kabupaten Dharmasraya ada 197 posyandu lansia Jumlah Sasaran Jumlah lansia sebanyak 68.241 orang terdiri dari Laki-laki 35.744 orang dan Perempuan 32.497 orang dibagi atas tiga kelompok yaitu : Pra-lansia 39.494 orang LK : 20.666 orang PR : 18.828 orang Lansia 21.239 orang LK : 11.069 orang PR : 10.170 orang	Akses : Masih ada jarak tempuh dari rumah lansia jauh ke posyandu lansia Partisipasi : Masih rendahnya kesadaran lansia laki-laki untuk melakukan cek kesehatan ke posyandu lansia Kontrol : Masih kurangnya komitmen lintas sector terkait dan tokoh masyarakat dalam mendukung program kesehatan lansia Manfaat : Kegiatan program menonon sehingga dapat menimbulkan kurang minat para kaum laki-laki untuk melakukan cek kesehatan karena pelayanan di posyandu	<ul style="list-style-type: none"> Menghindari kegiatan menonon perlu dilakukan kegiatan berinovasi untuk meningkatkan kunjungan lansia laki-laki ke posyandu Kurang memadainya sarana dan prasarana di lapangan sehingga pelayanan kesehatan di posyandu lansia belum maksimal Masih kurangnya kerjasama dan advokasi pada lintas sektor terhadap pelaksanaan posyandu lansia 	<ul style="list-style-type: none"> Masih ada keluarga melibatkan lansia laki-laki ikut berperan sebagai pemenuhan ekonomi keluarga sehingga pada saat siang hari lansia laki-laki jarang di rumah Masih rendahnya peran serta keluarga lansia laki-laki untuk membawa lansia ke posyandu lansia Kurangnya keterlibatan tokoh masyarakat pada saat kegiatan posyandu lansia 	Meningkatkan kunjungan lansia laki-laki ke posyandu lansia untuk cek kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan advokasi pada lintas sector tentang pengadaan sarana dan prasarana di posyandu lansia di setiap jorong Ciptakan inovasi yang menarik dalam melakukan kegiatan di posyandu lansia sehingga kunjungan lansia laki-laki meningkat Menyesuaikan jadwal posyandu lansia dengan aktifitas lansia laki-laki Memberikan motivasi pada keluarga lansia laki-laki agar berperan aktif dalam pelaksanaan posyandu lansia pada saat kunjungan rumah 	Jumlah kunjungan lansia di tahun 2023 yaitu : Kunjungan Pra-lansia (45-59 Th) LK : 9.948 orang PR : 12.314 orang Lansia (60-69 Th) LK : 5.150 orang PR : 6.451 orang Lansia Resti > 70 Th LK : 2.909 orang PR : 3.002 orang	Output : Meningkatnya kunjungan lansia laki-laki ke posyandu lansia untuk cek kesehatan Input : Tersedianya anggaran di Renja tahun 2025 sebanyak Rp.100.000.000,- Out Come : Meningkatnya derjat kesehatan lansia baik secara fisik maupun mental agar dimasa tua bahagia dan berdaya guna dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
	Lansia Resti 7.508 orang LK : 4.009 orang PR : 3.499 orang Jumlah kunjungan lansia di tahun 2023 yaitu : Kunjungan Pra-lansia (45-59 Th) LK : 9.948 orang PR : 12.314 orang Lansia (60-69 Th) LK : 5.150 orang PR : 6.451 orang Lansia Resti > 70 Th LK : 2.909 orang PR : 3.002 orang	hanya periksa pengukuran tensi saja dan cek gula darah tanpa diberi obat						

Pulau Punjung, 26 Juni 2024
 Plt. Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Dharmasraya

Hj. Yosta Defina, S.Farm, Apt, M.KM
 NIP. 19690810 199102 2 001

Tim Verifikasi			
 <u>Drs. Andy Sumanto, CfrA</u> NIP. 19681220 199009 1 001	 <u>Asril, AP, M. Si</u> NIP. 19750225 199501 1 001	 <u>Paryanto, S. Sos, M.T</u> NIP. 19690609 198902 1 001	 <u>Martin Efendi, S. Hut. M.M</u> NIP. 19790905 200801 1 018

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

SKPD : DINAS KESEHATAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
KODE PROGRAM	1 02 02 2.02 0007
KEGIATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
HASIL/ OUTPUT	Meningkatnya kunjungan lansia laki-laki ke posyandu lansia untuk cek kesehatan
ANALISA SITUASI	<p>Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <p>Meningkatkan derjat kesehatan lansia baik secara fisik maupun mental agar dimasa tua bahagia dan berdaya guna dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. hal tersebut upaya yang dilakukan adalah kegiatan promotif dan preventif yaitu cek kesehatan berkala melalui posyandu lansia, di Kabupaten Dharmasraya ada 197 posyandu lansia.</p> <p>Jumlah Sasaran</p> <p>Jumlah lansia sebanyak 68.241 orang terdiri dari Laki-laki 35.744 orang dan Perempuan 32.497 orang dibagi atas tiga kelompok yaitu :</p> <p>Pra-lansia 39.494 orang LK : 20.666 orang PR : 18.828 orang Lansia 21.239 orang LK : 11.069 orang PR : 10.170 orang Lansia Resti 7.508 orang LK : 4.009 orang PR : 3.499 orang</p> <p>Jumlah kunjungan lansia di tahun 2023 yaitu :</p> <p>Kunjungan Pra-lansia (45-59 Th) LK : 9.948 orang PR : 12.314 orang Lansia (60-69 Th) LK : 5.150 orang PR : 6.451 orang Lansia Resti > 70 Th LK : 2.909 orang PR : 3.002 orang</p> <p>Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses : Masih ada jarak tempuh dari rumah lansia jauh ke posyandu lansia</p> <p>Partisipasi : Masih rendahnya kesadaran lansia laki-laki untuk melakukan cek kesehatan ke posyandu lansia</p> <p>Kontrol : Masih kurangnya komitmen lintas sektor terkait dan tokoh masyarakat dalam mendukung program kesehatan</p> <p>Manfaat : Kegiatan program monoton sehingga dapat menimbulkan kurang minat para kaum laki-laki untuk melakukan cek kesehatan karena pelayanan di posyandu hanya diperiksa pengukuran tensi saja dan cek gula darah tanpa diberi obat</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none">• Menghindari kegiatan monoton perlu dilakukan kegiatan berinovasi untuk meningkatkan kunjungan lansia laki-laki ke posyandu lansia untuk cek kesehatan

	<ul style="list-style-type: none"> •kurang memadainya sarana dan prasarana di lapangan sehingga pelayanan kesehatan di posyandu lansia belum maksimal •Masih kurangnya kerjasama dan advokasi pada lintas sektor terhadap pelaksanaan posyandu lansia <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> •Masih ada keluarga melibatkan lansia laki-laki ikut berperan sebagai pemenuhan ekonomi keluarga sehingga pada saat siang hari lansia laki-laki jarang di rumah •Masih rendahnya peran serta keluarga lansia laki-laki untuk membawa lansia ke posyandu lansia •Kuranganya keterlibatan tokoh masyarakat pada saat kegiatan posyandu lansia 		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan advokasi pada lintas sector tentang pengadaan sarana dan prasarana di posyandu lansia di setiap jorong • Ciptakan inovasi yang menarik dalam melakukan kegiatan di posyandu lansia sehingga kunjungan lansia laki-laki meningkat • Menyesuaikan jadwal posyandu lansia dengan aktifitas lansia laki-laki • Memberikan motivasi pada keluarga lansia laki-laki agar berperan aktif dalam pelaksanaan posyandu lansia
		Alokasi Anggaran	Rp. 100.000.000,-
		Total Anggaran	Tersedianya anggaran di Renja tahun 2025 sebanyak Rp.100.000.000,-
	<p>Capaian Program</p> <p>Out put Meningkatnya kunjungan lansia laki-laki ke posyandu lansia untuk cek kesehatan</p> <p>Out come Meningkatnya derjat kesehatan lansia baik secara fisik maupun mental agar dimasa tua bahagia dan berdaya guna dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.</p>		

Pulau Punjung, 26 Juni 2024

**Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Dharmasraya**



Hj. Yosta Deline, S.Farm, Apt, M.KM
NIP. 19690810 199102 2 001

Tim Verifikasi

 Inspektur Drs. Andy Sumananto, CfrA NIP 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD Airil, AP, M. Si NIP 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida Paryanto, S. Sos, M.T NIP 19690609 198902 1 001	 Kepala DINSQSP3APPKB Martin Efendi, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018
--	--	---	--

KERANGKA AJUAN KEGIATAN (KAK)

Trem Of Reference (TOR)

Program		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Sasaran Program		Pada Usia Lanjut
Kegiatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Sub Kegiatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2019 Tentang Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM (Standar Pelayanan Minimal)
	Gambaran Umum	Meningkatkan kunjungan lansia untuk cek kesehatan
Kegiatan	Uraian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan advokasi pada lintas sector tentang pengadaan sarana dan prasarana di posyandu lansia di setiap jorong• Ciptakan inovasi yang menarik dalam melakukan kegiatan di posyandu lansia sehingga kunjungan lansia laki-laki meningkat• Menyesuaikan jadwal posyandu lansia dengan aktifitas lansia laki-laki• Memberikan motivasi pada keluarga lansia laki-laki agar berperan aktif dalam pelaksanaan posyandu lansia pada saat kunjungan rumah
	Indikator Kinerja	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
	Batasan Kegiatan	Meningkatkan kunjungan lansia laki-laki ke posyandu lansia untuk cek kesehatan
Maksud dan Tujuan		Meningkatkan kunjungan pelayanan kesehatan pada lansia laki-laki ke posyandu lansia untuk cek kesehatan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Advokasi ke lintas sector, Berinovasi dalam melakukan kegiatan,
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Fasyankes dan Posyandu lansia di setiap Nagari di wilayah setempat
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Kabid.Kesehatan Masyarakat dan Pengelola lansia
Jadwal		Bulan Januari. s/d Desember 2025.
Biaya		Rp. 100.000.000,-

Pulau Punjung, 26 Juni 2024

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Dharmasraya



Hj. Yosta Defina S.Farm, Apt, M.KM
NIP. 19690810 199102 2 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD
PROGRAM

: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya
: Program Informasi dan Komunikasi Publik

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Gender
Program : Program Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik Tujuan : Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.	Keterbukaan untuk memperoleh informasi sesuai dengan tuntutan perkembangan di era saat ini. Disahkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, sejalan dengan satu pilar informasi, yaitu Transparansi menuju <i>Clean Government</i> dan <i>Good Governance</i> . Keterbukaan informasi public ini juga menjadi target IKU dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik diharapkan informasi pembangunan dapat diakses untuk seluruh masyarakat termasuk ibu, anak dan lansia.	Akses: - Akses informasi untuk ibu, anak dan lansia yang lebih banyak di rumah masih terbatas Partisipasi: - Kurangnya minat masyarakat terutama ibu, anak dan lansia untuk mengakses informasi Kontrol: - Belum adanya kontrol untuk mengetahui fasilitas yang sama untuk pria, wanita, anak dan lansia Manfaat : - Perempuan, anak dan lansia tidak responsive terhadap Informasi terutama dalam perkembangan Pembangunan.	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama ibu, anak, dan lansia mengenai pentingnya informasi publik tentang berbagai kegiatan pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Kurangnya Keinginan Masyarakat Terutama Ibu, anak dan lansia untuk mengakses informasi public.	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi termasuk bapak, ibu, anak dan lansia.	- Melakukan sosialisasi kepada Nagari agar dapat menyampaikan bagi Jorong untuk memberikan informasi pembangunan secara sambung menyambung antar warga - Memperbanyak kegiatan pembangunan melalui media spanduk yang diletakkan di setiap jorong.	Keterbukaan untuk memperoleh informasi sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi public. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi public memperbanyak informasi di masyarakat agar dapat diakses oleh ibu, anak dan lansia.	Input : - Jumlah media internal (majalah, kalender, baliho, spanduk) yang informative bagi bapak, ibu, anak dan lansia Output: - Adanya penyampaian informasi pembangunan seluruh masyarakat Dharmasraya termasuk Ibu, anak, dan lansia Outcome : - Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi pembangunan termasuk ibu, anak dan lansia

Pulau Pinang, 25 Juni 2024

Kepala Dinas

Drs. ROVANY ABDAMS, M.Si

NIP. 19690829 199009 1 001

TIM VERIFIKASI

INSPEKTUR

Drs. ANDY SUMANTO, CfrA
NIP. 19681220 199009 1 001

KEPALA BKD

ASRIL AP., M.Si
NIP. 19690609 198902 1 001

KEPALA BAPPERIDA

PARYANTO, S.Sos, M.T
NIP. 19690609 198902 1 001

KEPALA DINAS SOSIAL, P3A, PPKB

MARTIN EFENDI, S.Hut. MM
NIP. 19790905 200801 1 018

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya
PROGRAM : Program Informasi dan Komunikasi Publik

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu gender			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Gender
Program : Program Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Relasi Media Tujuan : Meningkatnya Kerjasama Media Nasional dan Lokal	Kegiatan ini merupakan peningkatan informasi public yang dilakukan secara eksternal melalui kerjasama media, yang dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, sejalan dengan satu pilar informasi, yaitu Transparansi menuju <i>Clean Government</i> dan <i>Good Governance</i> . Keterbukaan informasi public ini juga menjadi target IKU dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik diharapkan informasi pembangunan dapat diakses untuk seluruh masyarakat termasuk ibu, anak dan lansia.	Akses: Jumlah media perempuan atau media khusus anak yang mengajukan kerjasama sangat sedikit, hanya 1 media (Narasi). Partisipasi: Wartawati yang meliputi kegiatan pembangunan yang memahami gender sangat kurang (\pm 10 orang) Kontrol: Tidak ada masalah (fasilitas yang sama diberikan untuk wartawati dan media khusus perempuan (Narasi)) Manfaat : Perempuan, anak dan lansia Dharmasraya tidak responsive terhadap Informasi perkembangan Pembangunan.	Belum ada sosialisasi kepada media untuk lebih banyak mengirimkan wartawan dalam peliputan kegiatan pembangunan yang memahami gender	- Jumlah media khusus perempuan atau media khusus anak yang mengajukan kerjasama sangat sedikit, hanya 1 media (Narasi). - Jumlah wartawati (4 orang) yang meliputi kegiatan pembangunan dan belum memahami gender	Meningkatkan Kerjasama Media Nasional dan Lokal untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik yang berkualitas termasuk bapak, ibu, anak dan lansia.	Mengajukan kerjasama dengan Dinas Sosial, P3APPKB untuk melakukan sosialisasi gender kepada media	Keterbukaan untuk memperoleh informasi sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana diharapkan adanya peningkatan jumlah wartawan yang memahami gender dan dapat memberikan informasi pembangunan yang setara bagi bapak, ibu, anak dan lansia.	Input : - Jumlah wartawan yang memahami kesetaraan gender bagi bapak, ibu, anak dan lansia Output: - Jumlah kerjasama media nasional dan local yang memberikan informasi kesetaraan gender Outcome : - Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi pembangunan termasuk ibu, anak dan lansia

Pulau Punung, 25 Juni 2024

Kepala Dinas

Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si
NIP. 19690819 199009 1 001

TIM VERIFIKASI

INSPEKTUR

Drs. ANDY SUMANTO, Cfra
NIP. 19681220 199009 1 001

KEPALA BKD

ASRIL AP., M.Si
NIP. 19690609 198902 1 001

KEPALA BAPPEDA

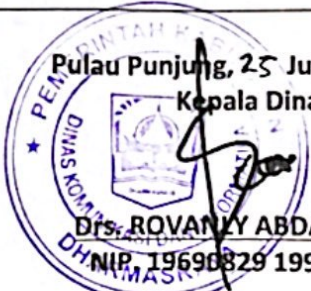
PARYANTO, S.Sos, M.T
NIP. 19690609 198902 1 001

KEPALA DINAS SOSIAL, P3A, PPKB

MARTIN EFENDI, S.Hut. MM
NIP. 19790905 200801 1 018

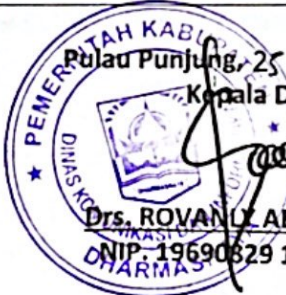
FORM KAK/TOR

Program	Informasi dan Komunikasi Publik	
Sasaran Program	Masyarakat	
Kegiatan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Sub Kegiatan	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
	Gambaran Umum	Untuk menyampaikan Informasi Pembangunan Kepada seluruh Masyarakat Dharmasraya, agar seluruh masyarakat memperoleh Informasi pembangunan termasuk ibu, anak dan lansia.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepada Nagari untuk pembentukan jaring-jaring informasi tingkat nagari - Pengadaan Informasi kegiatan pembangunan melalui media Baliho dan spanduk setiap Jorong.
	Indikator Kinerja	Jumlah Media Internal (Vidiotron, Majalah, kelender, baliho, spanduk) yang Informatif
	Batasan Kegiatan	Masyarakat Dharmasraya
Maksud dan Tujuan	Untuk menyampaikan Informasi Pembangunan Kepada seluruh Masyarakat Dharmasraya	
Cara Pelaksanaan	Membentuk jaring-jaring informasi Pembangunan di tingkat nagari	
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten Dharmasraya	
Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Kegiatan	Pelaksana : PPTK sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
Jadwal	Januari s/d Desember 2024	
Biaya	350.000.000,-	


 Pulau Punjung, 25 Juni 2024
 Kepala Dinas
Drs. ROVANY ABDAMS, M.Si
 NIP. 19690829 199009 1 001

FORM KAK/TOR

Program	Informasi dan Komunikasi Publik	
Sasaran Program	Wartawati	
Kegiatan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Sub Kegiatan	Relasi Media	
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
	Gambaran Umum	Media Khusus Perempuan/anak yang mengajukan kerja sama sangat sedikit dan wartawati yang meliput pembangunan belum memahami gender
Kegiatan	Uraian Kegiatan	- Sosialisasi Gender kepada Media (kerjasama dengan Dinas Sosial, P3APKB)
	Indikator Kinerja	Jumlah wartawati yang memahami Kesetaraan Gender
	Batasan Kegiatan	Wartawati
Maksud dan Tujuan	Untuk memberikan pemahaman kepada wartawati tentang kesetaraan gender	
Cara Pelaksanaan	Memberikan sosialisasi kepada wartawati tentang kesetaraan gender	
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten Dharmasraya	
Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Kegiatan	Pelaksana : PPTK sub Kegiatan Relasi Media Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
Jadwal	Januari s/d Desember 2024	
Biaya	475.797.813,-	



 Pulau Punjung, 25 Juni 2024
 Kepala Dinas
Drs. ROVANU ABDAMS, M.Si
 NIP. 19690629 199009 1 001

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

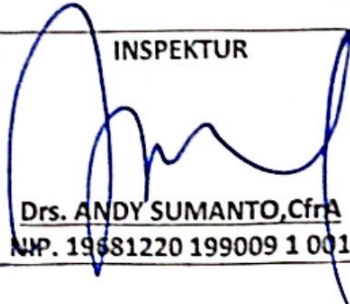


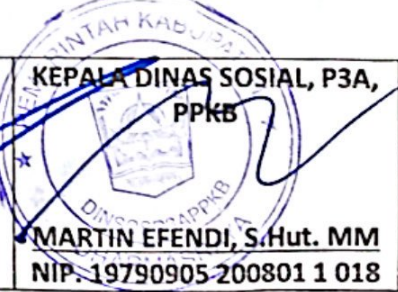
SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Informasi dan Komunikasi Publik
KEGIATAN	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	Relasi Media
KODE PROGRAM	2.16.02
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <p>Kegiatan ini merupakan peningkatan informasi public yang dilakukan secara eksternal melalui kerjasama media, yang dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, sejalan dengan satu pilar informasi, yaitu Transparansi menuju <i>Clean Government</i> dan <i>Good Governance</i>. Keterbukaan informasi public ini juga menjadi target IKU dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik diharapkan informasi pembangunan dapat diakses untuk seluruh masyarakat termasuk ibu, anak dan lansia.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah media perempuan atau media khusus anak yang mengajukan kerjasama sangat sedikit, hanya 1 media (Narasi). <p>Partisipasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wartawati yang meliput kegiatan pembangunan yang memahami gender sangat kurang (+ 10 orang) <p>Kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada masalah (fasilitas yang sama diberikan untuk wartawati dan media khusus perempuan (Narasi)) <p>Manfaat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perempuan, anak dan lansia Dharmasraya tidak responsive terhadap Informasi perkembangan Pembangunan. <p>b. Penyebab Kesenjangan Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada sosialisasi kepada media untuk lebih banyak mengirimkan wartawan dalam peliputan kegiatan pembangunan yang memahami gender <p>c. Penyebab Kesenjangan Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah media khusus perempuan atau media khusus anak yang mengajukan kerjasama sangat sedikit, hanya 1 media (Narasi). - Jumlah wartawati (4 orang) yang meliput kegiatan pembangunan dan belum memahami gender
CAPAIAN PROGRAM	<p>d. Tolak Ukur</p> <p>Jumlah Dana Rp. 475.797.813,-</p> <p>e. Indikator dan Target Kinerja</p>

	<u>Input :</u> - Jumlah wartawan yang memahami kesetaraan gender bagi bapak, ibu, anak dan lansia <u>Output:</u> - Jumlah kerjasama media nasional dan local yang memberikan informasi kesetaraan gender <u>Outcome :</u> - Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi pembangunan termasuk ibu, anak dan lansia	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	475.797.813,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tuju Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah) khusus untuk pelaksanaan kerjasama media dan proses kerja samanya	
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Sosialisasi gender kepada media (kerjasama dengan Dinas Sosial, P3APPKB)
		Masukan Rp. 0,00,- (dana melalui Dinas Sos, P3A, PPKB)
		Keluaran Jumlah wartawan yang memahami gender
		Hasil Tersebarnya Informasi Kegiatan Pembangunan di Masyarakat


 Pulau Pinjung, 25 Juni 2024
 Kepala Dinas
Drs. ROVANY ABDAMS, M.Si
 NIP. 19690829 199009 1 001

VERIFIKASI KEGIATAN			
INSPEKTUR	KEPALA BKD	KEPALA BAPPERIDA	KEPALA DINAS SOSIAL, P3A, PPKB
 <u>Drs. ANDY SUMANTO, CfrA</u> NIP. 19681220 199009 1 001	 <u>ASRIL AP., M.Si</u> NIP. 19690609 198902 1 001	 <u>PARYANTO, S.Sos, M.T</u> NIP. 19690609 198902 1 001	 <u>MARTIN EFENDI, S.Hut. MM</u> NIP. 19790905 200801 1 018

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya





TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Informasi dan Komunikasi Publik
KEGIATAN	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
KODE PROGRAM	2.16.02
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <p>Keterbukaan untuk memperoleh informasi sesuai dengan tuntutan perkembangan di era saat ini. Disahkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, sejalan dengan satu pilar informasi, yaitu Transparansi menuju <i>Clean Government</i> dan <i>Good Governance</i>. Keterbukaan informasi public ini juga menjadi target IKU dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik diharapkan informasi pembangunan dapat diakses untuk seluruh masyarakat termasuk ibu, anak dan lansia.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses informasi untuk ibu, anak dan lansia yang lebih banyak di rumah masih terbatas <p>Partisipasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya minat masyarakat terutama ibu, anak dan lansia untuk mengakses informasi <p>Kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya kontrol untuk mengetahui fasilitas yang sama untuk pria, wanita, anak dan lansia <p>Manfaat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perempuan, anak dan lansia tidak responsive terhadap Informasi terutama dalam perkembangan Pembangunan. <p>b. Penyebab Kesenjangan Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama ibu, anak, dan lansia mengenai pentingnya informasi publik tentang berbagai kegiatan pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. <p>c. Penyebab Kesenjangan Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Keinginan Masyarakat Terutama Ibu, anak dan lansia untuk mengakses informasi public.
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolak Ukur</p> <p>Jumlah Dana Rp. 750.000.000,-</p> <p>2. Indikator dan Target Kinerja</p> <p>Input :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah media internal (vidiotron, majalah, kalender, baliho, spanduk) yang informative bagi bapak, ibu, anak

	dan lansia
	Output: - Adanya penyampaian informasi pembangunan seluruh masyarakat Dharma Raya termasuk Ibu, anak, dan lansia Outcome : - Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi pembangunan termasuk ibu, anak dan lansia
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
RENCANA AKSI	Kegiatan 1 Sosialisasi kepada Nagari untuk membentuk jaring-jaring informasi pembangunan di tingkat Nagari Masukan Rp. 50.000.000,- Keluaran Terlaksananya sosialisasi pembentukan jaring-jaring informasi pembangunan kepada Nagari se-Kabupaten Dharma Raya Hasil Tersebarnya Informasi Kegiatan Pembangunan di Masyarakat
	Kegiatan 2 Pengadaan informasi kegiatan pembangunan melalui media baliho dan spanduk di setiap jorong Masukan Rp. 300.000.000,- Keluaran Pemasangan spanduk kegiatan informasi pembangunan selama 1 tahun Hasil Tersebarnya Informasi Kegiatan Pembangunan di Masyarakat


 Pulau Pinang, 25 Juni 2024
 Kepala Dinas
Drs. ROVANY ABDAMS, M.Si
 NIP. 19690829 199009 1 001

VERIFIKASI KEGIATAN

 INSPEKTUR <u>Drs. ANDY SUMANTO, CfrA</u> NIP. 19681220 199009 1 001	 KEPALA BKD <u>ASRI AP., M.Si</u> NIP. 19690603 198902 1 001	 KEPALA BAPPERIDA <u>PARYANTO, S.Sos, M.T</u> NIP. 19690609 198902 1 001	 KEPALA DINAS SOSIAL, P3A, PPKB <u>MARTIN EFENDI, S.Hut. MM</u> NIP. 19790905 200801 1 018
--	---	--	---

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Kesenjangan Gender antara Laki – Laki dan Perempuan

OPD : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan

PROGRAM : Perencanaan dan Pembangunan Industri

IKU DAERAH dan SKPD

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
Kebijakan : Peningkatan diversifikasi produk kerajinan Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri Kegiatan : Penyusunan	Jumlah pelaku IKM lebih di dominasi oleh kaum perempuan. Maka dengan adanya kegiatan pelatihan ini dapat memberikan pencerahan bahwasanya laki – laki juga bisaberperan sama halnya dengan	Akses: Kurangnya informasi tentang persamaan kesempatan dalam berusaha Partisipasi: Kurangnya partisipasi laki – laki yang menjadi pelaku IKM	Kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang persamaan kesempatan dalam berusaha.	1. Pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa hanya perempuan yang cocok menjadi pelaku IKM 2. Kurangnya koordinasi dengan pemerintah di kecamatan dan nagari	Meningkatkan jumlah pelaku IKM yang laki – laki sehingga perekonomian masyarakat juga semakin meningkat	1. Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 untuk kegiatan tersebut. 2. Melakukan sosialisasi tentang kesetaraan hak dalam berusaha. 2. Mengadakan pelatihan tentang diversifikasi produk dan packaging dan Pengadaan leaflet, brosur yang menyampaikan persamaan kesempatan dalam berusaha.	Jumlah pelaku IKM keseluruhan :2633 Jumlah pelaku IKM laki laki : 790 Jumlah pelaku IKM perempuan : 1843	Meningkatnya jumlah pelaku IKM yang laki – laki. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
<p>penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industry Kabupaten / Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri</p>	<p>perempuan dalam dunia usaha khususnya industry rumah tangga</p> <p>Jumlah IKM Seluruhnya : 2633 orang</p> <p>Jumlah IKM Perempuan : 1843 (70 %) orang</p> <p>Jumlah IKM Laki – Laki : 790 orang (30 %)</p>	<p>Control:</p> <p>Kurangnya sosialisasi tentang persamaan kesempatan dalm berusaha</p> <p>Manfaat :</p> <p>Hilangnya kesenjangan dalam kesempatan berusaha</p>						

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
Tujuan : Meningkatnya pengetahuan pelaku IKM dalam diversifikasi produk dan packaging.								

Pulau Panglima, 24 Juni 2024



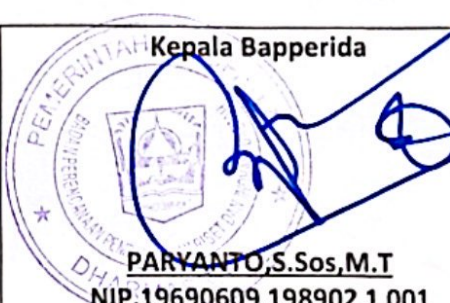

Kepala Dinas

NOFRIADI RONI PUSKA, ST, MT

Pembina Tekn / IV.b

NIP. 19801115 200501 1 013

TIM VERIFIKASI,

 Inspektur Drs. ANDY-SUMANTO, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001	 KEPALA BKD ASRIL, AP, M.Si NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut, MM NIP. 19790905 200801 1 018
---	---	--	--

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Perencanaan dan Pembangunan Industri
KEGIATAN	Penyusunan penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten / Kota
KODE KEGIATAN	3 31 02 2.01
HASIL / OUTPUT	Meningkatnya jumlah pelaku IKM yang laki – laki. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Jumlah pelaku IKM lebih di dominasi oleh kaum perempuan. Maka dengan adanya kegiatan pelatihan ini dapat memberikan pencerahan bahwasanya laki – laki juga bias berperan sama halnya dengan perempuan dalam dunia usaha khususnya industri rumah tangga Jumlah IKM Seluruhnya : 2633 orang Jumlah IKM Perempuan : 1843 (70 %) Jumlah IKM Laki – Laki : 790 orang (30 %)</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Akses: Kurangnya informasi tentang persamaan kesempatan dalam berusaha Partisipasi: Kurangnya partisipasi laki – laki yang menjadi pelaku IKM Control: Kurangnya sosialisasi tentang persamaan kesempatan dalam berusaha Manfaat : Hilangnya kesenjangan dalam kesempatan berusaha</p> <p>b. Penyebab Internal Kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang persamaan kesempatan dalam berusaha.</p> <p>c. Penyebab Eksternal 1. Pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa hanya perempuan yang cocok menjadi pelaku IKM 2. Kurangnya koordinasi dengan pemerintah di kecamatan dan nagari</p>
RENCANA AKSI	<p>Komponen / Aktifitas 1 Melakukan sosialisasi tentang kesetaraan hak dalam berusaha. Tujuan : Menyampaikan tentang persamaan hak dalam menentukan usaha dan tidak ada perbedaan kesetaraan gender dalam hal tersebut.</p> <p>Komponen / Aktifitas 2. Mengadakan pelatihan bagi IKM dalam difersifikasi produk dan packaging dan Pengadaan leaflet, brosur yang menyampaikan persamaan kesempatan dalam berusaha. Tujuan : Melatih IKM dalam hal difersifikasi produk dan packaging.</p>
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolak Ukur Jumlah Dana sebesar Rp. 350.000.000,00</p> <p>2. Indikator dan Target Kinerja <u>Input :</u> - Pengusulan dana untuk mengangkat kegiatan tersebut sebesar Rp. 350.000.000,00</p>

	Output: - Hasilnya terciptanya para pelaku IKM muda sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat		
	Outcome : - Perekonomian masyarakat jauh lebih maju dan meningkat, sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahtera lagi.		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 untuk Kegiatan Pelatihan disefikasi produk dan packaging	
		Masukan	Rp. 350.000.000,00
		Keluaran	Kegiatan Pelatihan disefikasi produk dan packaging
		Hasil	Terciptanya para pelaku IKM muda sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat.

Pulau-Pinang, 26 Juni 2024

Kepala Dinas,



NOFRIADI RONI PUSKA, ST, MT

Pembina Tek. I / IV b

NIP. 19801115 200501 1 013

VERIFIKASI KEGIATAN

 Inspektur Drs. ANDY SUMANTO, CfrA NIP.196812201990091001	 KEPALA BKD ASRIL, AP, M.Si NIP.19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida PARYANTO, S.Sos, M.T NIP.196906091989021001	 Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut, MM NIP.19790905 200801 1 018
---	---	---	--

FORM KAK/ TOR

Program		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Sasaran Program		Meningkatnya perencanaan dan pembangunan industry
Kegiatan		Penyusunan penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industry Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan		Koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Perindustrian No 110/M.IND/Per/12/2015 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota 2. Perda Kabupaten Dharmasraya no.6 Th 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2019 – 2039
	Gambaran Umum	Kegiatan Pelatihan dan sosialisasi ini di peruntukkan bagi IKM yang berada dibawah binaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelatihan dan sosialisasi ini direncanakan akan diikuti oleh 100 IKM
	Indikator Kinerja	Terlatihnya IKM dalam difersifikasi produk dan packaging
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Melatih IKM laki – laki dan perempuan untuk peningkatan omzet dan meningkatkan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Mengundang 100 IKM dan mendatangkan narasumber yang relevan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Hotel Jakarta Indah
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Bidang Perindustrian Penanggung Jawab : Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 350.000.000,-

Pulau Pinang, 26 Juni 2024

Kepala Dinas,

NOFRIADI RONI PUSKA, ST, MT
Pembina Tk I / IV.b
NIP. 19801115 200501 1 013

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat (Service delivery)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dilaksanakan setiap tahunnya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim; Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 yang akan diusulkan terdiri atas Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Pulau Punjung	Akses: Masih kurangnya responsif gender dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Partisipasi: Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim belum merasa penting oleh laki-laki Manfaat : Meningkatnya pemahaman pengarusutamaan gender dalam kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender Kurangnya pemahaman aman dan komitmen dari pihak terkait tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Kurangnya Pemahaman SDM tentang Pengarusutamaan Gender 	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya alokasi dana terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Koordinasi lintas sector yang masi belum optimal 	Bertambah jumlah kelompok peran serta masyarakat yang setara antara laki-laki dan perempuan (responsif gender) dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1. Sosialisasi dan Edukasi tentang Program Kampung Iklim yang responsive gender 2. Pembinaan kelompok yang melakukan upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani) 3. Pemberian Penghargaan terhadap Nagari yang telah menerapkan program kampung iklim	Meningkatnya Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim sertameningkany aperlompok laki-laki dari 0% menjadi 30-40%	Out put Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector lingkungan hidup yang dilaksanakan Out come Terbentuknya Kampung Iklim baru

Tujuan : Pembentukan Kampung Iklim sehingga	Kelompok Teknis Pelaksana Kampung Iklim di tingkat tapak yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT) yang anggotanya terdiri atas 100% perempuan dengan berkoordinasi dengan perangkat nagari atau jorong di daerah yang bersangkutan							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

OPD

:Dinas Lingkungan Hidup



Tim Verifikasi

<p>Inspektur</p> <p><u>Drs. Andy Sumanto, CfrA</u></p> <p>NIP 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala BKD</p> <p><u>Asril, AP, M. Si</u></p> <p>NIP 19750225 199501 1 001</p>	<p>Kepala Bapperida</p> <p><u>Paryanto, S. Sos, M.T</u></p> <p>NIP 19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial P3APPKB</p> <p><u>MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M</u></p> <p>NIP. 19790905 200801 1 018</p>
---	---	--	--

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
KODE PROGRAM	2.11.03		
KEGIATAN	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		
HASIL/OUTPUT	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Kampung Iklim di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 yang akan diusulkan terdiri atas Kecamatan Tiung, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Pulau Punjung. Kelompok Teknis Pelaksana Kampung Iklim di tingkat tapak yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT) yang anggotanya terdiri atas 100% perempuan dengan berkoordinasi dengan perangkat nagari atau jorong di daerah yang bersangkutan.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>a) Masih kurangnya responsif gender dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p> <p>b) Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim belum merasa penting oleh laki-laki</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <p>a) Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender</p> <p>b) Kurangnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p> <p>c) Kurangnya Pemahaman SDM tentang Pengarusutamaan Gender</p> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <p>a) Masih rendahnya alokasi dana terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p> <p>b) Koordinasi lintas sektor yang masih belum optimal</p>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Sosialisasi tentang Program Kampung Iklim yang responsive gender	
		Tujuan	Untuk mengetahui pemahaman tentang Program Kampung Iklim yang responsive gender
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ Aktifitas 2	Pemberian Penghargaan terhadap Nagari yang telah menerapkan program kampung iklim	
		Tujuan	Memberikan motivasi ke Nagari lain untuk mengikuti kegiatan Program Kampung Iklim.

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
KODE PROGRAM	2.11.03		
KEGIATAN	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		
HASIL/OUTPUT	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Kampung Iklim di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 yang akan diusulkan terdiri atas Kecamatan Tiumang, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Pulau Punjung. Kelompok Teknis Pelaksana Kampung Iklim di tingkat tapak yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT) yang anggotanya terdiri atas 100% perempuan dengan berkoordinasi dengan perangkat nagari atau jorong di daerah yang bersangkutan.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>a) Masih kurangnya responsif gender dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p> <p>b) Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim belum merasa penting oleh laki-laki</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <p>a) Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender</p> <p>b) Kurangnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p> <p>c) Kurangnya Pemahaman SDM tentang Pengarusutamaan Gender</p> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <p>a) Masih rendahnya alokasi dana terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p> <p>b) Koordinasi lintas sektor yang masih belum optimal</p>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Sosialisasi tentang Program Kampung Iklim yang responsive gender	
		Tujuan	Untuk mengetahui pemahaman tentang Program Kampung Iklim yang responsive gender
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ Aktifitas 2	Pemberian Penghargaan terhadap Nagari yang telah menerapkan program kampung iklim	
		Tujuan	Memberikan motivasi ke Nagari lain untuk mengikuti kegiatan Program Kampung Iklim.

Capaian Program	<p>Out put Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan</p> <p>Out come Terbentuknya Kampung Iklim baru</p>
-----------------	---



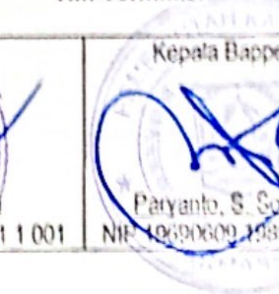

Sikabadi, 25 Juni 2024



(Budi Waluyo, S.PKP)

NIP. 19461030 198703 1 003

Tim Verifikasi



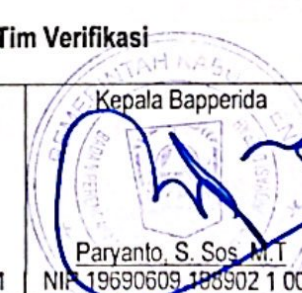

 Inspektur Drs. Adi Sumanto, CfrA NIP. 19631220 199009 1 001	 Kepala BND Asri AP, M. Si NIP. 19750228 199501 1 001	 Kepala Bapperida Paryanto, S. Sos., M.I NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala DINSOSPAPKB MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018
---	--	--	--

FORM KAK/ TOR

Program		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Sasaran Program		Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
	Gambaran Umum	Kegiatan Program Kampung Iklim dilaksanakan setiap tahunnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pembinaan terhadap Kelompok Masyarakat di Nagari yang akan diusulkan menjadi kampung iklim
	Indikator Kinerja	Terbentuknya Kampung Iklim
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ditingkat tapak
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Koordinasi, Sinkronisasi pelaksanaan Pengendalian Emisi, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan PulauPunjung.
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub KegiatanKoordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 69.166.400,-

Sikabau, 25 Juni 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KABUPATEN DHARMASRAYA
 (Budi Waluyo, S.PKP)
 NIP.19661030 198703 1 003

Tim Verifikasi

 Inspektur Drs. Andy Sumerito, CfrA NIP.19651220 199009 1 001	 Kepala BKD Asri, AP, M. Si NIP.19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida Paryanto, S. Sos. M. I NIP.19690609 198902 1 001	 Kepala DINSOC3APPKB MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP.19790905 200801 1 018
--	--	--	---

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025

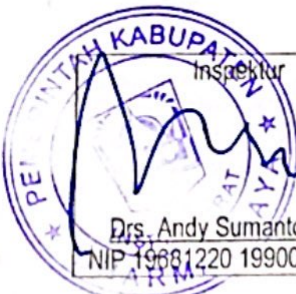


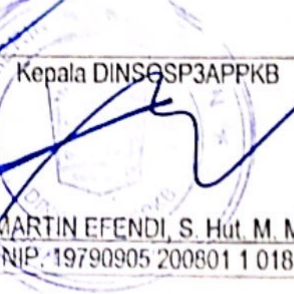
Urusan :						
Unit Organisasi	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup				
Sub Unit Organisasi	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup				
Program	2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
Kegiatan	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				
Sumber Pendanaan		APBD				
Lokasi Kegiatan		Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Pulau Punjung.				
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2025				
Kelompok Sasaran		KWT				
Jumlah 2024		46.897.000,-				
Jumlah 2025		69.166.400,-				
Jumlah 2026						
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	69.166.400,-				
Rincian Hitungan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Hitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					69.166.400,-
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA					69.166.400,-
5.1.02.01.01	BELANJA BARANG PAKAI HABIS					14.000.000

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					500.000
	spanduk	2	Paket	250.000	0	500.000.
5.1.02.01.01.00052	Belanja Natura dan Pakan Natura					4.500.000
	Nasi	150	Bungkus	22.000	0	3.300.000
	Snack	150	Kotak	8000	0	1.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Pembawa Acara dan Panitia					9.800.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1	Paket	9.500.000		9.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					35.866.400
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Paket	15.836.40 0		15.836.400
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Paket	17.030.00 0		20.030.000
Grand Total						69.166.400,-

Sikabatu, 25 Juni 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KABUPATEN DHARMASRAYA**
(Budi Waluyo, S.PKP)
NIP. 19661030 198703 1 003

Tim Verifikasi

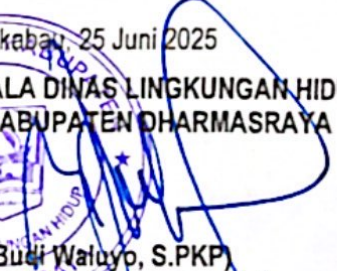
 Inspektur Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP. 19661220 199009 1 001	 Kepala BKD Asri, AP, M. Si NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida Paryanto, S. Sps, M. I NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala DINSOSP3APPKB MARTIN EFENDI, S. Hut, M. M NIP. 19790905 200801 1 018
--	--	--	--

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat (Service delivery)





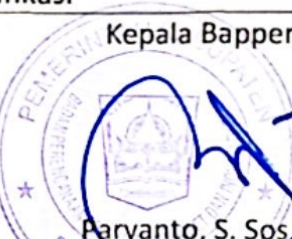
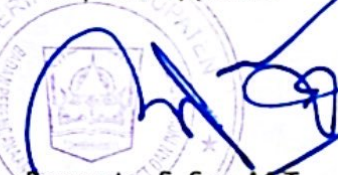


Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya mengacu pada Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Jumlah guru sekolah kumulatif : 90 orang, Laki-laki 37 orang (40%), Perempuan 53 orang (60%)	Akses: Tidak sesuai dengan responsif gender jumlah laki-laki dengan perempuan sehingga keterlibatan laki-laki dalam pembinaan belum maksimal Partisipasi: Terdapat kesenjangan antara jumlah guru laki-laki (40%) dan perempuan (60%) Manfaat : Meningkatnya gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender Kurangnya Pemahaman SDM tentang Pengarusutamaan Gender 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi lintas sector yang masih belum optimal Masih rendahnya alokasi dana 	Bertambahnya sekolah berwawasan lingkungan yang responsif gender	1. Sosialisasi dan Edukasi tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah yang responsif gender 2. Pembinaan Terhadap Warga sekolah 3. Pemberian Penghargaan Terhadap Sekolah yang telah melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah	Tercapainya tingkat kesadaran guru dalam Pembinaan sekolah berwawasan lingkungan dan kesenjangan gender guru diharapkan tidak menjadi factor penghambat tujuan tersebut.	Output Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH Outcome Terbentuknya Sekolah berwawasan lingkungan

Tujuan : Membentuk gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah	Sekolah yang dibina untuk mengikuti Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Adiwiyata) menuju Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten tahun 2025 adalah SDN 02 Pulau Punjung, SDN 01 Sungai Rumbai, SMPN 02 Koto Baru, SMPN 1 Padang Laweh, SMAN 1 Tiumang							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

OPD :Dinas Lingkungan Hidup

Gikabay, 25 Juni 2025
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KABUPATEN DHARMASRAYA**

(Budi Waluyo, S.PKP)
NIP. 19661030 198703 1 003

Tim Verifikasi

 Inspektur  <u>Drs. Andy Sumanto, CfrA</u> NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD  <u>Asril, AP, M. Si</u> NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida  <u>Paryanto, S. Sos. M.T</u> NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial P3APPKB  <u>MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M</u> NIP. 19790905 200801 1 018
--	--	---	--

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)



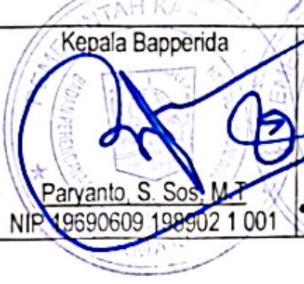

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup
TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		
KODE PROGRAM	2.11.09		
KEGIATAN	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
HASIL/OUTPUT	Bertambahnya sekolah berwawasan lingkungan yang responsiv gender		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Sekolah yang dibina untuk mengikuti Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah(Adiwiyata) menuju Sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten tahun 2025 adalah SDN 02 Pulau Punjung, SDN 01 Sungai Rumbai, SMPN 02 Koto Baru, SMPN 1 Padang Laweh, SMAN 1 Tiumbang.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>a) Tidak sesuai dengan responsif gender jumlah laki-laki dengan perempuan sehingga keterlibatan laki-laki dalam pembinaan belum maksimal</p> <p>b) Terdapat kesenjangan antara jumlah guru laki-laki (40%) dan perempuan (60%)</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <p>a) Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender</p> <p>b) Kurangnya Pemahaman SDM tentang Pengarusutamaan Gender</p> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <p>a) Koordinasi lintas sector yang masih belum optimal</p> <p>b) Masih rendahnya alokasi dana</p>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Sosialisasi tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah yang responsiv gender	
		Tujuan	Untuk mengetahui pemahaman tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah yang responsiv gender
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ Aktifitas 2	Pemberian Penghargaan Terhadap Sekolah yang memperoleh gelar sekolah berwawasan lingkungan	
		Tujuan	Agar sekolah lebih termotivasi untuk mengikuti gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah

		Alokasi Anggaran	
	Total Anggaran	20.893.000,-	
Capaian Program	Out put Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH Out come Terbentuknya Sekolah berwawasan lingkungan		


Sikabau, 25 Juni 2024
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KABUPATEN DHARMASRAYA**
(Budi Waluyo, S.PKP)
NIP. 19661030 198703 1 003

Tim Verifikasi


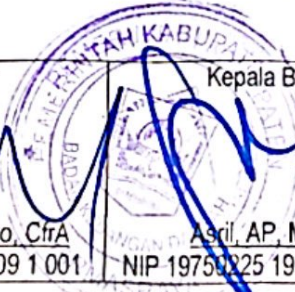
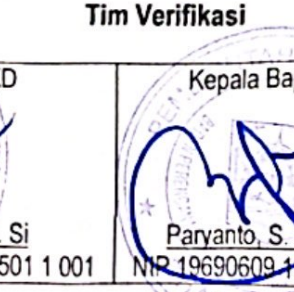

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapperida	Kepala DINSOSP3APPKB
			
Drs. Andy Samanto, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001	Asri, AP, M. Si NIP. 19750225 199501 1 001	Paryanto, S. Sos. M.T NIP. 19690609 198902 1 001	MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018

FORM KAK/ TOR

Program		Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Sasaran Program		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Kegiatan		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup
Latar Belakang	Dasar Hukum	Undang- undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
	Gambaran Umum	Kegiatan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah dilaksanakan setiap tahunnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pembinaan terhadap Sekolah yang berwawasan lingkungan
	Indikator Kinerja	Terbentuknya Sekolah yang berwawasan lingkungan
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Membentuk gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Koordinasi, Sinkronisasi pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Sekolah Se-Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 20.893.000,-

Sikabau, 25 Juni 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KABUPATEN DHARMASRAYA
 (Budi Waluyo, S.PKP)
 NIP. 19661030 198703 1 003

Tim Verifikasi

 Inspektur Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001		 Kepala BKD Asril, AP, M. Si NIP. 19750225 199501 1 001		 Kepala Bapperida Paryanto, S. Sos. M.T. NIP. 19690609 198902 1 001		 Kepala DINASOSP3APPKB MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018	
--	--	---	--	---	--	--	--

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN SKPD/ INOVASI/ KESENJANGAN GENDER/ PENCAPAIAN SDG's/ PENCAPAIAN SPM/ SERVICE DELIVERY (Pilih Kategori yang sesuai dengan program masing-masing OPD & Kecamatan)

OPD : DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

PROGRAM : PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

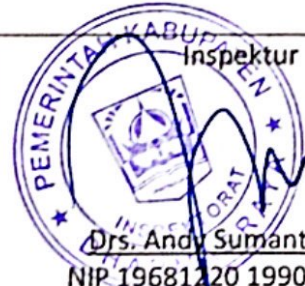



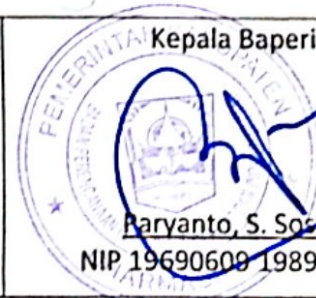
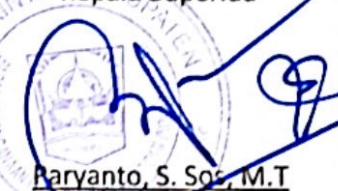


Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Penanganan Kerawanan Pangan Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota) Tujuan : Meningkatkan pengadaan,	- Jumlah daerah rentan rawan pangan sebanyak 11 Nagari dengan Jumlah 120 Balita Sasaran - Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan sebanyak 32,706 Ton - Dampak Inflasi Harga Pangan - Jumlah Lumbung Pangan yang ada di kabupaten didharmasraya sebanyak 6 unit	Akses: Masih tingginya angka stunting yang diakibatkan karena kurangnya kesadaran ibu hamil dalam mengambil tindakan pencegahan bayi lahir stunting Partisipasi: Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemenuhan gizi yang baik bagi anak Control: Kurang terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam mengambil kebijakan pencegahan stunting sejak dini.	- Masih kurangnya sosialisasi tentang pemberian gizi yang baik pada anak balita - Masih kurangnya kepedulian ibu tentang anak lahir stunting - Masih rendahnya jumlah lumbung pangan yang sesuai standard - Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sector dan Pemuka masyarakat. - Masih kurangnya sarana informasi baik media cetak dan elektronik - Masih rendahnya	- Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi yang baik untuk balita - Kurangnya dukungan keluarga terhadap pemenuhan gizi yang baik untuk balita karna kondisi keuangan yang rendah - Kurangnya sosialisasi tenaga kesehatan tentang pencegahan stunting sejak dini	- Menurunkan jumlah angka anak yang mengalami gizi buruk dan stunting. - Tersedianya dan tersalurkannya cadangan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat di daerah rawan pangan . - Meningkatkan kesadaran Ibu untuk pencegahan stunting sejak dini	- Melaksanakan Sosialisasi - Meningkatkan jumlah lumbung pangan yang sesuai standard - Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh lintas sector dan pemuka masyarakat - Pengadaan media Informasi - Meningkatkan kapasitas petugas	- Jumlah daerah rentan rawan pangan sebanyak 11 Nagari dengan Jumlah 120 Balita Sasaran - Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan sebanyak 32,706 Ton - Dampak Inflasi Harga Pangan - Jumlah Lumbung Pangan yang ada di kabupaten didharmasraya sebanyak 6 unit - Jumlah petugas lapangan 61 orang, Laki-laki 42 dan Perempuan 19	Output : - Melaksanakan sosialisasi sebanyak 120 orang - Pemberian bantuan untuk perbaikan lumbung pangan sebanyak 6 unit - Melaksanakan bimtek untuk petugas lapangan sebanyak 61 Orang. Input: Anggaran Rp. 169.999.300 Outcome : - Menurunkan angka

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basls Data (Base-Line)	Indikator Gender
<p>pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan pangan.</p> <p>Sasaran : Daerah Rentan Rawan pangan dan Balita Stunting</p>	<p>- Jumlah petugas lapangan 61 orang, Laki-laki 42 dan Perempuan 19 Orang.</p>	<p>Manfaat: -</p>	<p>kompetensi petugas lapangan</p>			lapanga	Orang.	<p>stunting pada anak balita</p> <p>- Meningkatnya Ketersediaan Pangan</p>

Sikabau, Juni 2024
KEPALA PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DHARMASRAYA

RAMILUS, SP.M.SI
 NIP. 19670918 199203 1 004

Tim Verifikasi

 Inspektur  Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD  Asril, AP, M. Si NIP 19750225 199501 1 001	 Kepala Baperida  Paryanto, S. Sos, M.T NIP 19690600 198902 1 001	 Kepala DINSOSP3APPKB  MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018
---	---	---	---

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN SKPD/ INOVASI/ KESENJANGAN GENDER/ PENCAPAIAN SDG's/ PENCAPAIAN SPM/ SERVICE DELIVERY (Pilih Kategori yang sesuai dengan program masing-masing OPD & Kecamatan)

OPD : DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
PROGRAM : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan



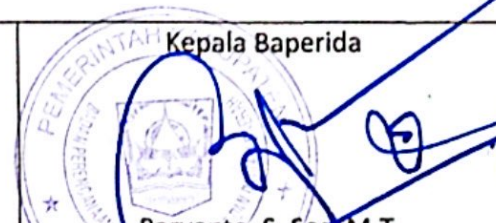

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Kota Tujuan : Meningkatkan ketersediaan ikan untuk masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, 234.509 Jiwa - Kebutuhan akan ikan untuk di konsumsi rata-rata perhari > 200 Gr/ Kap/Hr - Produksi Ikan Tahun 2023 adalah 25.449 Ton - Jumlah luas usaha budidaya ikan : 500 Ha - Jumlah Pelaku usaha pengolahan ikan : 7 Kelompok - Tingkat konsumsi ikan daerah Tahun 2023 : 36 Kg perkapita per 	Akses: Rendahnya Konsumsi ikan masyarakat terutama pada Wanita Hamil, ibu menyusui dan balita Partisipasi: Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi ikan Bagi pertumbuhan anak balita Control: Kurang terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam mengambil kebijakan Manfaat: -	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya sosialisasi tentang nilai protein yang terkandung pada ikan untuk wanita hamil, ibu menyusui dan anak balita - Masih rendahnya jumlah usaha pengelola ikan konsumsi - Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sector dan Pemuka masyarakat. - Masih kurangnya sarana informasi baik media cetak dan elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai protein yang terkandung pada ikan untuk wanita hamil, ibu menyusui dan anak balita - Kurangnya pelaku usaha pengolahan ikan konsumsi dalam bentuk UMKM - Kurangnya dukungan keluarga terhadap pemenuhan gizi yang baik untuk wanita hamil, ibu menyusui dan anak balita karna kondisi keuangan yang rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyediaan ikan untuk di konsumsi oleh wanita hamil, ibu menyusui dan anak balita - Meningkatkan peran serta masyarakat terutama ibu rumah tangga dalam penyediaan dan pengolahan ikan yang akan di konsumsi oleh keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sosialisasi - Meningkatkan jumlah usaha pengelola ikan konsumsi - Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh lintas sector dan pemuka masyarakat - Pengadaan media Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Produksi Ikan Daerah - Jumlah produksi Ikan olahan - Jumlah pembudidaya ikan yang berkembang - Jumlah kelompok pengolah ikan yang berkembang - Jumlah pelaku usaha pengolahan ikan - Jumlah petugas penyuluh perikanan sebanyak 3 orang (1 perempuan dan 2 laki-laki) 	Output : <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Konsumsi Ikan Masyarakat - Jumlah usaha Pengelolaan ikan konsumsi Input: Anggaran Rp. 20.547.000 Outcome : Meningkatnya Angka konsumsi Ikan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
dan konsumsi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita Sasaran: Meningkatkan Konsumsi Ikan Daerah, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita	Tahun - Jumlah petugas penyuluh perikanan sebanyak 3 orang (1 perempuan dan 2 laki-laki)			- Kurangnya Inovasi dalam pengelolaan ikan untuk di konsumsi				

Sikabau, Juni 2024
**KEPALA PANGAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN DHARMASRAYA**

RAMILUS, SP.M.Si
 NIP. 19670918 199203 1 004

Tim Verifikasi

 Inspektur Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD Asril, AP, M. Si NIP 19750225 199501 1 001	 Kepala Baperida Paryanto, S. Sos, M.T NIP 19690609 198902 1 001	 Kepala DINSOSP3APPKB MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018
--	--	--	--

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN SKPD/ INOVASI/ KESENJANGAN GENDER/
PENCAPAIAN SDG's/ PENCAPAIAN SPM/ SERVICE DELIVERY (Pilih Kategori yang
sesuai dengan program masing-masing OPD & Kecamatan)**

SKPD : DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

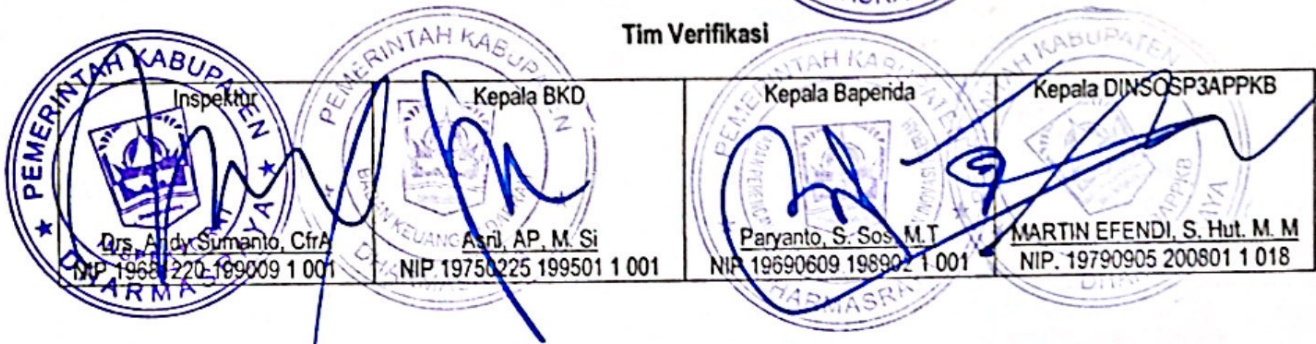
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
KODE PROGRAM	3.25.06		
KEGIATAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
HASIL/ OUTPUT	Jumlah Kelompok usaha budidaya ikan dan usaha pengolahan ikan yang berkembang		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsumsi ikan yang masih rendah jika dibandingkan dengan angka ideal yang dibutuhkan tubuh - Terbatasnya akses masyarakat terutama ibu rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan ikan karena kurang tersedia dan harga yang cukup tinggi <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan Masih kurang dan rendahnya konsumsi dan pemahaman masyarakat pentingnya mengkonsumsi ikan untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya sosialisasi tentang nilai protein yang terkandung pada ikan untuk wanita hamil, ibu menyusui dan anak balita - Rendahnya jumlah pelaku usaha pengolahan ikan konsumsi yang mengakibatkan anak balita kurang mengenal pentingnya mengkonsumsi ikan. <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai protein yang terkandung pada ikan untuk wanita hamil, ibu menyusui dan anak balita - Kurangnya dukungan keluarga terhadap pemenuhan gizi yang baik untuk wanita hamil, ibu menyusui dan anak balita karna kondisi keuangan yang rendah - Kurangnya inovasi dalam pengelolaan ikan untuk di konsumsi 		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sosialisasi kepada Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita - Meningkatkan jumlah usaha pengelola ikan konsumsi agar anak balita lebih semangat untuk mengkonsumsi ikan - Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh lintas sector dan pemuka masyarakat - Pengadaan media informasi untuk memudahkan masyarakat pengenalan tentang pentingnya mengkonsumsi ikan 	
		Tujuan	Meningkatkan ketersediaan ikan untuk masyarakat dan konsumsi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita
		Alokasi Anggaran	Rp 20.547.000,-
		Total Anggaran	Rp. 20.547.000,-

Capaian Program	Out put: - Jumlah usaha Pengelolaan ikan konsumsi - Jumlah Konsumsi Ikan Masyarakat Out come : - Meningkatnya Angka konsumsi Ikan
-----------------	---



Tim Verifikasi



FORM KAK/ TOR

Program		PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Sasaran Program		Masyarakat, Ibu hamil, Ibu Menyusui dan Balita
Kegiatan		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024
	Gambaran Umum	Tersedianya Ikan Konsumsi, Usaha Pengolahan Ikan dan terfasilitasinya gemarikan dan forikan.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	-Mengembangkan kelompok usaha pengolahan ikan yang telah ada dan menumbuhkan usaha pengolahan ikan yang baru -Meningkatkan Konsumsi ikan yang masih rendah dibandingkan angka ideal yang dibutuhkan tubuh dengan cara mengadakan kegiatan Gemarikan dan Forikan
	Indikator Kinerja	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		-Meningkatkan Angka konsumsi Ikan -Meningkatkan Produksi Ikan Segar dan Ikan Olahan -Meningkatkan pendapatan usaha masyarakat pengolahan ikan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		-Melakukan Sosialisasi manfaat makan ikan dan pemberian makanan berbahan ikan kepada ibu hamil dan anak-anak -Melakukan monitoring pada pelaku usaha pengolahan ikan agar sesuai dengan prosedur.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Dinas Pangan dan Perikanan
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Kepala Bidang Perikanan Penanggung Jawab : Kepala Bidang Perikanan
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 20.547.000

Sikabau, Juni 2024
KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN,
KABUPATEN DHARMASRAYA



RAMILUS, SP,M.Si

NIP/19670918 199203 1 004

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN SKPD/ INOVASI/ KESENJANGAN GENDER/
PENCAPAIAN SDG's/ PENCAPAIAN SPM/ SERVICE DELIVERY (Pilih Kategori yang
sesuai dengan program masing-masing OPD & Kecamatan)**

SKPD : DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
KODE PROGRAM	2.09.04		
KEGIATAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		
HASIL/ OUTPUT	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah daerah rentan rawan pangan sebanyak 11 Nagari dengan Jumlah 120 Balita Sasaran - Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan sebanyak 32,706 Ton - Dampak Inflasi Harga Pangan - Jumlah Lumbung Pangan yang ada di kabupaten didharmasraya sebanyak 6 unit - Jumlah petugas lapangan 61 orang, Laki-laki 42 dan Perempuan 19 Orang. <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemenuhan gizi yang baik bagi anak, sehingga mengakibatkan masih tingginya angka stunting di masyarakat.</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya sosialisasi tentang pemberian gizi yang baik pada anak balita - Masih kurangnya kepedulian ibu tentang anak lahir stunting - Masih rendahnya jumlah lumbung pangan yang sesuai standard - Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sector dan Pemuka masyarakat. - Masih kurangnya sarana informasi baik media cetak dan elektronik - Masih rendahnya kompetensi petugas lapangan <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi yang baik untuk balita - Kurangnya dukungan keluarga terhadap pemenuhan gizi yang baik untuk balita karna kondisi keuangan yang rendah - Kurangnya sosialisasi tenaga kesehatan tentang pencegahan stunting sejak dini. 		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktivitas	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sosialisasi - Meningkatkan jumlah lumbung pangan yang sesuai standard - Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh lintas sector dan pemuka masyarakat - Pengadaan media informasi - Meningkatkan kapasitas petugas lapangan 	
	Tujuan	Meningkatkan pengadaan, pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan pangan.	
	Alokasi Anggaran	Rp 169.999.300,-	
	Total Anggaran	Rp. 169.999.300,-	

Capaian Program	<p>Out put:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi sebanyak 120 orang - Pemberian bantuan untuk perbaikan lumbung pangan sebanyak 6 unit - Melaksanakan bimtek untuk petugas lapangan sebanyak 61 Orang. <p>Out come :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurunkan angka stunting pada anak balita - Meningkatnya Ketersediaan Pangan
-----------------	---





Sikabau, Juni 2024

KEPALA PANGAN DAN PERIKANAN,
KABUPATEN DHARMASRAYA

RAMILUS, SP, M.Si

NIP. 19670918 199203 1 004

Tim Verifikasi

<p>Inspektur</p>  <p>Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala BKD</p>  <p>Asril, AP, M. Si NIP. 19750225 199501 1 001</p>	<p>Kepala Bappeda</p>  <p>Paryanto, S. Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala DINSOSP3APPKB</p>  <p>MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018</p>
--	--	--	---

FORM KAK/ TOR

Program		PENGOLAHAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Sasaran Program		Daerah Rentan Rawan Pangan dan Balita Stunting
Kegiatan		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kemandirian Pangan Daerah 3. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024
	Gambaran Umum	Tersedianya Bantuan untuk daerah rentan rawan pangan dan balita stunting.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	-Memberikan bantuan berupa makanan kepada daerah rentan rawan pangan dan balita stunting - Memberikan bantuan kepada Lumbung Pangan Masyarakat untuk memperbaiki produksi, agar cadangan pangan daerah tetap tersedia.
	Indikator Kinerja	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah.
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		- Meningkatkan pengadaan, pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan pangan.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		-Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemberian gizi kepada anak balita - Mendistribusikan bantuan makanan per 3 (tiga) bulan berturut-turut - Memberikan bantuan ke Lumbung Pangan Masyarakat berupa perbaikan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Dinas Pangan dan Perikanan
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Penanggung Jawab : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 169.999.300

Sikabau, Juni 2024
KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN,
KABUPATEN DHARMASRAYA



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD DAN PENCAPAIAN SPM

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal yang merupakan urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang pekerjaan Umum dan penataan ruang	Akses : - terbatasnya informasi bagi masyarakat tentang pengelolaan dan Pemanfaatan jaringan perpipaan Partisipasi : - Kurangnya peluang atau kesempatan bagi kelompok perempuan untuk penyampaian informasi untuk penentuan lokasi keterlibatan	- Masih terbatasnya jumlah Jaringan perpipaan sesuai kebutuhan masyarakat - Kurangnya sosialisasi bagi masyarakat terutama perempuan dan anak-anak dalam pengelolaan jaringan perpipaan - Koordinasi yang masih kurang - Jumlah SDM	- Kurangnya Pemahaman dan kesadaran tentang manfaat jaringan perpipaan - Kurangnya pengetahuan di Masyarakat terutama di kelompok perempuan dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan perpipaan	- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak bagi seluruh lapisan masyarakat - Terbangunnya jaringan perpipaan dengan melibatkan masyarakat terutama perempuan dalam	- Melaksanakan pembangunan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 200 Rumah Tangga - Melakukan sosialisasi - Meningkatkan koordinasi - Menambah Jumlah SDM Sesuai kompetensi - Pengadaan sarana dan prasarana - Pengadaan sarana informasi media cetak	- Persentase penduduk / rumah tangga yang terlayani air minum jaringan perpipaan Target 4 Lokasi	Output : Terbangunnya Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan dengan pembangunan yang responsif gender 4 Lokasi Input ; Rp. 2000.000.000,- Outcome : Tersedia nya akses air Minum aman dengan pembangunan yang responsif gender

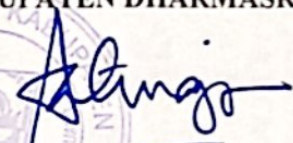
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Tujuan : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Sasaran : Meningkatnya layanan penyediaan air minum	SPM merupakan peranan yang penting dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik bagi pemerintah daerah sebagai perangkat hya g memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan, bagi pemerintah daerah SPM dapat di jadikan dasar tolak ukur dalam penentuan anggaran yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan khususnya pada urusan wajib yang diperlukan masyarakat, dengan adanya SPM akan menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah	dalam pemeliharaan dan pengelolaan jaringan perpipaan Kontrol : - Kurangnya pengetahuan di Masyarakat terutama di kelompok perempuan dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan perpipaan Manfaat : - Belum semua masyarakat merasakan manfaat pembangunan penampung air pada kegiatan Pengelolaan dan	yang belum memadai - Kurangnya Sarana dan Prasarana yang memadai - Pembinaan dan Penyuluhan masih kurang optimal - Masih kurangnya Media Informasi baik media cetak dan elektronik		pengelolaan dan pemanfaatannya dan elektronik - Membuat Juknis			

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan Minimal Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M. 2018 tentang standar teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						

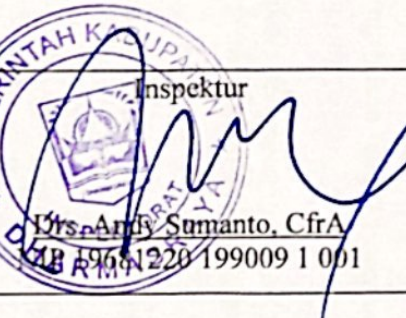

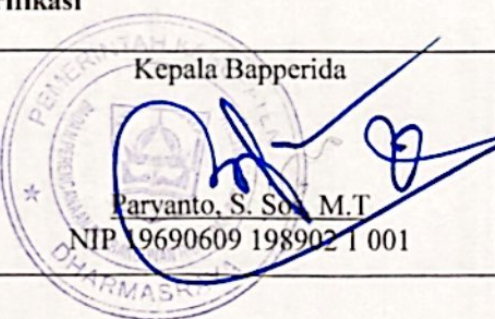
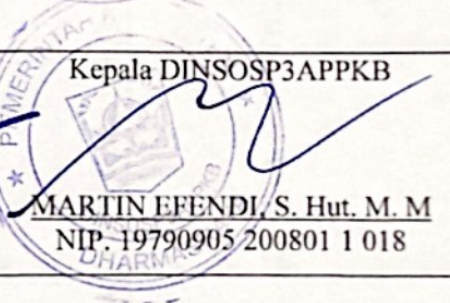
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
	<p>Jenis pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum pemerintah daerah kabupaten Dharmasraya terdiri atas</p> <p>a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan</p> <p>b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik</p> <p>Permasalahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur air limbah / sanitasi - infrastruktur air Minum Perpipaan 							

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
	- Masih kurang kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup sehat dan bersih							

Plt. KEPALA DINAS PUPR
KABUPATEN DHARMASRAYA


ANDAR ATMAJA, ST,MT
NIP. 19840329 201101 1011

Tim Verifikasi

 Inspektur Hrs. Andy Sumanto, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD Asri AP, M. Si NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida Paryanto, S. Sos. M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala DINSOSP3APPKB MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018
---	--	--	--

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD
DAN PENCAPAIAN SPM

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KODE PROGRAM	1.03.05
KEGIATAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
HASIL/ OUTPUT	Terbangunnya Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan dengan pembangunan yang respnsif gender 4 Lokasi
ANALISA SITUASI	<p>4. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal yang merupakan urusan pemerintah wajib yang di selenggarakan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang pekerjaan Umum dan penataan ruang</p> <p>SPM merupakan peranan yang penting dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik bagi pemerintah daerah sebagai perangkat hya g memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan, bagi oemerintah daerah SPM dapat di jadikan dasar tolak ukur dalam penentuan anggaran yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan khususnya pada urusan wajib yang diperlukan masyarakat, dengan adanya SPM akan menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal - Peraturan Menteri dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan Minimal - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M. 2018 tentang standar teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang <p>Jenis pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum pemerintah daerah kabupaten Dharmasraya terdiri atas</p> <p>Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan</p> <p>Permasalahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur air Minum Perpipaan - Masih kurang kesadaran masyarakat tentang prilaku hidup sehat dan bersih - Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Air Minum perpipaan <p>5. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender Faktor Kesenjangan Akses</p> <ul style="list-style-type: none"> - terbatasnya informasi bagi masyarakat tentang pengelolaan dan Pemanfaatan jaringan perpipaan <p>Partisipasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnyapeluang atau kesempatan bagi kelompok perempuan untuk penyampaian informasi untuk penentuan lokasi keterlibatan dalam pemeliharaan dan pengelolaan jaringan perpipaan <p>Kontrol :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnyapengetahuan di Masyarakat terutama di kelompok perempuan dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan perpipaan

	Manfaat : <ul style="list-style-type: none"> - Belum semua masyarakat merasakan manfaat pembangunan penampung air pada kegiatan PengelolaanPengembanganSistemPenyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 	
	Penyebab Internal <ol style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya jumlah Jaringan perpipaan sesuai kebutuhan masyarakat Kurangnya sosialisasi bagi masyarakat terutama perempuan dan anak-anak dalam pengelolaan jaringan perpipaan Koordinasi yang masih kurang Jumlah SDM yang belum memadai Kurangnya Sarana dan Prasarana yang memadai Pembinaan dan Penyuluhan masih kurang optimal Masih kurangnya Media Informasi baik media cetak dan elektronik 	
	Penyebab Eksternal <ol style="list-style-type: none"> Kurangnya Pemahaman dan kesadaran tentang manfaat jaringan perpipaan Kurangnya pengetahuan di Masyarakat terutama di kelompok perempuan dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan perpipaan 	
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pembangunan SPAL S Sambungan Rumah (SR) sebanyak 200 Rumah Tangga - Melakukan sosialisasi - Meningkatkan koordinasi - Menambah Jumlah SDM Sesuai kompetensi - Pengadaan sarana dan prasarana - Pengadaan sarana informasi media cetak dan elektronik
		Tujuan
		Alokasi Anggaran Rp. 2000.000.000,-
	Komponen/ Aktifitas 2	Tujuan
		Alokasi
		Anggaran
	Total Anggaran	Rp. 2000.000.000,-
Capaian Program	Out put : Terbangunnya Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan dengan pembangunan yang respnsif gender 4 Lokasi Out come : Tersedia nya akses air Minum aman dengan pembangunan yang responsif gender	









Sungai Dareh, Juni 2024

Plt. KEPALA DINAS PUPR
KABUPATEN DHARMASRAYA



[Signature]
ANDAR ATMAJA, ST,MT
NIP. 19840329 201101 1011

Tim Verifikasi


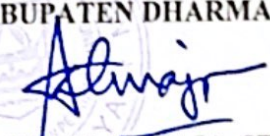
 Inspektur  <u>Drs. Andi Simanungkalit</u> NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD  <u>Asri AP, M.Si</u> NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida  <u>Paryanto, S.Sos, M.P</u> NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala DINSOSP3APPKB  <u>MARTIN EFENDI, S.Hut, M.M</u> NIP. 19790905 200801 1 018
---	---	--	---

FORM KAK/ TOR

Program		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Sasaran Program		Rumah Tangga berpenghasilan rendah
Kegiatan		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 2. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan Minimal 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M. 2018 tentang standar teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Gambaran Umum	<p>Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal yang merupakan urusan pemerintah wajib yang di selenggarakan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang pekerjaan Umum dan penataan ruang</p> <p>SPM merupakan peranan yang penting dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik bagi pemerintah daerah sebagai perangkat hya g memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan, bagi oemerintah daerah SPM dapat di jadikan dasar tolok ukur dalam penentuan anggaran yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan khususnya pada urusan wajib yang diperlukan masyarakat, dengan adanya SPM akan menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah</p>
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pembangunan Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan
	Indikator Kinerja	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun
	Batasan Kegiatan	

Maksud dan Tujuan	Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
Cara Pelaksanaan Kegiatan	Membuat Perencanaan, Melakukan Pembangunan Fisik dan Melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya	Rp. 2000.000.000,-

Sungai Dareh, Juni 2024


**Plt. KEPALA DINAS PUPR
KABUPATEN DHARMASRAYA**

ANDAR ATMAJA, ST,MT
NIP. 19840329 201101 1011

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
INOVASI DUTA PERIZINAN DPMPTSP DHARMASRAYA

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROGRAM : Program Pelayanan Penanaman Modal

TAHUN : 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Peraturan BKPM RI no 2 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non fisik fasilitas penanaman modal DPMPTSP Melakukan Bimtek/Sosialisasi kemudahan berusaha kepada Pelaku Usaha melalui Dana DAK Non Fisik Fasilitas	Akses: Bimbingan Teknis/Sosialisasi kemudahan Berusaha diikuti 450 Pelaku Usaha Partisipasi: Pelaku Usaha belum semuanya mengerti tentang OSS-RBA Online dan LKPM Online Kontrol : Terbatasnya pengetahuan Masyarakat/pelaku usaha terhadap	Kurangnya pengembangan SDM pengelola perizinan	Banyaknya Pelaku Usaha laki-laki disebabkan karena laki-laki adalah pekerja dan dan Bertanggung jawab kepada keluarga	Dengan pengurusan Perizinan berusaha secara online akan dapat pemangkas birokrasi, menghemat waktu dan dapat dilakukan secara mandiri	Peningkatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha oleh provinsi maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepada pelaku usaha serta duta	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Dharmasraya Dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Penanaman Modal 2. Meningkatkan Pemahaman Pelaku Usaha Mengenai Ketentuan	Input : Meningkatnya Jumlah Peserta Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha Outcome : Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Yang Memiliki Perizinan Berusaha



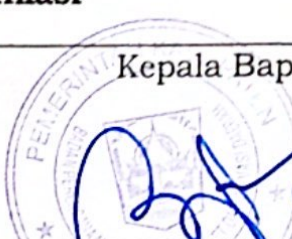
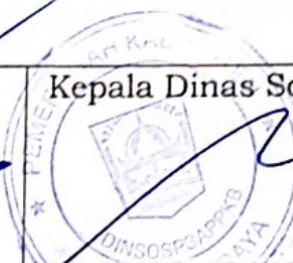
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Tujuan : Untuk meningkatkan Pemahaman dan keterampilan kepada Pelaku Usah	Penanaman Modal Tahun 2024 2. Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha ini dilakukan melalui pertemuan dengan partisipan pelaku usaha dan narasumber yang kompeten	sistem teknologi terbaru				duta perizinan yang nantinya akan ditempatkan diseluruh Nagari Nagari	Pelaksanaan Penanaman Modal.	

Sikabau, 25 Juni 2024

KEPALA DINAS PMPTSP

NALDI, S.STP, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19820411 200012 1 002

Tim Verifikasi

 <u>Drs. Andy Sumanto, CfrA</u> NIP. 19681220 199009 1 001	 <u>ASRI LAP, M.Si</u> NIP 19750225 199501 1 001	 <u>H. PARYANTO, S.Sos, M.T</u> NIP 19690605 198902 1 001	 <u>MARTIN EFENDI, S.Hut.M.M</u> NIP. 19790905 200801 1 018
---	---	--	--

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)
INOVASI DUTA PERIZINAN DPMPTSP DHARMASRAYA

SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
KODE PROGRAM	2.18.05
KEGIATAN	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
HASIL/OUTPUT	Untuk meningkatkan Pemahaman dan keterampilan kepada Pelaku Usaha
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <p>1. Peraturan BKPM RI no 2 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non fisik fasilitas penanaman modal DPMPTSP Melakukan Bimtek/Sosialisasi kemudahan berusaha kepada Pelaku Usaha melalui Dana DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2024</p> <p>2. Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha ini dilakukan melalui pertemuan dengan partisipan pelaku usaha dan narasumber yang kompeten</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan Akses</p> <ul style="list-style-type: none"> Bimbingan Teknis/Sosialisasi kemudahan Berusaha diikuti 450 Pelaku Usaha <p>Partisipasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelaku Usaha belum semuanya mengerti tentang OSS-RBA Online dan LKPM Online. <p>Kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya pengetahuan Masyarakat/pelaku usaha terhadap sistem teknologi terbaru <p>b. Penyebab Internal</p> <p>Kurangnya pengembangan SDM pengelola perizinan</p> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> Banyaknya Pelaku Usaha laki-laki disebabkan karena laki-laki adalah pekerja dan Bertanggung jawab kepada keluarga

CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak ukur Jumlah dana Rp. 319.052000		
	2. Indikator dan target kinerja <u>Input</u> Dana yang diusulkan sebesar Rp. 319.052000 <u>Output</u> Meningkatnya Jumlah Peserta Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha <u>Outcome</u> Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Yang Memiliki Perizinan Berusaha		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 319.052000		
RENCANA AKSI	Kegiatan	Peningkatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha oleh provinsi maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepada pelaku usaha serta duta duta perizinan yang nantinya akan ditempatkan diseluruh Nagari Nagari.	
	Tujuan	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan DPMPSTSP Kabupaten Dharmasraya Dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Penanaman Modal 2. Meningkatkan Pemahaman Pelaku Usaha Mengenai Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal.	
	Indikator Output	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Yang Memiliki Perizinan Berusaha	

Sikabau, 25 Juni 2024

KEPALA DPMPSTSP



Tim Verifikasi

 Inspektur Drs. ANDY SUMANTO, CfrA NIP. 19581220 199009 1 001	 Kepala BKD ASRIL, AP., M.Si NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida H. PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial P3A PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut. M.M NIP. 19790905 200801 1 018
--	---	---	---

FORM KAK/ TOR

Program		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Sasaran Program		Pelaku Usaha
Kegiatan		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan BKPM RI nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko 2. Peraturan BKPM RI no 2 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non fisik fasilitas penanaman modal
	Gambaran Umum	Kegiatan dilakukan dengan pemberian konsultasi, sosialisasi, ataupun bimbingan teknis serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Indikator Kinerja	Terbitnya Perizinan dan Non perizinan Sesuai Ketentuan
	Batasan Kegiatan	Peningkatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha meliputi proses perizinan berusaha dan non berusaha
Maksud dan Tujuan		<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Dharmasraya 4. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang undangan 5. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai perizinan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Melalui Bimbingan Teknis/Sosialisasi
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya

	Penanggung Jawab : Kepala Dinas DPMPTSP
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya	Rp. 319.052000

Sikabau, 25 Juni 2024



**MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD**

OPD : Dinas Pendidikan
PROGRAM : Pengelolaan Pendidikan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	1. Data peserta didik laki-laki dan perempuan di SD Kabupaten Dharmasraya Laki-laki = 2267 siswa, Perempuan = 1474 siswa 2. Jumlah peserta didik SD laki-laki dan perempuan yang menerima biaya personal (Seragam Sekolah) Laki-laki : 2267 siswa, Perempuan : 1474 siswa 3. Jumlah peserta didik SD laki-laki dan perempuan yang menerima biaya personal	Akses : Belum semua siswa yang mendapatkan biaya personal (Seragam Sekolah) Partisipasi : - Kontrol : Masyarakat khususnya siswa baru di jenjang pendidikan sekolah dasar Manfaat :	- Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pembelajaran dan Kebudayaan, Nomor. 052/ C/ Kep/ D/ 82 "Sekolah secara formal berhak memakai seragam sekolah terhadap siswanya dengan bermacam alasan karena seragam sekolah ialah suatu perlengkapan menciptakan kerapian, ketertiban serta keteraturan siswa dalam melakukan aktivitas pembelajaran. <u>Seragam sekolah sebagai penghilang kesenjangan antara</u>	Belum semua masyarakat menerima seragam sekolah baru jenjang Sekolah Dasar	Terlaksananya bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa laki-laki dan perempuan	1. Pendataan dan verifikasi data. 2. Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa	Jumlah peserta didik SD laki-laki dan perempuan yang menerima bantuan perlengkapan sekolah	Input : Rp 2.451.500.000 Output : Jumlah peserta didik SD laki-laki dan perempuan yang tidak mendapatkan bantuan biaya personil (seragam yang menerima bantuan perlengkapan sekolah

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Tujuan : terlaksananya bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa	(Seragam Sekolah) Laki-laki : 2267 siswa, Perempuan : 1474		<u>kelas ekonomi dari siswa yang dari berbagai elemen</u>					Out Come : Meningkatnya kesejahteraan peserta didik SD laki-laki dan perempuan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Tujuan : terlaksananya bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa	1. Data peserta didik laki-laki dan perempuan di SMP Kabupaten Dharmasraya Laki-laki = 2336 siswa, Perempuan = 1273 siswa 2. dan perempuan yang menerima biaya personal (Seragam Sekolah) Laki-laki : 2336 siswa, Perempuan: 1273 siswa 3. siswa dan Jumlah peserta didik SMP laki-laki dan perempuan yang menerima biaya personal (Seragam Sekolah) Laki-laki : 2336 siswa, Perempuan : 1273 siswa	Akses : Belum semua siswa yang mendapatkan biaya personal (Seragam Sekolah) Partisipasi : - Kontrol : Masyarakat khususnya siswa baru di jenjang pendidikan sekolah dasar Manfaat : -	- Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pembelajaran dan Kebudayaan, Nomor. 052/ C/ Kep/ D/ 82 "Sekolah secara formal berhak memakai seragam sekolah terhadap siswanya dengan bermacam alasan karena seragam sekolah ialah suatu perlengkapan menciptakan kerapian, ketertiban serta keteraturan siswa dalam melakukan aktivitas pembelajaran. <u>Seragam sekolah sebagai penghilang kesenjangan antara kelas ekonomi dari siswa yang dari berbagai elemen</u> "	Belum semua masyarakat menerima seragam sekolah baru	Terlaksananya bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa laki-laki dan perempuan	1. Pendataan dan verifikasi data. 2. Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa	Jumlah peserta didik SMP laki-laki dan perempuan yang menerima bantuan perlengkapan sekolah	Input : Rp 1.648.500.000 Output : Jumlah peserta didik SMP laki-laki dan perempuan yang tidak mendapatkan bantuan biaya personil (seragam yang menerima bantuan perlengkapan sekolah) Out Come : Meningkatnya kesejahteraan peserta didik SMP laki-laki dan perempuan

FORM KAK/ TOR

Program		Program Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
Sasaran Program		Siswa Sekolah Dasar
Kegiatan		Pengelolaan Pendidikan PAUD
Sub Kegiatan		Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
Latar Belakang	Dasar Hukum	3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
	Gambaran Umum	Kabupaten Dharmasraya memiliki Data peserta didik laki-laki dan perempuan di SMP Kabupaten Dharmasraya Laki-laki = 2336 siswa, Perempuan = 1273 siswa Jumlah peserta didik SMP laki-laki dan perempuan yang menerima Biaya Personil (Seragam Sekolah) Laki-laki : 2336 siswa, Perempuan : 1273 siswa
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022
	Indikator Kinerja	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Dharmasraya
	Batasan Kegiatan	Untuk tahun 2024 kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Berdasarkan Permendikbud dikhususkan untuk Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Dharmasraya
Maksud dan Tujuan		Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Kabupaten Dharmasraya
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Pengadaan Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama / Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Kabupaten Dharmasraya

Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan	Pelaksana : Dinas Pendidikan Sekolah Yang Menerima Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik PAUD
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2024
Biaya	Rp 287.500.000

Pulau Punjung, Juni 2024
Kepala



BOBBY P. RIZA, S.STP., M.Si
NIP. 198205212000121002

Tim Verifikasi

<p>Inspektur</p> <p><u>Des. ANDY SUMANTO</u> CfrA NIP 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala BKD</p> <p><u>ASRILAP, M.Si</u> NIP 19750225 199501 1 001</p>	<p>Kepala Bappeda</p> <p><u>H. PARYANTO, S.Sos.</u> M.T NIP 19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial P3A PPKB</p> <p><u>MARTIN EFENDI, S.Hut.M.M</u> NIP. 19790905 200801 1 018</p>
---	---	---	---

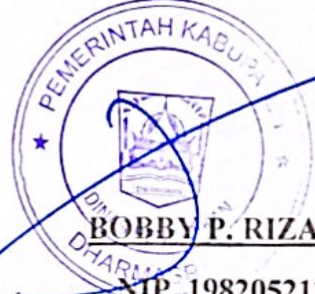
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan PAUD dan PNF Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD dan KESETARAA N Tujuan : terlaksananya bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa	1. Data peserta didik laki-laki dan perempuan di PAUD dan kesetaraan Kabupaten Dharmasraya Laki-laki = 590 siswa, Perempuan = 560 Siswa 2. Jumlah peserta didik PAUD dan kesetaraan laki-laki dan perempuan yang menerima biaya personal (Seragam Sekolah) Laki-laki : 590 siswa, Perempuan : 590 siswa 3. Jumlah peserta didik PAUD dan kesetaraan laki-laki dan perempuan yang menerima biaya personal (Seragam Sekolah)	Akses : Belum semua siswa yang mendapatkan biaya personal (Seragam Sekolah) Partisipasi : - Kontrol : Masyarakat khususnya siswa baru di jenjang pendidikan PAUD Manfaat : -	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pembelajaran dan Kebudayaan, Nomor. 052/ C/ Kep/ D/ 82 "Sekolah secara formal berhak memakai seragam sekolah terhadap siswanya dengan bermacam alasan karena seragam sekolah ialah suatu perlengkapan menciptakan kerapian, ketertiban serta keteraturan siswa dalam - melakukan aktivitas pembelajaran. <u>Seragam sekolah sebagai penghilang kesenjangan antara kelas ekonomi dari siswa yang dari berbagai elemen</u>" 	Belum semua masyarakat menerima seragam sekolah baru	Terlaksananya bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa laki-laki dan perempuan	1. Pendataan dan verifikasi data. 2. Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa	Jumlah peserta didik SD Dan SMP laki-laki dan perempuan yang menerima bantuan perlengkapan sekolah	Input : Rp 287.500.000- Output : Jumlah peserta didik PAUD laki-laki dan perempuan yang tidak mendapatkan bantuan biaya personil (seragam yang menerima bantuan perlengkapan sekolah)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
	Laki-laki : 2267 siswa, Perempuan : 1474 siswa			0				Out Come : Meningkatnya kesejahteraan peserta didik SMP laki-laki dan perempuan



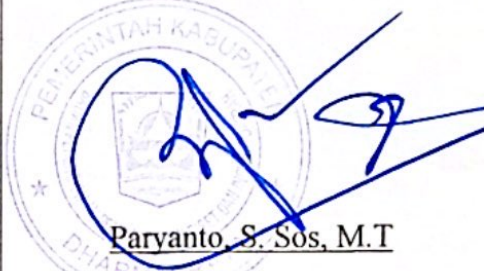

Pulau Punjung,

Juni 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DHARMASRAYA**


BOBBY P. RIZA, S.STP., M.Si
NIP. 198205212000121002

Tim Verifikasi

<p>Inspektur</p>  <p><u>Drs. Andy Sumanto, CfrA</u> NIP 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala BKD</p>  <p><u>Asril, AP, M. Si</u> NIP 19750225 199501 1 001</p>	<p>Kepala BAPPERIDA</p>  <p><u>Paryanto, S. Sos, M.T</u> NIP-19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala DINSOSP3APPK</p>  <p><u>Martin Efendi, S. Hut. M. M</u> NIP. 197909052008011018</p>
--	--	---	--

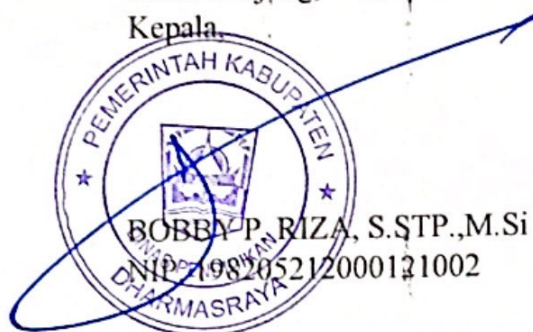
FORM KAK/ TOR

Program		Program Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
Sasaran Program		Siswa Sekolah Dasar
Kegiatan		Pengelolaan Pendidikan Dasar
Sub Kegiatan		Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
	Gambaran Umum	Kabupaten Dharmasraya memiliki Data peserta didik laki-laki dan perempuan di SD Kabupaten Dharmasraya, Laki-laki = 2267 siswa, Perempuan = 1474 siswa. Jumlah peserta didik SD laki-laki dan perempuan yang menerima Biaya Personil (Seragam Sekolah). Laki-laki : 2267 siswa, Perempuan : 1474 siswa
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022
	Indikator Kinerja	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Kabupaten Dharmasraya
	Batasan Kegiatan	Untuk tahun 2024 kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Berdasarkan Permendikbud dikhususkan untuk Sekolah Dasar di Kabupaten Dharmasraya
Maksud dan Tujuan		Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Kabupaten Dharmasraya
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Pengadaan Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Kabupaten Dharmasraya

Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan	Pelaksana : Dinas Pendidikan Sekolah Yang Menerima Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik Sekolah Dasar
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2024
Biaya	Rp 2.451.500.000, -





Pulau Punjung, Juni 2024

Kepala,



BOBBY P. RIZA, S.STP.,M.Si
NIP. 198205212000121002

Tim Verifikasi

<p>Inspektur</p>  <p>Drs. ANDY SUMANTO CfrA NIP 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala BKD</p>  <p>LASRI LAP, M.Si NIP 19750225 199501 1 001</p>	<p>Kepala Bappeda</p>  <p>H. PARYANTO, S.Sos. M.T NIP 19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial P3A PPKB</p>  <p>MARTIN EFENDI, S.Hut.M.M NIP. 19790905 200801 1 018</p>
---	---	--	---

	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama / Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Kabupaten Dharmasraya
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan	Pelaksana : Dinas Pendidikan Sekolah Yang Menerima Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2024
Biaya	Rp 1.648.500.000

Pulau Punjung, Juni 2024

Kepala,


BOBBY P. RIZA, S.STP.,M.Si
NIP. 198205212000121002

Tim Verifikasi

<p>Inspektur</p> <p> Drs. ANDY SUMANTO CfrA NIP 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala BKD</p> <p> ASRIL AP., M.Si NIP 19750225 199501 1 001</p>	<p>Kepala Bappeda</p> <p> H. PARYANTO, S.Sos. M.T NIP 19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial P3A PPKB</p> <p> MARTIN EFENDI, S.Hut.M.M NIP. 19790905 200801 1 018</p>
---	--	---	--

FORM KAK/ TOR

Program		Program Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
Sasaran Program		Siswa Sekolah Dasar
Kegiatan		Pengelolaan Pendidikan Dasar
Sub Kegiatan		Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
	Gambaran Umum	Kabupaten Dharmasraya memiliki Data peserta didik laki-laki dan perempuan di SD Kabupaten Dharmasraya, Laki-laki = 2267 siswa, Perempuan = 1474 siswa. Jumlah peserta didik SD laki-laki dan perempuan yang menerima Biaya Personil (Seragam Sekolah). Laki-laki : 2267 siswa, Perempuan : 1474 siswa
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022
	Indikator Kinerja	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Kabupaten Dharmasraya
	Batasan Kegiatan	Untuk tahun 2024 kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Berdasarkan Permendikbud dikhususkan untuk Sekolah Dasar di Kabupaten Dharmasraya
Maksud dan Tujuan		Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Kabupaten Dharmasraya
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Pengadaan Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Kabupaten Dharmasraya





Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan	Pelaksana : Dinas Pendidikan Sekolah Yang Menerima Penyediaan Biaya Personil Peseta Didik Sekolah Dasar
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2024
Biaya	Rp 2.451.500.000, -

Pulau Punjung, Junj 2024
Kepala,



BOBBY P. RIZA, S.STP.,M.Si
NIP.198205212000121002

Tim Verifikasi

<p>Inspektur</p>  <p>Drs. ANDY SUMANTO CfrA</p> <p>NIP 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala BKD</p>  <p>LASRI AP.,M.Si</p> <p>NIP 19750225 199501 1 001</p>	<p>Kepala Bappeda</p>  <p>H. PARYANTO, S.Sos. M.T</p> <p>NIP 19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial P3A PPKB</p>  <p>MARTIN EFENDI, S.Hut.M.M</p> <p>NIP. 19790905 200801 1 018</p>
--	---	---	--

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
PERSENTASE CAPAIAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA

OPD : Dinas Perhubungan

PROGRAM : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

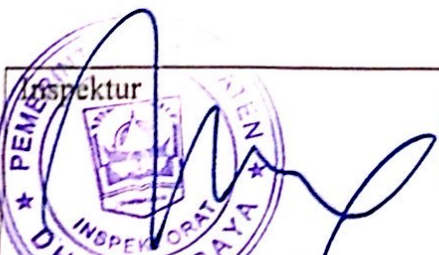


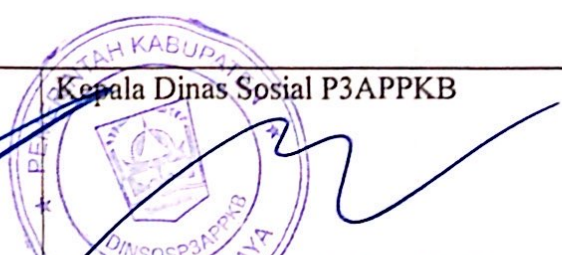
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Program Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Tujuan : Tersedianya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Responsive Gender	<ul style="list-style-type: none"> Belum tersedianya pelataran sarana dan prasarana parkir terpadu khususnya di wilayah Koto Besar (Abai Siat) dengan jumlah populasi penduduk tahun 2019 ada 5.664 jiwa 2.888 laki-laki serta 2776 perempuan (data BPS tahun 2019) Berdasarkan data Jumlah Nagari Di Dacrah Bps Tahun 2019 Kecamatan Koto Besar ada 7 nagari di antaranya abai siat, Bonjol, Koto Besar, Koto Gadang, Koto Laweh, Koto Ranah dan KotoTinggi. Berdasarkan standar SRP (Satuan Ruang Parkir) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk atau sepeda motor) termasuk ruang bebas dan lebar 	Akses : <ul style="list-style-type: none"> Sarana pelataran dan prasarana parkir terpadu belum memenuhi kebutuhan. Partisipasi : <ul style="list-style-type: none"> Kurang nyamannya masyarakat dan Petugas Dishub yag berjaga di Koto Besar (Abai Siat) dalam parkir dan menunggu mobil penumpang dan barang Kontrol : <ul style="list-style-type: none"> Belum diakomodinya kebutuhan pelataran dan sarana dan 	<ul style="list-style-type: none"> Belum terpenuhi nya tempat pelataran dan parkir yang responsif gender dan terpadu bagi masyarakat Koto Besar. Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat tempat parkir. Belum optimalnya koordinasi dengan lintas sektor dan pemuka masyarakat. Masih belum tersedia tempat angkutan barang dan penumpang yang responsif gender. 	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembebasan lahan parkir. Masih rendahnya kesadaran masyarakat (petugas parkir) dalam mengatur ketertiban parkir. 	Pembangunan pelataran dan sarana prasarana parkir yang nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembangunan pelataran sarana dan prasarana parkir terpadu Melakukan pembangunan pelataran sarana dan prasarana parkir angkutan barang dan penumpang Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat tempat parkir. Koordinasi kepada lintas sektor dan pemuka masyarakat tentang pelataran parkir angkutan barang dan penumpang yang responsif gender 	Berdasarkan data dari BPS tahun 2019 tentang jumlah penduduk diwilayah Koto Besar 5.664 jiwa 2.888 laki-laki serta 2776 perempuan belum memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender khususnya untuk pelataran dan tempat parkir bagi kendaraan roda dua, roda empat atau pun angkutan barang dan penumpang.	Input : Berdasarkan kebutuhan dalam pembangunan tersebut maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp.240.000.000 ,- Output : Tersedianya 2 unit (pembangunan pelataran sarana dan prasarana parkir terpadu dan satu unit pelataran sarana dan prasarana parkir angkutan barang dan penumpang. Out Come : Meningkatkan kenyamanan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
	bukaan pintu. Adapun ruang parkir untuk masing-masing jenis kendaraan Menurut Standar Dir.Jend. Bina Marga adalah untuk bus/truk (3,40 x12,50 (m ²) =42,5 m ² ,mobil penumpang 2,50 m ² x2,00 m ² =12,5 m ² dan sepeda motor 0.75x2,00(m ²)=1,5m ² .	prasarana parkir terpadu sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kecamatan Koto Besar Manfaat:-						masyarakat dalam parkir dan menunggu mobil angkutan barang dan penumpang

Gunung Medan, Juni 2024
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DHARMASRAYA**

CATUR EBYANDRI M, S.STP.,M.Si.,
NIP.19770121 199511 1 003

Tim Verifikasi

 Inspektur <u>Drs. Andy Samanto, CfrA</u> NIP 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD <u>Asril, A.P. M. Si</u> NIP 19750225 199501 1 001	 Kepala Bappperida <u>Parvanto, S. Sos. M.T</u> NIP 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial P3APPKB <u>MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M</u> NIP. 19790905 200801 1 018
---	---	---	---

GENDER BUDGET STATEMENT
Persentase Capaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota
(Jumlah Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten Kota Yang Terbangun)

SKPD : Dinas Perhubungan

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		
KODE PROGRAM	2.15.01		
KEGIATAN	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota		
HASIL/ OUTPUT	Tersedianya 2 unit (pembangunan pelataran sarana dan prasarana parkir terpadu dan satu unit pelataran sarana dan prasarana parker angkutan barang dan penumpang)		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Berdasarkan data dari BPS tahun 2019 jumlah populasi penduduk ada 5664 jiwa .2888 laki –laki dan 2776 perempuan. Nagari yang berada di kecamatan koto besar diantaranya: abai siat,bonjol,koto besar,koto gadang,koto laweh,koto ranah dan koto tinggi. Berdasarkan standar SRP (Satuan Ruang Parkir) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk atau sepeda motor) termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu. Adapun ruang parkir untuk masing –masing jenis kendaraan Menurut Standar Dir.Jend. Bina Marga adalah untuk bus/truk (3,40 x12,50 (m²) =42,5 m² ,mobil penumpang 2,50 m² x2,00 m²=12,5 m² dan sepeda motor 0.75x2,00(m²)=1,5m².</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Sarana pelataran dan prasarana parkir terpadu belum memenuhi kebutuhan. ✚ Kurang nyamannya masyarakat dan Petugas Dishub yang berjaga di Koto Besar (Abai Siat) dalam parkir dan menunggu mobil penumpang dan barang. ✚ Belum diakomodinya kebutuhan pelataran dan sarana dan prasarana parkir terpadu sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kecamatan Koto Besar. <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Belum terpenuhi nya tempat pelataran dan parkir yang responsif gender dan terpadu bagi masyarakat Koto Besar. ✚ Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat tempat parkir. ✚ Belum optimalnya koordinasi dengan lintas sektor dan pemuka masyarakat. ✚ Masih belum tersedia tempat angkutan barang dan penumpang yang responsif gender. <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembebasan lahan parkir. ✚ Masih rendahnya kesadaran masyarakat (petugas parkir) dalam mengatur ketertiban parkir. 		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktivitas 1	Melakukan pembangunan pelataran sarana dan prasarana parkir terpadu	
		Tujuan	Pembangunan pelataran dan sarana prasarana tempat parkir yang nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat
	Komponen/ Aktivitas 2	Alokasi Anggaran	
		Melakukan pembangunan pelataran sarana dan prasarana parkir angkutan barang dan penumpang.	
		Tujuan	Pembangunan pelataran dan sarana prasarana tempat parkir yang nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat

		Alokasi Anggaran	
	Total Anggaran	Rp 240.000.000,-	
Capaian Program	Out put Tersedianya 2 unit pembangunan pelataran parkir terpadu dan satu unit pelataran sarana dan prasarana parker angkutan barang dan penumpang. Out come Meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam parker dan menunggu mobil angkutan barang dan penumpang.		

Gunung Medan, Juni 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DHARMASRAYA**



CATUR EBYANDRI M, S.STP., M.Si.,
NIP. 197701211995111003

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppperida	Kepala Dinas Sosial P3APPKB
Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP 196812201990091001	Asril AP, M. Si NIP 197502251995011001	Paryanto, S. Sos. M.T NIP 196906091989021001	MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 197909052008011018

FORM KAK/ TOR



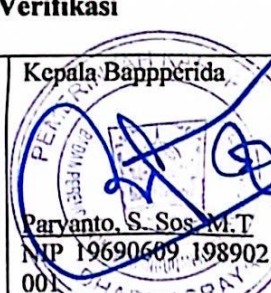

Program		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Sasaran Program		Terlaksananya pembangunan parkir yang responsive gender untuk masyarakat dan petugas dishub.
Kegiatan		Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota
Sub Kegiatan		Jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten kota yang terbangun
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
	Gambaran Umum	Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota belum bias terlaksana sampai tahun ini 2024
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Adanya pembangunan dan pelataran parkir terpadu
	Indikator Kinerja	Terbentuknya pembangunan dan pelataran parkir yang terpadu
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Melakukan pengadaan untuk pembangunan pelataran parkir terpadu
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Koordinasi, Sinkronisasi pelaksanaan pengadaan untuk pembangunan pelataran parkir terpadu
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Abai siat dan sungai rumbai Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp.240.000.000,-

Gunung Medan, Juni 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DHARMASRAYA**

CATUR EBYANDRIM, S.STP.,M.Si.,
 NIP.197701011995111003

Tim Verifikasi

 Inspektur Dr. Andy Sumarto, S.TA NIP.196812201990091001	 Kepala BKD Asri, AP, M. Si NIP.197502251995011001	 Kepala Bappperida Paryanto, S. Sos. M.T NIP.196906091989021001	 Kepala Dinas Sosial P3APPKB MARTIN ERENDI, S. Hut. M. M NIP.197909052008011018
--	--	--	---

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

OPD : Dinas Perbuhungan

PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : • Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /Kota Kegiatan : • Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : • Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Tujuan : • Tersedianya toilet yang	Berdasarkan jumlah ASN 27 orang, CPNS 4 Orang, Honda 3 orang dan THL 173 Maka belum tercukupi untuk ke toilet dengan jumlah orang yang 207 orang dengan 2 toilet yang belum responsif gender. Satu unit dalam keadaan rusak berat dan satu unit dalam keadaan rusak sedang.	Akses : • sarana toilet yg belum memenuhi kebutuhan. • Jarak antara toilet dengan kantor cukup jauh Partisipasi :- Kontrol : Belum diakomodinya kebutuhan toilet sesuai dg jumlah ASN, CPNS, Honda dan THL Manfaat : kurang nyamannya ASN, CPNS, Honda dan THL	Permen PU NO 38 th 2007 tentang "pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pemerintahan daerah kabupaten kota" dan peraturan pemerintah Permen PU no 6 th 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis risiko sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dimana	Masih rendahnya kontribusi anggaran pada Dinas Perhubungan untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.	• Tersedianya toilet yang responsif gender. • Tersedianya toilet yang responsife gender bagi semua lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas.	• Pembuatan unit toilet yang responsif gender. • Mengajukan penambahana anggaran untuk pembangunan toilet yang sesuai dengan responsif gender.	• Jumlah ASN 27 orang, CPNS 4. Orang, Honda 3 orang dan THL 173 Maka belum tercukupi untuk ke toilet dengan jumlah orang yang 207. • Toilet yg ada belum responsife gender. Jumlah toilet ada 2 yg satu unit dalam keadaan rusak berat dan satu unit dalam keadaan rusak sedang.	Input : memberi ruang untuk perempuan /laki-laki mendapatkan toilet yang responsif gender sebanyak 2 banding 3 dengan anggaran yang diusulkan sebesar Rp.220.000.000 ,- /4 unit toilet Output : Tersedianya 4 toilet yg responsife gender. Out Come : Meningkatkan kenyamanan ASN, CPNS, Honda dan THL

responsif gender.			bangunan/ gedung responsive gender.	yg				
----------------------	--	--	--	----	--	--	--	--

Gunung Medan, Juni 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DHARMASRAYA**



CATUR EBYANDRI M, S.STP.,M.Si.,
NIP. 19770121 199511 1 003

Tim Verifikasi



Drs. Andri Sumanto, CfrA
NIP. 19681220 199009 1 001



Kepala BKD
Aeril AP, M. Si
NIP. 19750225 199501 1 001



Kepala Bappperida
Raryanto, S. Sos. M.T
NIP. 19690609 198902 1 001



Kepala Dinas Sosial P3APKB
MARTIN EFENDI, S/Hut. M. M
NIP. 19790905 200801 1 018

GENDER BUDGET STATEMENT

Persentase Capaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota (Jumlah Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten Kota Yang Terbangun)

SKPD : Dinas Perhubungan

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota		
KODE PROGRAM	2.15.01.2.07.11		
KEGIATAN	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		
HASIL/ OUTPUT	Tersedianya 4 toilet yg responsife gender.		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Berdasarkan jumlah ASN 27 orang,CPNS 4 Orang, Honda 3 orang dan THL 173 Maka belum tercukupi untuk ke toilet dengan jumlah orang yang 207 orang dengan 2 toilet yang belum responsif gender. Satu unit dalam keadaan rusak berat dan satu unit dalam keadaan rusak sedang.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none">o sarana toilet yg belum memenuhi kebutuhan.o Jarak antara toilet dengan kantor cukup jauho Belum diakomodinya kebutuhan toilet sesuai dengan jumlah ASN,CPNS,Honda dan THLo kurang nyamannya ASN,CPNS, Honda danTHL dalam penggunaan toilet.		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Tujuan	Tersedianya toilet yang responsif gender.
		Alokasi Anggaran	Rp.200.000.000,-
	Komponen/ Aktifitas 2	Tujuan	
		Alokasi Anggaran	
Total Anggaran	Rp.200.000.000,-		
Capaian Program	Out put: Tersedianya 4 toilet yg responsife gender. Out come : Meningkatkan kenyamanan ASN,CPNS, Honda danTHL dalam penggunaan toilet yang responsive gender.		





Gunung Medan, Juni 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DHARMASRAYA**

CATUR EBYANDRI M, S.STP., M.Si.,
NIP.197701211995111003



Tim Verifikasi

 <p>Inspektur DjAndy Sulianto Citra NIP 19881220 199009 1 001</p>	 <p>Kepala BKD Asri AP. M. Si NIP 19750225 199501 1 001</p>	 <p>Kepala Bappperida Parwanto, S. Sos. M.T NIP 19690609 198902 1 001</p>	 <p>Kepala Dinas Sosial BAPPKB MARTIN EFFENDI, S. Hut. M. M NIP 19790905 200801 1 018</p>
--	--	---	---

FORM KAK/ TOR

Program		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
Sasaran Program		Terlaksananya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Kegiatan		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Sub Kegiatan		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
Latar Belakang	Dasar Hukum	PP No 16 Tahun 2021 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2016 Peraturan pemerintah No 27 Tahun 2014
	Gambaran Umum	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya belum terealisasi tahun 2024
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
	Indikator Kinerja	Terbentuknya toilet yang responsive gender
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Melakukan kegiatan dalam pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Koordinasi, Sinkronisasi pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp.200.000.000,-

Gunung Medan, Juni 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DHARMASRAYA



CATUR EBYANDRI M, S.STP.,M.Si.,
NIP.19770121-199511-1-003

Tim Verifikasi

 Kepala BKD Drs. Asril, M. Si NIP 19750225-199501-1-001	 Kepala Bappperida Paryanto, S. Sos. M.T NIP.19690609-198902-1-001	 Kepala Dinas Sosial P3APKB MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905-200801-1-018
--	---	---

**MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C**

OPD : Dinas Perhubungan

PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

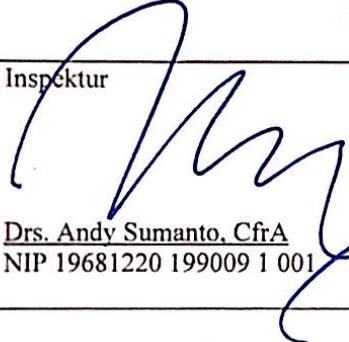

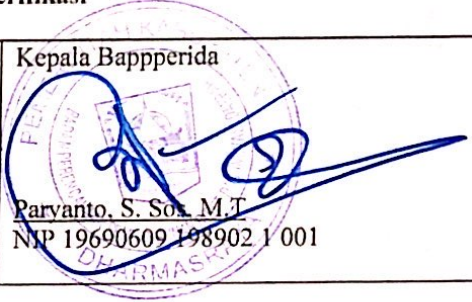

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Kabupaten Dharmasraya Program : sementjak Tahun 2018 Penyelenggara : sampai saat ini 2024 n : Lalu Lintas Dan Angkutan : Jumlah terminal yang dikelola hanya 1 unit terminal. Jalan (LLAJ) : Untuk lokasi terminal. Untuk lokasi hanya berada di pasar pulau punjung kecamatan pulau punjung. Jenis pelayanan yang dilakukan pada terminal mengatur sirkulasi penumpang angkutan umum. Menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan terminal.		Akses : • Peluang akses dalam menggunakan sarana prasarana didalam terminal tidak memadai. Sarana terminal tidak lengkap. • Tidak adanya angkutan umum (angkot) • Belum memiliki tempat duduk ruang tunggu penumpang.	SDM: belum optimalnya pemahaman SDM perihal konsep gender. Belum maksimalnya himbauan tentang kesetaraan gender disertai dengan pengaplikasian atau pemasangan signal/landa/rambu terkait gender. Sarana prasarana kegiatan pengelolaan terminal angkutan umum tipe C di Pulau Punjung belum mengakomodir gender.	Masih adanya anggapan bahwa perempuan hanya mengurus pekerjaan domestic. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi tentang gender pada proses pengelolaan terminal angkutan.	Menyelenggarakan pengelolaan terminal angkutan umum di pulau punjung. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengguna jasa angkutan umum lebih responsive gender.	• Sosialisasi kepada pegawai yang bertugas di terminal dan pengguna angkutan umum. • Berkoordinasi dengan aparaturnya terkait. • Meningkatkan konsultasi dengan tenaga ahli/parkir.	Berdasarkan data BPS tahun 2017-2019 jumlah penduduk untuk pulau punjung kurang lebih ada 50.769 jiwa. Laki laki 24.603 dan perempuan 22.798.	Input :- Output : belum optimal nya penyelenggaraan terminal angkutan umum di pulau punjung dari 2018 sampai 2024. Itu semua karena sarana prasarana yang belum lengkap.
Sub Kegiatan : • Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Tujuan : Tersedianya Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C		Partisipasi :Partisipasi gender L/P tugas pekerjaan lapangan kebanyakan laki – laki. Operator kendaraan angkutan umum didominasi laki-laki.						Out Come : Terciptanya transportasi angkutan umum yang selamat, aman lancar dan terkendali untuk semua jenis kendaraan yang beroperasi di terminal. Pengguna terminal setara gender baik laki-laki maupun perempuan.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
	<p>terminal pelayanannya, penumpang diklasifikasikan kedalam tiga tipe terminal (PP RI No.43 tahun 1993) yaitu Terminal penumpang Tipe C, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES).</p>	<p>Kontrol : Pejabat yang melakukan pengawas terhadap kegiatan pengelolaan terminal angkutan umum didominasi laki-laki.</p> <p>Manfaat : Agar pelaksanaan pekerjaan pengelolaan terminal angkutan umum di pulau punjung belum sesuai dengan proposional gender.</p>						

Gunung Medan, Juni 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DHAKMASRAYA
GATUR EBY ANDI M.S.STP..M.Si.
NIP.197706121199011 1 003
DHAKMASRAYA

Tim Verifikasi

<p>Inspektur</p>  <p><u>Drs. Andy Sumanto, CfrA</u> NIP 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala BKD</p>  <p><u>Asri, AP, M. Si</u> NIP 19750225 199501 1 001</p>	<p>Kepala Bappperida</p>  <p><u>Paryanto, S. Sos. M.T</u> NIP 19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial P3APKB</p>  <p><u>MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M</u> NIP 19790905 200801 1 018</p>
---	---	--	---

GENDER BUDGET STATEMENT

**Persentase Capaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota
(Jumlah Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten Kota Yang Terbangun)**

SKPD : Dinas Perhubungan

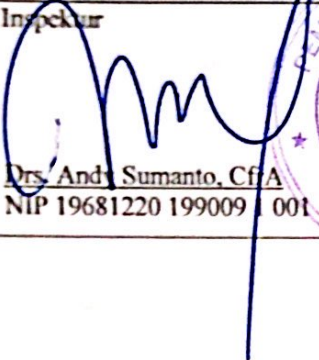

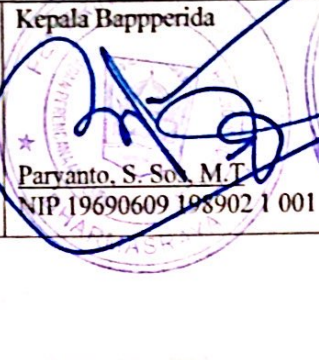

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		
KODE PROGRAM	2.15.02.2.03		
KEGIATAN	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		
HASIL/ OUTPUT	Belum optimal nya penyelenggaraan terminal angkutan umum di pulau punjung dari 2018 sampai 2024. Itu semua karena sarana prasarana yang belum lengkap.		
ANALISA SITUASI	<div><div><div>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</div><div>Kabupaten Dharmasraya semenjak Tahun 2018 sampai saat ini 2024 Jumlah terminal yang dikelola hanya 1 unit terminal. Untuk lokasi hanya berada di pasar pulau punjung kecamatan pulau punjung. Jenis pelayanan yang dilakukan pada terminal mengatur sirkulasi penumpang angkutan umum. Menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan terminal. Berdasarkan UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang hanya membagi berdasarkan kewenangan pengelolaan terminal menjadi tipe A,B dan C. terminal sendiri merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan , menaikkan atau menurunkan orang/ barang serta perpindahan mode angkutan.Fungsi pelayanannya, terminal penumpang diklasifikasikan kedalam tiga tipe terminal (PP RI No.43 tahun 1993) yaitu Terminal penumpang Tipe C, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES).</div></div><div><div>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</div><div><ul style="list-style-type: none">• Peluang akses dalam menggunakan sarana prasarana didalam terminal tidak memadai. Sarana terminal tidak lengkap.• Tidak adanya angkutan umum (angkot)• Belum memiliki tempat duduk ruang tunggu penumpang.• Tempat ibu menyusui tidak ada. Partisipasi gender L/P tugas pekerjaan lapangan kebanyakan laki –laki. Operator kendaraan angkutan umum didomisili laki-laki.• Pejabat yang melakukan pengawas terhadap kegiatan pengelolaan terminal angkutan umum didomisili laki-laki.</div></div></div>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Tujuan	Terbentuknya terminal tipe c yang responsive gender
		Alokasi Anggaran	-
	Komponen/ Aktifitas 2	Tujuan	
		Alokasi Anggaran	
	Total Anggaran	Rp -	
	Capaian Program	<div><div>Out put: belum optimal nya penyelenggaraan terminal angkutan umum di pulau punjung dari 2018 sampai 2024. Itu semua karena sarana prasarana yang belum lengkap.</div><div>Out come: Terciptanya transportasi transportasi angkutan umum yang selamat, aman lancar dan terkendali untuk semua jenid kendaraan yang beroperasi di terminal.</div><div>Pengguna terminal setara gener baik laki-laki maupun perempuan.</div></div>	

Gunung Medan, Juni 2024



Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapperida	Kepala Dinas Sosial PEAPKB
			
<u>Drs. Andy Sumanto, Cf. A.</u> NIP 19681220 199009 1 001	<u>Asri, AP, M. Si</u> NIP 19750225 199501 1 001	<u>Paryanto, S. Sos. M.T.</u> NIP 19690609 198902 1 001	<u>MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M</u> NIP 19790903 200801 1 018

FORM KAK/ TOR

Program		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Sasaran Program		Terlaksananya terminal tipe c yang responsive gender
Kegiatan		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Sub Kegiatan		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
Latar Belakang	Dasar Hukum	Perda No 6 Tahun 2013 UU No 23 Tahun 2014
	Gambaran Umum	Pengadaan terminal tipe c yang responsive gender
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
	Indikator Kinerja	Jumlah rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Adanya terminal tipe c yang responsive gender
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Koordinasi, Sinkronisasi pelaksanaan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang responsive gender
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Pasar Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		-

Gunung Medan, Juni 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DHARMASRAYA**



CATUR EBYANDRI M, S.STP.,M.Si.,
NIP.19770121 199511 1 003

Tim Verifikasi

Inspektur		Kepala BKD	Kepala Rapperida	Kepala Dinas Sosial P3APKB
Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP 19681220 199009 1 001		Asril, AP, M. Si NIP 19750225 199501 1 001	Paryanto, S. Sos, M.I NIP 19690609 198902 1 001	MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p>Program : PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</p> <p>Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Sub Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota</p> <p>Tujuan : Menciptakan masyarakat gemar membaca</p> <p>Sasaran Meningkatkan minat budaya baca masyarakat</p>	<p>✓ Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya mengacu pada Undang- undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan</p> <p>✓ Jumlah kunjungan Perpustakaan daerah dan Puskel Minimal berdasarkan standar nasional 24.000 orang Realisasi tahun 2023 berjumlah 154.042 atau 33,28%</p> <p>✓ Koleksi buku yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemustaka</p> <p>✓ Masih banyaknya Perpustakaan yg belum terkunjungi oleh Perpustakaan Keliling</p> <p>✓ Petugas layanan masih kurang 1 orang (Sopir)</p> <p>✓ Nilai Tingkat Kegemaran Membaca masih rendah di Kab.Dharmasraya.</p>	<p>Akses:</p> <p>✓ Akses utk melayani ke perpustakaan nagari,tbm belum terlayani secara maksimal</p> <p>✓ Informasi keberadaan pusda belum diketahui oleh masyarakat</p> <p>Partisipasi:</p> <p>✓ Kurangnya orang berkunjung ke perpustakaan</p> <p>✓ Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan Perpustakaan daerah.</p> <p>Control:</p> <p>✓ Koleksi buuku yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemustaka</p> <p>✓ Kurangy pengawasan dan evaluasi Dpk</p> <p>Manfaat :</p>	<p>✓ Masih kurangnya Judul/koleksi buku sesuai dengan kebutuhan pemustaka pada Perpustakaan</p> <p>✓ Kurangnya Sosialisasi ke masyarakat tentang keberadaan perpustakaan daerah.</p> <p>✓ Masih kurangy koordinasi dg lintas sektor dan pemuka masyarakat.</p> <p>✓ Masih kurangnya sarana informasi melalui media cetak dan elektonik</p>	<p>✓ Masyarakat masih banyak yang belum merasakan mamfaat keberadaan Perpustakaan keliling.</p> <p>✓ Kurangnya minat baca di tingkat Sekolah dan Masyarakat</p>	<p>Menciptakan masyarakat gemar membaca</p>	<p>✓ Melakukan layanan perpustakaan keliling</p> <p>✓ Meningkatkan Sosialisasi dan pembinaan.</p> <p>✓ Menambah koleksi buku sesuai dengan kebutuhan pemustaka</p> <p>✓ Meningkatkan koordinasi pd lintas sektor dan masyarakat</p> <p>✓ Pengadaan sarana informasi baik cetak maupun eelektronik</p>	<p>✓ Jumlah Kunjungan tahun 2020 67.742 orang</p> <p>✓ Jumlah Kunjungan tahun 2021 202.273 org</p> <p>✓ Jumlah Kunjungan tahun 2022 152.286 orang</p> <p>✓ Jumlah Kunjungan tahun 2023 154.042 orang</p> <p>✓ Jumlah koleksi buku 1.595.873 eksemplar</p> <p>✓ Jumlah kendaraan perpustakaan keliling sebanyak 3</p> <p>✓ Jumlah perpustakaan Sekolah, Nagari , TBM sebanyak 334</p> <p>✓ Jumlah perpustakaan Sekolah ,nagari, TBM yg sdh dikunjungi th 2022 sebanyak 42</p>	<p>Output</p> <p>- Jumlah kunjungan/ pemustaka sekolah, nagari dan TBM tahun 2024 sebanyak 150.000 orang.</p> <p>- Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan tahun 2024,248 layanan</p> <p>Input</p> <p>Target Anggaran tahun 2024 Rp. 150.000.000,-</p> <p>-Outcome</p> <p>Meningkatkan kegemaran membaca di masyarakat</p>

Koto Padang, 20 Juni 2024
Kepala,
(Mukhammad Syukri, S.Pd, SD, MM)
Pembina / IV.a
NIP. 19690111994051008

Tim Verifikasi			
 <p>Inspektur</p> <p><u>Drs. Andy Sumanto, CfrA</u></p> <p>Nip. 196812201990091001</p>	 <p>Kepala BKD</p> <p><u>Asril SRILAP, M.Si</u></p> <p>Nip. 197502251995011001</p>	 <p>Kepala Bappeda</p> <p><u>Paryanto, S.Sos, MT</u></p> <p>Nip. 196906091989021001</p>	 <p>Kepala Dinas Sosial P3A PPKB</p> <p><u>Martin Efendi, HS, Hut., MM</u></p> <p>Nip. 197909052008011018</p>

**GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)**

SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
KODE PROGRAM	2.23.02	
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya mengacu pada Undang- undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ✓ Koleksi buku yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemustaka. ✓ Masih banyaknya Perpustakaan yg belum terkunjungi oleh Perpustakaan Keliling. <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Akses utk melayani ke perpustakaan nagari,tbm belum terlayani secara maksimal ✓ Kurangnya orang berkunjung ke perpustakaan ✓ Koleksi buku yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemustaka <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kurangnya Promosi tentang koleksi buku yang ada di perpustakaan ✓ Masih kurangnya Judul/koleksi buku sesuai dengan kebutuhan pemustaka pada Perpustakaan ✓ Kurangnya Sosialisasi ke masyarakat tentang keberadaan perpustakaan daerah <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Masyarakat masih banyak yang belum merasakan mamfaat keberadaan Perpustakaan keliling. ✓ Kurangnya minat baca di tingkat Sekolah dan Masyarakat. 	
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolak Ukur: Perpustakaan yang dibina</p> <p>2. Indikator dan Target Kinerja : Persentase Perpustakaan yang Dibina / 6,31%</p>	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 129.990.050,- PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Melakukan Layanan perpustakaan keliling
		Masukan Rp59.995.250,-
		Keluaran Jumlah pemustaka sekolah, nagari
		Hasil Meningkatnya pengunjung perpustakaan
	Kegiatan 2	Meningkatkan Sosialisasi dan pembinaan
		Masukan Rp. 39.884.800,-
		Keluaran Perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan dan, Perpustakaan yang terakreditasi
		Hasil Meningkatnya pengunjung perpustakaan

Koto Petaung, 20 Juni 2024
 Kepala
 (Mukhammad Syukri, S.Pd, SD. MM)
 Pembina / IV.a
 NIP. 196909101994031008

Tim Verifikasi			
 Inspektur Drs. Andy Sumarto, Dra Nip.196812201990091001	 Kepala BKD Asril SRIL AP, MSI Nip. 197502251995011001	 Kepala Bappeda Paryanto, S.Sos, MT Nip.196906091989021001	 Kepala Dinas Sosial P3A PPKB Martin Efendi, HS, Hut., MM Nip. 197909052008011018

FORM KAK / TOR

Program		Program Pembinaan Perpustakaan
Sasaran Kegiatan		Meningkatkan minat budaya baca masyarakat melalui Layanan perpustakaan keliling/ outdoor maupun indoor.
Kegiatan		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 2. Peraturan Daerah Nonor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perpustakaan
	Gambaran Umum	Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan adalah mendorong bagaimana peserta didik dan Masyarakat di Nagari tersebut untuk gemar membaca atau membiasakan untuk membaca sehingga membaca akan menjadi budaya bagi siswa dan masyarakat. Kegiatan tersebut di layani dalam bentuk pelaksanaan perpustakaan keliling untuk melayani kebutuhan siswa di sekolah dan Masyarakat di Nagari-Nagari dalam bentuk Buku bacaan .
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Melakukan Layanan Perpustakaan keliling ke SMA/ sederat, SMP/ sederat, TBM dan Nagari di Kab.Dharmasraya
	Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemustaka sekolah, nagari dan TBM./ 154.042 orang 2. Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi/ 248 layanan
	Batasan kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Menciptakan masyarakat gemar membaca dan Menumbuhkembangkan kegemaran membaca melalui berbagai bacaan dan media
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Kegiatan dilaksanakan bulan Januari s/d November 2024 dengan cara melakukan layanan perpustakaan keliling ke sekolah, TBM Nagari di Kab.Dharmasraya dengan target 248 layanan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kab. Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung Jawab kegiatan		Pelaksana : Kabid Perpustakaan Penanggung : Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Jawab
Jadwal		Bulan Januari s/d November 2024
Biaya		Rp. 59.995.250

Koto Padang, 20 Juni 2024
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Mukhamad Syukri, S.Pd, SD. MM
NIP. 19690910 199403 1 008

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PROGRAM : Program Pengelolaan Arsip

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
<p>Program : Pengelolaan Arsip</p> <p>Kegiatan : Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub kegiatan: Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis</p> <p>Tujuan : Mewujudkan Tata Kearsipan yang Baik pada Kelembagaan Pemerintah Daerah</p> <p>Sasaran: Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu</p>	<p>✓ Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip</p> <p>✓ Masih adanya Perangkat Daerah dan Perangkat nagari yang belum mengelola Arsip secara baku</p> <p>✓ Kurangnya pemahaman SDM pengelola kearsipan perangkat daerah tentang pentingnya arsip</p>	<p>Akses:</p> <p>✓ Perangkat Daerah dan Perangkat Nagari masih adanya yang belum melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan NSPK</p> <p>Partisipasi:</p> <p>✓ Tidak tersedianya jabatan fungsional arsiparis di setiap OPD.</p> <p>✓ Petugas pengelola arsip yang tidak berlatar pendidikan kearsipan</p> <p>Control:</p> <p>✓ Data pengelola arsip Perangkat Daerah yang tercantum dalam SK Bupati.</p> <p>✓ Data anjab ABK OPD</p> <p>Manfaat :</p>	<p>Keterbatasan Sarana Prasarana kearsipan</p>	<p>✓ Kurangnya pemahaman SDM pengelola kearsipan perangkat daerah tentang pentingnya arsip.</p> <p>✓ Keterbatasan Sarana Prasarana kearsipan</p> <p>✓ Masih ada perangkat daerah yang belum mengelola arsip sesuai dengan NSPK</p>	<p>Meningkatkan SDM Pengelola/ petugas Kearsipan</p>	<p>✓ Melaksanakan bimtek kearsipan bagi pengelola arsip perangkat daerah</p> <p>✓ Melakukan pembinaan pada petugas kearsipan di Perangkat Daerah</p> <p>✓ Melakukan pengawasan</p>	<p>✓ Persentase Perangkat Daerah yang mengelola 2020 = 39,47%</p> <p>✓ Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku 2021 = 47,37</p> <p>✓ Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara baku tahun 2022 = 57,89%</p> <p>✓ Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara baku tahun 2023 = 68,42%</p>	<p>-Output</p> <p>✓ Jumlah SDM, pengelola arsip Perangkat daerah yang memperoleh bimtek kearsipan/38 orang.</p> <p>✓ Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan/ 30 berkas</p> <p>- Input</p> <p>✓ Anggaran Rp. 88.277.000</p> <p>- Outcome</p> <p>✓ Arsip perangkat daerah terkelola dengan baik</p>



Tim Verifikasi

Inspektur

Andy Sumanto, CfrA
Nip. 19681220 199009 1 001

Kepala BKD

Asril SRIL, AP.,MSi
Nip. 19750225 199501 1 001

Kepala Bapppeda

Paryanto, S.Sos,MT
Nip. 19690609 198902 1 001

Kepala Dinas Sosial P3A PPKB

Martin Efendi, HS,Hut.,MM
Nip. 19790905 200801 1 018

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	Program Pengelolaan Arsip		
KODE PROGRAM	2.24.03		
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) ✓ Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip ✓ Masih adanya Perangkat Daerah dan Perangkat nagari yang belum mengelola Arsip secara baku		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan ✓ Perangkat Daerah dan Perangkat Nagari masih adanya yang belum melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan NSPK ✓ Tidak tersedianya jabatan fungsional arsiparis di setiap OPD. ✓ Data pengelola arsip Perangkat Daerah yang tercantum dalam SK Bupati. b. Penyebab Internal ✓ Keterbatasan Sarana Prasarana kearsipan c. Penyebab Eksternal ✓ Kurangnya pemahaman SDM pengelola kearsipan perangkat daerah tentang pentingnya arsip. ✓ Keterbatasan Sarana Prasoarana kearsipan ✓ Masih ada perangkat daerah yang belum mengelola arsip sesuai dengan NSPK		
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur : Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban.		
	2. Indikator dan Target Kinerja : Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Bimtek Kearsipan dan target kinerja 38 orang		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 147.246.000 Pengelolaan Arsip		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Melaksanakan Bimtek Pengelolaan Kearsipan	
		Masukan	Rp. 88.277.000
		Keluaran	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Bimtek Kearsipan
		Hasil	Meningkatnya SDM pengelola kearsipan
	Kegiatan 2	Melakukan pengawasan	
		Masukan	Rp. 43.029.000
		Keluaran	Terkelolanya arsip OPD
		Hasil	Arsip tertata sesuai dengan aturan yang berlaku
	Kegiatan 3	Melaksanakan Bimtek Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	
		Masukan	Rp. 15.940.000
		Keluaran	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Bimtek JIKN
		Hasil	Meningkatnya SDM dalam peningkatan Digitalisasi Arsip

Koto Padang, 20 Juni 2024


 Kepala,
 (Mukhammad Syakri, S.Pd, SD, MM
 Pemhina IV a
 NIP. 196909101994031008

Tim Verifikasi

 Inspektur Drs. Andy Sumpanto, CfrA Nip. 196812201990091001	 Kepala BKD Asri SRIL, AP, MSI Nip. 197502251995011001	 Kepala Bapppeda Paryanto, S. Sos, MT Nip. 196906091989021001	 Kepala Dinas Sosial P3A PPKB Martin Efendi, HS, Ht, MM Nip. 197909052008011018
--	---	---	--

FORM KAK / TOR

Program		Program Pengelolaan Arsip
Sasaran Kegiatan		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kearsipan melalui Bimbingan Teknis Kearsipan
Kegiatan		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
Latar Belakang	Dasar Hukum	1.Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan 2.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
	Gambaran Umum	Kegiatan Bimbingan Teknis Kearsipan ini adalah membina SDM penyelenggara kearsipan perangkat daerah agar pengelolaan kearsipan dapat terlaksana dengan baik
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Masing masing Perangkat Daerah mengutus 1 (satu) orang peserta untuk mengikuti Bimbingan Tekhnis Kearsipan
	Indikator Kinerja	Jumlah SDM perangkat daerah yang menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan NSPK melalui Bimtek Kearsipan.
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Mewujudnya sistem penyelenggaraan kearsipan daerah sesuai dengan NSPK
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Kegiatan Bimtek dilaksanakan selama 2 (dua) hari yang akan diikuti oleh utusan Perangkat Daerah sebanyak 1 (satu) orang yaitu Pengelola Arsip
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung Jawab kegiatan		Pelaksana : Kabid Penyelenggaraan Kearsipan/PPTK Penanggung : Kepala Dinas Perpustakaan Dan Jawab : Kearsipan
Jadwal		Bulan Juli 2024
Biaya		Rp. 88.277.000

Koto Padang, 20 Juni 2024

Kepala,

 (Mukhammad Syukri, S.Pd, SD. MM)
 Pembina / IV.a
 NIP. 19690910 199403 1 008

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

OPD : Dinas Pertanian

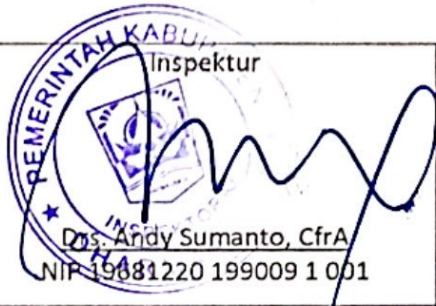
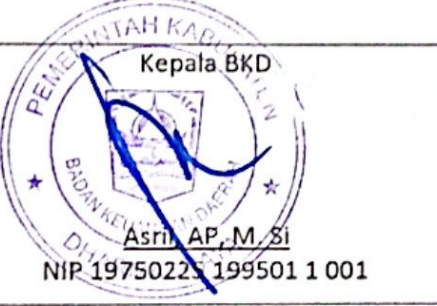

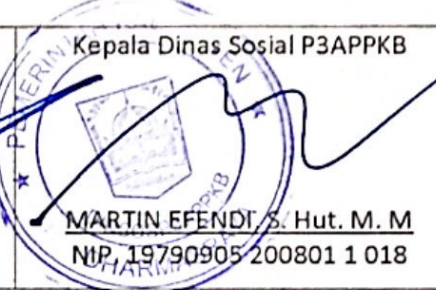
PROGRAM : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Tujuan : Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	Data tahun 2024 - Jumlah kelompok tani di Kabupaten Dharmasraya yaitu 1.516 unit - Jumlah kelompok wanita tani yaitu 289 unit - Komoditi yang dikelola kelompok tani yaitu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan - Komoditi yang dikelola kelompok wanita tani yaitu tanaman pekarangan rumah	Akses : Kaum perempuan kurang mendapat akses yang sama dari kaum laki-laki dalam sector pertanian Partisipasi : Sebagian besar penduduk yang bekerja di bidang pertanian berjenis kelamin laki-laki Kontrol : Kontrol terhadap pelaksanaan pertanian masih didominasi kaum laki-laki Manfaat : Kaum perempuan kurang mendapat manfaat dari pengembangan pertanian	- Kurang tersedianya kegiatan pertanian yang kondusif untuk kaum perempuan - Terbatasnya bantuan sarana dan prasarana	- Stigma masyarakat bahwa pelaku usaha bidang pertanian dominan laki-laki - Stigma masyarakat tenaga kaum laki-laki lebih kuat dari kaum perempuan - Perempuan kurang diberdayakan dalam kegiatan pertanian	Pengembangan dan pemberdayaan kelompok wanita tani (KWT) untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta peran KWT dalam meningkatkan ekonomi keluarga	Penyediaan bibit atau benih tanaman untuk penunjang pemberdayaan kelompok wanita tani serta melakukan pembinaan untuk pengembangan kelompok tani dan kelompok wanita tani	- Jumlah kelompok wanita tani yaitu 289 unit - Bantuan dari APBN berupa P2L(Pekarangan Pangan Lestari) yang diterima oleh 3 kelompok wanita tani pada tahun 2023 - Bantuan bibit, benih, polybag dan pupuk kandang kepada beberapa kelompok wanita tani pada tahun 2023	Input : Anggaran Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman sebesar Rp. 125.000.000,- Output : Pengadaan benih dan bibit tanaman hortikultura serta sarana pendukungnya serta pembinaan untuk pengembangan KWT di Kab. Dharmasraya Out Come : Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman hortikultura serta pemberdayaan kelompok wanita tani dalam sector pertanian

Pulau Punjung, 20 Juni 2024



Tim Verifikasi

			
--	---	--	--

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

SKPD : Dinas Pertanian

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
KODE PROGRAM	3.27.02
KEGIATAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
HASIL/ OUTPUT	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <p>Data tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none">- Jumlah kelompok tani di Kabupaten Dharmasraya yaitu 1.516 unit- Jumlah kelompok wanita tani yaitu 289 unit <p>- Komoditi yang dikelola kelompok tani yaitu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</p> <p>- Komoditi yang dikelola kelompok wanita tani yaitu tanaman pekarangan rumah</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>Akses</u> Kaum perempuan kurang mendapat akses yang sama dari kaum laki-laki dalam sector pertanian- <u>Partisipasi</u> Sebagian besar penduduk yang bekerja di bidang pertanian berjenis kelamin laki-laki- <u>Kontrol</u> Kontrol terhadap pelaksanaan pertanian masih didominasi kaum laki-laki- <u>Manfaat</u> Kaum perempuan kurang mendapat manfaat dari pengembangan pertanian <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none">- Kurang tersedianya kegiatan pertanian yang kondusif untuk kaum perempuan- Terbatasnya bantuan sarana dan prasarana <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none">- Stigma masyarakat bahwa pelaku usaha bidang pertanian dominan laki-laki- Stigma masyarakat tenaga kaum laki-laki lebih kuat dari kaum perempuan- Perempuan kurang diberdayakan dalam kegiatan pertanian




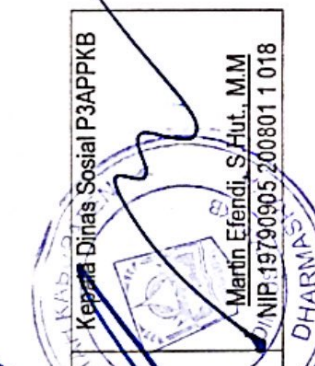
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Penyediaan bibit atau benih tanaman untuk penunjang pemberdayaan kelompok wanita tani serta melakukan pembinaan untuk pengembangan kelompok tani dan kelompok wanita tani
	Tujuan	Pengembangan dan pemberdayaan kelompok wanita tani (KWT) untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta peran KWT dalam meningkatkan ekonomi keluarga
	Alokasi Anggaran	Rp. 125.000.000,-
Total Anggaran		Rp. 125.000.000,-
Capaian Program	Out put	Pengadaan benih dan bibit tanaman hortikultura serta sarana pendukungnya serta pembinaan untuk pengembangan KWT di Kab. Dharmasraya
	Out come	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman hortikultura serta pemberdayaan kelompok wanita tani dalam sector pertanian

Pada: Pujung, 20 Juni 2024

KEPADA DINAS SOSIAL P3APPKB,
KABUPATEN DHARMASRAYA

DARISMAN, S.Si., M.M.
NIP. 19750217 200003 1 001

Tim Verifikasi

 Inspektur Drs. Andy Sumantha, CfrA NIP. 19681210 199009 1 001	 Kepala BKD AP, M/Si NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperda S. Soe M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial P3APPKB Martin Efendi, S.Hut., M.M. NIP. 19790905 200801 1 018
--	--	--	--

FORM KAK/ TOR

Program		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Sasaran Program		Petani
Kegiatan		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan No. 83/KPTS/RC.110/J/10/2020 tentang Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021 Undang-undang No. 4 Tahun 2006 tentang Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian
	Gambaran Umum	Di Kabupaten Dharmasraya terdapat 1.516 unit kelompok tani dan diantaranya sebanyak 289 unit merupakan kelompok wanita tani. Pengembangan dan peningkatan kapasitas kelompok wanita tani dapat dilakukan dengan penyediaan benih/bibit tanaman yang sesuai untuk KWT dan pemanfaat pekarangan seperti benih/bibit komoditas tanaman hortikultura.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Penyediaan bibit atau benih tanaman serta sarana prasarana untuk penunjang pemberdayaan kelompok wanita tani serta melakukan pembinaan untuk pengembangan kelompok tani dan kelompok wanita tani
	Indikator Kinerja	Jumlah bibit/benih tanaman hortikultura yang diserahkan dan terlaksananya pembinaan terhadap kelompok wanita tani
	Batasan Kegiatan	Penyerahan bantuan benih/bibit, Bimbingan Teknis.
Maksud dan Tujuan		Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Melalui penyerahan bantuan bibit/benih tanaman hortikultura serta bimbingan teknis terhadap kelompok wanita tani
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Bidang Hortikultura Dinas Pertanian
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 125.000.000,-

Pulau Punjung, 20 Juni 2024

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN DHARMASRAYA**



FORM KAK/ TOR

Program		Penyuluhan Pertanian
Sasaran Program		Petani dan Penyuluh Pertanian
Kegiatan		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Sub Kegiatan		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 2. Peraturan Menteri Pertanian No. 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Sekolah Lapangan Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian No. 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani
	Gambaran Umum	Di Kabupaten Dharmasraya terdapat 1.516 unit kelompok tani dan diantaranya sebanyak 289 unit merupakan kelompok wanita tani
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pembinaan, pelatihan dan pelaksanaan sekolah lapang bagi kelompok tani dan kelompok wanita tani
	Indikator Kinerja	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi
	Batasan Kegiatan	Pada kegiatan sekolah lapang dilakukan pembinaan, pelatihan terkait pertanian yang pelaksanaannya responsive gender
Maksud dan Tujuan		Peningkatan kapasitas SDM Pertanian laki-laki maupun perempuan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Pelaksanaan sekolah lapang bagi kelompok tani dan kelompok wanita tani
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Bidang Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 150.000.000,-

Pulau Punjung, 20 Juni 2024

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN DHARMASRAYA**



DARISMAN, S.Si., M.M

NIP. 19750217 200003 1 001

RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Pelaksanaan pelatihan pembinaan kelompok tani dan kelompok wanita tani dalam bentuk sekolah lapang yang responsive gender	
		Tujuan	Peningkatan kapasitas SDM Pertanian baik laki-laki maupun perempuan
		Alokasi Anggaran	Rp 150.000.000,-
	Total Anggaran	Rp 150.000.000,-	
Capaian Program	Out put Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi Out come Peningkatan kapasitas SDM pertanian baik laki-laki maupun perempuan		

Pulau Punjung, 20 Juni 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN,
KABUPATEN DHARMASRAYA



DARISMAN, S.Si., M.M

NIP. 19750217 200003 1 001

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapperda	Kepala Dinas Sosial P3APKB
Drs. Andy Sumanto, CfrA	Asli AP, M.Si	Paryanto, S. Sos. M.T	Martin Efendi, S.Hut., M.M
NIP. 1968 1220 199009 1 001	NIP. 19750225 199501 1 001	NIP. 19690609 198902 1 001	NIP. 19790905 200801 1 018

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

SKPD : Dinas Pertanian

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Penyuluhan Pertanian
KODE PROGRAM	3.27.07
KEGIATAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
HASIL/ OUTPUT	Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana Penyuluh Pertanian
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Data tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none">- Jumlah kelompok tani di Kabupaten Dharmasraya yaitu 1.516 unit- Jumlah kelompok wanita tani yaitu 289 unit- Pembinaan kelompok tani berupa sekolah lapang dilaksanakan pada 2 kelompok tani dengan komoditi tanaman pangan (padi) <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>Akses</u> Kaum perempuan kurang mendapat akses yang sama dari kaum laki-laki dalam sektor pertanian- <u>Partisipasi</u> Sebagian besar pelaku usaha di sektor pertanian berjenis kelamin laki-laki- <u>Kontrol</u> Kontrol terhadap pertanian masih didominasi kaum laki-laki- <u>Manfaat</u> Kaum perempuan kurang mendapat manfaat dari pengembangan pertanian <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none">- Kurangnya media pembelajaran dalam rangka meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan dalam sektor pertanian- Peserta kegiatan sekolah lapang yang dilaksanakan masih di dominasi oleh kaum laki-laki <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none">- Stigma masyarakat bahwa kelompok tani dominan laki-laki- Tenaga kaum laki-laki lebih kuat dari perempuan dalam persepsi masyarakat

Pulau Punjung, 20 Juni 2024



Tim Verifikasi

<p>Inspektur</p> <p>Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala BKD</p> <p>Asri, AP, M. Si NIP. 19750225 199501 1 001</p>	<p>Kepala Bapperida</p> <p>Paryanto, S. Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial P3APKB</p> <p>MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018</p>
--	---	---	---

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DPD : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

PROGRAM : Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Tujuan : Meningkatnya peran pemuda dan olahraga dalam mewujudkan masyarakat sehat dan berprestasi	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan - Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional. - Olahraga kerap dipandang sebagai dunianya kaum laki-laki. - pemahaman masyarakat tentang kaum perempuan dan olahraga cukup beralasan, terutama jika dikaitkan dengan tolehan sejarah masa lampau kebudayaan Indonesia secara umum. Makna tersebut berimplikasi pada persepsi masyarakat tentang kaum perempuan, terutama ketika dikaitkan dengan upaya menggali potensi untuk meraih prestasi dalam olahraga yang membutuhkan keperkasaan, kekuatan, dan kemandirian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Akses : Hanya beberapa Cabor olahraga yang diminati kaum/atlet Perempuan - Partisipasi : Kurangnya Minat Masyarakat Khususnya atlet Perempuan dalam mengikuti kejuaraan olahraga - Kontrol : Belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas terkait keikutsertaan atlet perempuan dalam kejuaraan - Manfaat : 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kegiatan Olahraga belum responsive gender - Kurangnya Cabang Olahraga yang bisa di ikuti perempuan - Dukungan peralatan dan perlengkapan Olahraga yang belum merata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya Tingkat Kesadaran masyarakat khususnya perempuan dalam Berolahraga - Kurangnya Dukungan Masyarakat dan Dunia Usaha Terhadap Pengembangan Olahraga dan Hanya Bergantung Pada Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran pemuda dan olahraga dalam mewujudkan masyarakat sehat dan berprestasi dengan menambah jumlah cabang olahraga yang dibina (yang responsive gender) sehingga meningkatkan jumlah Atlet perempuan yang berprestasi di event – event daerah dan nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan dan Seleksi Atlit Daerah yang responsive gender - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten Kota yang responsive gender - Pemberian Penghargaan kepada Atlet olahraga yang berprestasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah cabang olahraga yang Aktif Bisa tercapai : 25 cabor - Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi : 15 cabor - Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional : 4 Cabor - Jumlah pelatih bersertifikat : 20 Orang. - Atlet yang mengikuti kejurnas tahun 2022. Laki-laki = 60 orang Perempuan = 10 orang 	Input : Target anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Rp. 250.000.000,- Output : Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Outcome : Meningkatnya Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah ,Provinsi ,Nasional (yang responsive gender)

	<p>Atlet yang mengikuti Kejuaraan Nasional tahun 2022. Laki-laki = 60 orang Perempuan = 10 orang</p> <p>Atlet yang mengikuti Kejuaraan Nasional tahun 2023. Laki-laki = 24 orang Perempuan = 5 orang</p>						<p>- Atlet yang mengikuti Kejuaraan Nasional tahun 2023. Laki-laki = 24 orang Perempuan = 5 orang</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Pulau Punjung, Juni 2024
Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga



H. ST. M. TAUFIK, SE. MM
NIP. 19640815 198911 1 001

TIM VERIFIKASI

<p>INSPEKTUR</p> <p>Drs. ANDY SEMANTO, C.FrA NIP. 19631220 199009 1 001</p>	<p>KEPALA BKD</p> <p>ASRI, AP. M.Si NIP. 19750225 199501 1 001</p>	<p>KEPALA BAPPPEDA</p> <p>PARYANTO, S.Sos., MT NIP. 19690609 198902 1 001</p>	<p>KEPALA DINSOSP3APPKB</p> <p>MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 19790905 200801 1 018</p>
---	--	---	--

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)


SKPD : DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN : 2024
ANGGARAN

PROGRAM	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan		
KODE PROGRAM	2.19.03		
KEGIATAN	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.		
SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan - Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional. - Olahraga kerap dipandang sebagai dunianya kaum laki-laki - Pemahaman masyarakat tentang kaum perempuan dan olahraga cukup beralasan, terutama jika dikaitkan dengan tolehan sejarah masa lampau kebudayaan Indonesia secara umum. <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hanya beberapa Cabang olahraga yang diminati atlet Perempuan sehingga sedikit peluang gender untuk bersaing. - Kurangnya Minat Masyarakat Khususnya atlet Perempuan dalam mengikuti kejuaraan olahraga. <p>b. Penyebab internal .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kegiatan Olahraga belum responsive gender - Kurangnya Cabang Olahraga yang bisa di ikuti perempuan. <p>c. Penyebab Eksternal .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya Tingkat Kesadaran masyarakat khususnya perempuan dalam Berolahraga. - Kurangnya Dukungan Masyarakat dan Dunia Usaha Terhadap Pengembangan Olahraga dan Hanya Bergantung Pada Pemerintah. 		
CAPAIAN PROGRAM	Tolok Ukur: Cabang olahraga yang berprestasi di tingkat Kab, Provinsi dan Nasional.		
	<p>Indikator dan Target Kinerja</p> <p>Output : Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota target 5 kegiatan Jumlah Atlet dan Cabang olahraga yang berprestasi ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional senyak 10 orang.</p> <p>Outcome : Meningkatnya Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah ,Provinsi ,Nasional 80%</p>		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Pemilihan dan Seleksi Atlet Daerah yang responsive gender	
		Masukan	Rp 90.000.000,-
		Keluaran	Terpilihnnya altet olahraga yang responsive gender
		Hasil	Tercapainya atlet olahraga yang berprestasi
	Kegiatan 2	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten yang responsive gender	
		Masukan	Rp 90.000.000,-
		Keluaran	Jumlah atlet olahraga yang dilakukan pembinaan
		Hasil	Tercapainya atlet olahraga yang berprestasi yang responsive gender


Pulau Pinang, Juni 2023
Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga

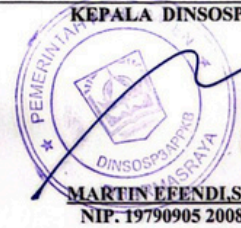

H. ST. M. TAUFIK, SE. MM
NIP. 19640815 198911 1 001

TIM VERIFIKASI


Dr. ANDY SEMANTO, C.FrA
NIP. 19641220 199009 1 001


ASRI, AP. M.Si
NIP. 19750225 199501 1 001


PARYANTO, S.Sos., MT
NIP. 19690609 198902 1 001


MARTIN EFENDI, S.Hut. MM
NIP. 19790905 200801 1 018

KAK/ TOR

Program		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
Sasaran Program		Meningkatkan pemasyarakatan olahraga dan prestasi olahraga
Kegiatan		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang system Keolahragaan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan ;
	Gambaran Umum	<p>Dalam Kegiatan bidang Olahraga yang menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi ,pembudayaan olahraga di masyarakat selain berdampak langsung terhadap kesehatan juga dapat menimbulkan bibit-bibit atlet berprestasi yang akan mengharumkan nama kabupaten Dharmasraya di Tingkat daerah maupun Tingkat Nasional dengan Prestasi Olahraganya.</p> <p>Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan juga didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Budparpora, diharapkan bisa menjadi pendorong pembudayaan olahraga dikalangan masyarakat umum agar tercapainya peningkatan pada pembudayaan olahraga serta prestasi olahraga di Kabupaten Dharmasraya.</p>
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Melaksanakan kegiatan Pemilihan dan Seleksi Atlit Daerah yang responsive gender dan Melakukan pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi
	Indikator Kinerja	1. Jumlah Cabang olahraga yang berprestasi 2. Jumlah Pemuda dan kepemudaan yang berprestasi
	Batasan Kegiatan	Januari s/d Desember 2024
Maksud dan Tujuan		✓ Mengkatkan peran pemuda dan olahraga dalam mewujudkan masyarakat sehat dan berprestasi.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		- Melaksanakan kegiatan Pemilihan dan Seleksi Atlit Daerah yang responsive gender. - Melakukan pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten yang responsive gende. - Pemberian Penghargaan Olahraga kepada atlet yang berprestasi. -
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Dinas Kebudayaan, Pariwisata ,Pemuda dan Olahraga
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 250.0000.000,-

Pulau Punjung, Juni 2024

**KEPALA DNAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN,
KABUPATEN DHARMASRAYA**



H. ST. M TAUFIK, SE. MM
NIP. 19640815 198911 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

PROGRAM : Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif



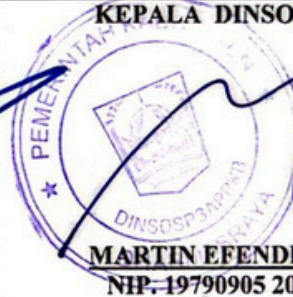
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreati Tujuan : Meningkatkan pendapatan masyarakat di bidang pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kabupaten Dharma Raya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2018-2025; - Masih rendahnya SDM pelaku ekonomi kreatif. - Menambah Usaha Keluarga. - Jumlah Pelaku ekonomi kreatif tahun 2024 sebanyak 50.orang - Laki laki 27 Org - Perempuan 23 org 	<ul style="list-style-type: none"> - Akses : - Informasi Keberadaan tempat usaha pelaku ekonomi kreatif belum banyak diketahui orang. - Sarana dan prasarana pelaku ekonomi kreatif belum memadai. - Partisipasi : - Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pelaku ekonomi kreatif . - Kontrol : - Kurangnya pengawasan dan evaluasi dari Dinas Budparpora - Manfaat : 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif belum responsive gender - Dukungan Sarana prasarana pelaku ekonomi kreatif belum memadai. - Lebih banyak peserta perempuan dibandingkan laki-laki dikarenakan perempuan lebih teliti dan sabar dalam menenun. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat masih banyak yang belum merasakan mamfaat dari pelaku ekonomi kreatif . - Kurangnya Dukungan Masyarakat dalam Dunia Usaha ekonomi kreatif - Adanya anggapan masyarakat bahwa laki-laki tabah dalam menenun, karena pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pendapatan pelaku ekonomi kreatif /masyarakat. - Dengan menenun dapat menambah keuangan keluarga - Bertambah wawasan dalam menentukan motif tenunan sehingga motif tenunan yang bagus dapat diterima masyarakat. - Melatih kesabaran dan ketelitian dalam menenun bagi peserta tenun. - Dapat mengundang wisatawan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kegiatan/pelatihan pada pelaku ekonomi kreatif yang responsive gender - Pengadaan sarana dan prasarana pelaku ekonomi kreatif - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pelaku ekonomi kreatif tentang mamfaat kegiatan ekonomi kreatif - Meningkatkan koordinasi pada lintas sector dan masyarakat - Mengikut sertakan laki-laki dalam pelatihan songket - Monitoring Evaluasi terhadap pelaku ekonomi kreatif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pelaku ekonomi kreatif tahun 2022 sebanyak 20.orang. - Laki laki 9 Org - Perempuan 11 Org - Jumlah Pelaku ekonomi kreatif tahun 2023 sebanyak 36 .orang - Laki laki 14 Org - Perempuan 22org - Jumlah Pelaku ekonomi kreatif tahun 2024 sebanyak 50.orang - Laki laki 27 Org - Perempuan 23 org 	Input : Target anggaran untuk pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan tenunan songket Rp. 38.780.000,- - Ekonomi kreatif Rp. 226.828.000 Output : Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Outcome : Peningkatan Jumlah devisa sektor pariwisata.

Pulan Punjung, Juni 2024
Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga



H. ST. M TAUFIK, SE. MM
NIP. 19640815 198911 1 001

TIM VERIFIKASI

 <p>INSPEKTUR <u>Drs. ANDY SUMANTO, CF-A</u> NIP. 19681220 199009 1 001</p>	 <p>KEPALA BKD <u>ASRI, AP. M.Si</u> NIP. 19750225 199501 1 001</p>	 <p>KEPALA BAPPEDA <u>PARYANTO, S.Sos., MT</u> NIP. 19690609 198902 1 001</p>	 <p>KEPALA DINSOSP3APPKB <u>MARTIN EFENDI, S.Hut. MM</u> NIP. 19790905 200801 1 018</p>
---	---	---	---

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(*GENDER BUDGET STATEMENT*)

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		
KODE ROGRAM	2.26.05		
KEGIATAN SUB KEG.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2018-2025; - Masih rendahnya SDM pelaku ekononomi kreatif. - Jumlah Pelaku ekonomi keatif tahun 2024 sebanyak 50.orang Laki laki 27 Org Perempuan 23 org <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi Keberadaan tempat usaha pelaku ekonomi kreatif belum banyak diketahui orang/ masyarakat. - Sarana dan prasarana pelaku ekonomi kreatif belum memadai. - Masih banyak asyarakat yang belum mengetahui tentang pelaku ekonomi kreatif - Kurangnya pengawasan dan evaluasi dari Dinas Budparpora. <p>b. Penyebab Internal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif belum responsive gender - Dukungan Sarana prasarana pelaku ekonomi kreatif belum memadai. <p>c. Penyebab Eksternal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat masih banyak yang belum merasakan mamfaat dari pelaku ekonomi kreatif . - Kurangnya Dukungan Masyarakat dalam Dunia Usaha ekonomi keatif. - Adanya anggapan masyarakat bahwa laki-laki tabah dalam menenun, kareana pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh perempuan 		
CAPAIAN PROGRAM	<p>Tolok Ukur :</p> <p>Indikator dan Target Kinerja</p> <p>Output : Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.</p> <p>Outcome : Peningkatan Jumlah devisa sektor pariwisata. Target 100%</p>		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Melaksanakan Pelatihan pada pelaku ekonomi kreatif	
		Masukan	Rp 150.000.000
		Keluaran	Jumlah pelaku ekonomi kreatif sebanyak 50 orang
		Hasil	Meningkatnya SDM pelaku ekonomi kreatif

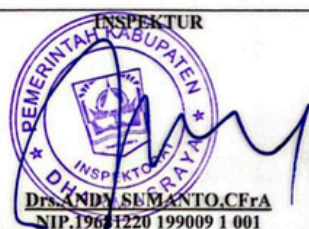
	Kegiatan 2	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaku ekonomi kreatif	
		Masukan	Rp 150.000.000,-
		Keluaran	Laporan monitoring dan evaluasi Kegiatan para pelaku ekonomi kreatif
		Hasil	Meningkatnya Pendapatan para pelaku ekonomi kreatif

Pulau Pinang, Juni 2024
Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga



H. ST. M. TAUFIK, SE. MM
NIP. 19640815 198911 1 001

TIM VERIFIKASI



Drs. ANDY SEMANTO, CFrA
NIP. 19631220 199009 1 001



ASRI, AP. M. SI
NIP. 19750225 199501 1 001



PARYANTO, S. Sos., MT
NIP. 19690609 198902 1 001



MARTIN EFENDI, S. Hut., MM
NIP. 19790905 200801 1 018

KAK/ TOR

Program		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Sasaran Program		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Kegiatan		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasa
Sub Kegiatan		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreati
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Tahun 2018-2025;
	Gambaran Umum	Melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Kegiatan	Uraian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pelatihan pada pelaku ekonomi kreatif yang responsive gender. - Pengadaan sarana dan prasarana serta kebutuhan dari pelaku ekonomi kreatif - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pelaku ekonomi kreatif tentang arti mamfaat dari kegiatan ekonomi kreatif - Meningkatkan koordinasi pada lintas sector dan masyarakat - Melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaku ekonomi
	Indikator Kinerja	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
	Batasan Kegiatan	Januari s/d Desember 2025
Maksud dan Tujuan		Membentuk pengembangan dari konsep ekonomi dengan penambahan kreativitas serta mengasah dasar yang ada pada masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat di dalam Bidang Pariwisata.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaku ekonomi kreatif yang akan dibina - Mempersiapkan bahan serta kebutuhan yang diperlukan dalam melaksanakan suatu kegiatan. -
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Dharmasraya

Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata ,Pemuda dan Olahraga
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2024
Biaya	Rp. 300.000.000,-

Pulau Punjung, Juni 2024

**KEPALA DNAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA**




H. ST. M TAUFIK, SE. MM
NIP. 19640815-198911 1 001

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Mengatasi Kesenjangan Gender Yang Terjadi

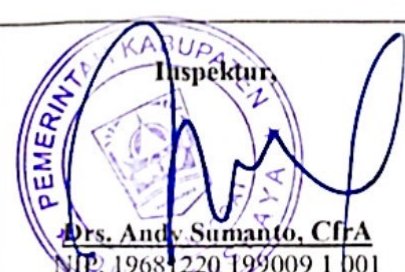



OPD : Inspektorat Kabupaten
PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
TAHUN : 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program : Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tujuan : Agar Diklat Dapat diikuti Oleh APIP sesuai kebutuhan organisasi sekalius mempertim bangkan kesempatan yang sama antara laki- laki dan perempuan	Data Pembuka Wawasan -jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 27 orang yang terdiri dari 12 laki-laki dan 15 perempuan - Jumlah APIP dengan latar belakang pendidikan teknik sipil sebanyak 2 Orang dan non teknik sipil sebanyak 25 orang	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
		- Akses : diklat yang dilaksanakan pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari 2 hari dengan lokasi pelaksanaan diklat yang jauh dari Daerah Kabupaten Dharmasraya sehingga menyulitkan bagi APIP terutama karena harus meninggalkan keluarga terutama yang hamil atau ibu menyusui - Tidak semua APIP dapat melakukan pekerjaan pemeriksaan terutama untuk kegiatan fisik konstruksi di lapangan sehingga yang bisa melakukan secara	- Peran ganda APIP perempuan yang bekerja di kantor dan bekerja sebagai ibu rumah tangga - Adanya perbedaan dalam latar belakang pendidikan dan kemampuan	Lokasi penyelenggara an diklat yang jauh dari Kabupaten Dharmasraya dan jangka waktu pelaksanaan yang relative lama	Pelaksanaan diklat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan keikutsertaan laki-laki dan perempuan dengan mempertimban gkan lamanya diklat serta lokasi pelaksanaan diklat	Memetakan diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sehingga diklat yang akan diikuti telah memperhatika n pemerataan kesempatan dalam memperoleh pengetahuan serta memperhatika n lama pelaksanaan diklat serta lokasi dilaksanakann ya diklat tersebut	-Jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 27 orang yang terdiri dari 12 laki-laki dan 15 perempuan - Jumlah APIP dengan latar belakang pendidikan teknik sipil sebanyak 2 Orang dan non teknik sipil sebnyak 25 orang	Output : Diikutinya diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sesuai kebutuhan organisasi. Outcome : Semua APIP mampu melaksanakan pengawasan sesuai program/kegiatan yang ada.

	profesional adalah APIP dengan latar belakang pendidikan teknik sipil, dimana yang berlatarbelakang pendidikan teknik sipil sangat kecil, sedangkan semua APIP dituntut dapat bekerja pada semua bidang/program/kegiatan					
--	--	--	--	--	--	--

Pada tanggal, Juni 2024
INSPEKTUR
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Drs. Andy Sumanto, CFA
 NIP. 19681220 199009 1 001

TIM VERIFIKASI


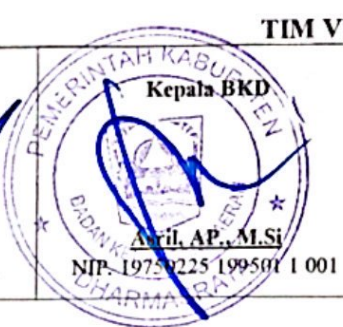

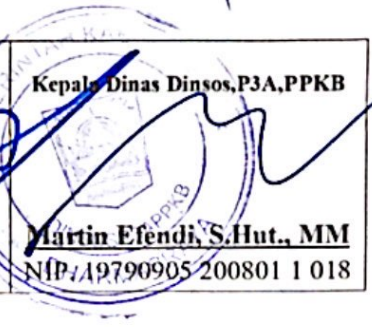
 Inspektur, Drs. Andy Sumanto, CFA NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD Asril, AP., M.Si NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapppeda Paryanto, S.Sos., MT NIP. 19690509 198902 1 001	 Kepala Dinas Dinsos, P3A, PPKB Martin Efendi, S.Hut., MM NIP. 19790905 200801 1 018
--	--	---	---

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)		
SKPD	: Inspektorat Kabupaten	
TAHUN ANGGARAN	: 2024	
PROGRAM	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
KODE PROGRAM	6.01.01	
KEGIATAN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
HASIL/OUTPUT	Pelaksanaan diklat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan keikutsertaan laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan lamanya diklat serta lokasi pelaksanaan diklat	
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 27 orang yang terdiri dari 12 laki-laki dan 15 perempuan. - Jumlah APIP dengan latar belakang pendidikan teknik sipil sebanyak 2 Orang dan non teknik sipil sebanyak 25 orang. <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses : diklat yang dilaksanakan pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari 2 hari dengan lokasi pelaksanaan diklat yang jauh dari Daerah Kabupaten Dharmasraya sehingga menyulitkan bagi APIP terutama yang perempuan karena harus meninggalkan keluarga terutama yang hamil atau ibu menyusui - Tidak semua APIP dapat melakukan pekerjaan pemeriksaan terutama untuk kegiatan fisik konstruksi di lapangan sehingga yang bisa melakukan secara profesional adalah APIP dengan latar belakang pendidikan teknik sipil, dimana yang berlatarbelakang pendidikan teknik sipil sangat kecil, sedangkan semua APIP dituntut dapat bekerja pada semua bidang/program/kegiatan <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peran ganda APIP perempuan yang bekerja di kantor dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. - Adanya perbedaan dalam latar belakang pendidikan dan kemampuan. <p>c. Penyebab Eksternal</p> <p>Lokasi penyelenggaraan diklat yang jauh dari Kabupaten Dharmasraya dan jangka waktu pelaksanaan yang relative lama.</p>	
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktivitas 1	Memetakan diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sehingga diklat yang akan diikuti telah

		memperhatikan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pengetahuan serta memperhatikan lama pelaksanaan diklat serta lokasi dilaksanakannya diklat tersebut	
		Tujuan	Agar Diklat Dapat diikuti Oleh APIP sesuai kebutuhan organisasi sekaligus mempertimbangkan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan
		Alokasi Anggaran	
	Total anggaran		Rp. 663.460.600,-
CAPAIAN PROGRAM	<p>Output : Diikutinya diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sesuai kebutuhan organisasi.</p> <p>Outcome : Semua APIP mampu melaksanakan pengawasan sesuai program/ kegiatan yang ada.</p>		

Pulau Junjung, Juni 2024
**INSPEKTUR
KABUPATEN
DHARMASRAYA,**
Drs. Andy Sumanto, CfrA
NIP. 19681220 199009 1 001

TIM VERIFIKASI

 Inspektur, <u>Drs. Andy Sumanto, CfrA</u> NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD <u>April, AP., M.Si</u> NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala BAPPERIDA <u>Paryanto, S.Sos., MT</u> NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Dinsos, P3A, PPKB <u>Martin Efendi, S.Hut., MM</u> NIP. 19790905 200801 1 018
--	---	--	--

KAK/ TOR

Program		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Program		Terlaksananya Urysan Pemrintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sub Kegiatan		
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Nomor PER 1274/K/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Dilingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
	Gambaran Umum	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur yang dapat diikuti oleh seluruh APIP sesuai kebutuhan fungsionalnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Meliputi Kegiatan pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawas intern pemerintah melaui pendidikan dan pelatihan baik fungsional maupun pelatihan teknis, bimbingan teknis, seminar, lokakarya dan konferensi
	Indikator Kinerja	Memiliki auditor/PPUPD yang memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundng-undangan yang berlaku
	Batasan Kegiatan	Kegiatan diklat penjenjangan dan peningkatan kapabilitas APIP sesuai dengan jadwal diklat yang diterbitkan
Maksud dan Tujuan		1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, dan sikap professional dengan dilandasi keribadian dan etika agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara professional, efisien dan efektif serta sesuai dengan peraturan perunang-undanga; 2. Menentukan kelayakan dalam memenuhi syarat kompetensi APIP; 3. Pengembangan profesi APIP
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Melakukan analisa rencana kebutuhan diklat penjenjangan jabatan fungsional Auditor/PPUPD dan peningkatan kapabilitas APIP dengan menganalisa peta kompetensi ASN 2. Mengumpulkan data dan persyaratan pendaftaran diklat 3. Mengajukan surat usulan peserta diklat
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Badan Penyelenggaran Diklat (BPKP dan BKPSDM Kemendagri)
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Penanggung Jawab : Inspektur
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2024
Biaya		Rp. 663.460.600,-

Pulau Pinang, Juni 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN DHARMASRAYA,

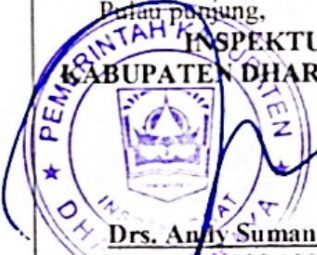

Drs. Andy Sumanto, CFErA
NIP. 19681220 199009 1 001

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Mengatasi Kesenjangan Gender Yang Terjadi




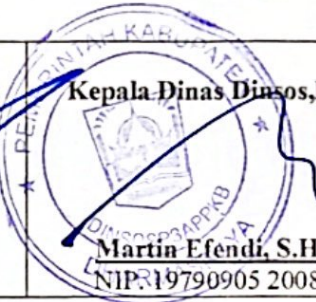
OPD : Inspektorat Kabupaten
PROGRAM : Penyelenggaraan Pengawasan Internal
TAHUN : 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program : Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kegiatan: Pengawasan Kuangan Pemerintah Daerah Tujuan : Agar Terlaksananya a Pengawasan Internal dalam Rangka Pencapaian PKPT dengan mempertimbangkan Proporsi Anggota Tim yang Laki-laki dan Perempuan	jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 27 orang yang terdiri dari 12 laki-laki dan 15 perempuan	Akses : Pengawasan yang dilaksanakan pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari 5 hari dengan lokasi pelaksanaan yang jauh dari Kantor Inspektorat ke seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya sehingga menyulitkan bagi Anggota Tim terutama yang perempuan karena harus melakukan pengawasan untuk kegiatan cek fisik ke lapangan dengan jarak yang jauh dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilalui kendaraan roda empat ataupun roda dua terlebih bagi perempuan yang hamil dan menyusui	Peran ganda APIP perempuan yang bekerja di kantor dan bekerja sebagai ibu rumah tangga Adanya perbedaan dalam proporsi pemeriksaan antara Anggota Tim Laki-laki dan Perempuan	Lokasi pemeriksaan yang jauh dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilalui kendaraan roda empat ataupun roda dua dari Kantor Inspektorat Kabupaten Dharmasraya	Pelaksanaan pemeriksaan disesuaikan dengan proporsi laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan jarak dan lokasi pemeriksaan	Memetakan pemeriksaan yang telah ditetapkan berdasarkan surat tugas sehingga pemeriksaan yang akan diikuti telah memperhatikan anggota Tim laki-laki dan perempuan mengenai jarak dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilalui kendaraan roda empat ataupun roda dua	jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 27 orang yang terdiri dari 12 laki-laki dan 15 perempuan	Output : Diikutinya pengawasan yang telah ditetapkan berdasarkan surat tugas Outcome : Semua Anggota Tim dapat melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan dengan memperhatikan proporsi laki-laki dan perempuan dan kondisi jalan dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilalui kendaraan roda empat ataupun roda dua

		<p>- Tidak semua Anggota Tim dapat melakukan pekerjaan pemeriksaan seperti ibu hamil, terutama untuk kegiatan fisik karena kondisi dari Kantor Inspektorat ke wilayah pemeriksaan di seluruh Kabupaten Dharmasraya jalan menuju lokasi pemeriksaan/ cek fisik yang susah dilalui kendaraan roda empat ataupun roda dua sedangkan semua APIP dituntut dapat melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pulau pinang, Juni 2024
INSPEKTUR
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Drs. Andy Sumanto, CFA
 NIP. 19681220 199009 1 001

TIM VERIFIKASI

 <p>Inspektur, <u>Drs. Andy Sumanto, CfrA</u> NIP. 19681220 199009 1 001</p>	 <p>Kepala BKD <u>Asri, AP., M.Si</u> NIP. 19750225 199501 1 001</p>	 <p>Kepala BAPPERIDA <u>Parvanto, S.Sos., MT</u> NIP. 19690608 198902 1 001</p>	 <p>Kepala Dinas Dinsos, P3A, PPKB <u>Martin Efendi, S.Hut., MM</u> NIP. 19790905 200801 1 018</p>
---	---	---	---

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : Inspektorat Kabupaten

TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
KODE PROGRAM	6.01.02
KEGIATAN	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
HASIL/OUTPUT	Diikutinya pengawasan yang telah ditetapkan berdasarkan surat tugas
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 27 orang yang terdiri dari 12 laki-laki dan 15 perempuan . <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses : Pengawasan yang dilaksanakan pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari 5 hari dengan lokasi pelaksanaan yang jauh dari Kantor Inspektorat ke seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya sehingga menyulitkan bagi Anggota Tim terutama yang perempuan karena harus melakukan pengawasan terutama untuk kegiatan cek fisik ke lapangan dengan jarak yang jauh dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilakui kendaraan roda empat ataupun roda dua terlebih bagi APIP yang hamil dan menyusui - Tidak semua Anggota Tim dapat melakukan pekerjaan pemeriksaan terutama untuk kegiatan fisik karena kondisi jalan dari Kantor Inspektorat ke lokasi pemeriksaan yang tersebar di seluruh Kabupaten Dharmasraya sehingga Anggota Tim Perempuan yang hamil/menyusui kesulitan karena jarak dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilakui kendaraan roda empat ataupun roda dua sedangkan semua APIP dituntut dapat melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peran ganda APIP perempuan yang bekerja di kantor dan bekerja sebagai ibu rumah tangga - Adanya perbedaan dalam proporsi pemeriksaan antara Anggota Tim Laki-laki dan Perempuan <p>c. Penyebab Eksternal</p> <p>Lokasi pemeriksaan yang jauh dan medan pemeriksaan fisik yang susah</p>

	dilakui kendaraan roda empat ataupun roda dua dari Kantor Inspektorat Kabupaten Dharmasraya		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Memetakan pemeriksaan yang telah ditetapkan berdasarkan surat tugas sehingga pemeriksaan yang akan diikuti telah memperhatikan anggota Tim laki-laki dan perempuan mengenai jarak dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilakui kendaraan roda empat ataupun roda dua	
		Tujuan	Agar Terlaksananya Pengawasan Internal dalam Rangka Pencapaian PKPT dengan mempertimbangkan Proporsi Anggota Tim yang Laki-laki dan Perempuan
		Alokasi Anggaran	
	Total anggaran		Rp. 234.985.850,-
CAPAIAN PROGRAM	<p>Output : Diikutinya pengawasan yang telah ditetapkan berdasarkan surat tugas</p> <p>Outcome : Semua Anggota Tim dapat melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan dengan memperhatikan proporsi laki-laki dan perempuan dan kondisi jaran dan medan pemeriksaan fisik yang susah dilakui kendaraan roda empat ataupun roda dua</p>		

Pulau Punjung, Juni 2024

**INSPEKTUR
KABUPATEN
DHARMASRAYA,**

Drs. Andy Sumanto, CfrA
NIP. 19681220 199009 1 001

TIM VERIFIKASI

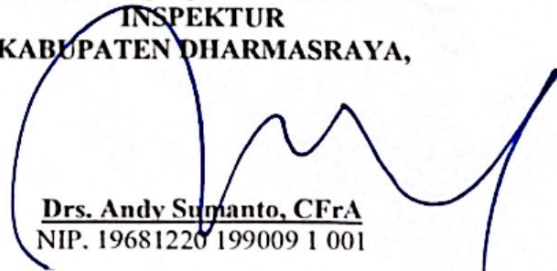
 Inspektur, <u>Drs. Andy Sumanto, CfrA</u> NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD <u>Aril, AP., M.Si</u> NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala BAPPERIDA <u>Irvanto, S.Sos., MT</u> NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Disus, P3A, PPKB <u>Martin Efendi, S.Hut., MM</u> NIP. 19790905 200801 1 018
--	--	---	---

KAK/ TOR

Program		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Program		Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan		
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Permendagri Nomor 61 Tahun 2019 Tentang perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2020 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah
	Gambaran Umum	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan internal secara efektif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Meliputi Kegiatan pengawasan internal berupa Audit, Reviu dan Monitoring
	Indikator Kinerja	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan/pengawasan terhadap objek pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pada instansi/OPD, Nagari dan Sekolah di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya tepat waktu dan PKPT tercapai 100%
	Batasan Kegiatan	Kegiatan pemeriksaan/pengawasan sesuai dengan PKPT
Maksud dan Tujuan		Mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Melakukan kegiatan pemeriksaan/pengawasan terhadap obyek pemeriksaan sesuai PKPT secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : Jabatan Fungsional Auditor/PPUPD Penanggung Jawab : Inspektur
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2024
Biaya		Rp. 234.985.850,-

Pulau Punjung , Juni 2024

**INSPEKTUR
KABUPATEN DHARMASRAYA,**


Drs. Andy Sumanto, CFA
NIP. 19681220 199009 1 001

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 1

Mengatasi Kesenjangan Gender

Kecamatan : KOTO BARU
Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
KEGIATAN: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya Yang di ikuti oleh 4 Nagari (Nagari Koto Baru, Nagari Ampang Kuranji, Nagari Koto Padang, Nagari Sialang Gaung)	<u>Akses :</u> <u>Partisipasi :</u> Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang	- belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang - Sedikitnya jumlah/kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan - belum paham betul tentang pengasutamaan gender	Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang Sosial Budaya Minang kabau, dimana	Terumuskan- nya usulan program Prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025 yang responsif gender	Mengumpulkan DURKP Nagari Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan Distribusi undangan ke nagari Menjalin koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait secara internal sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur Tersusunnya usulan prioritas kecamatan Dari kehadiran tahun 2024 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandingannya laki-laki 66% dan perempuan 34%	Output: Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing –masing usulan yang menjadi prioritas Input: Rp.13.344.900,- Outcome: Untuk melihat usulan masing – masing nagari yang mendukung adannya
SUB KEGIATAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Di Desa	Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2021 : 82 org Tahun 2022 : 100 org Tahun 2023 : 100 org Tahun 2024 : 100 org Tahun 2021, dari 82 yang hadir, diikuti	<u>Manfaat :</u> Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang						

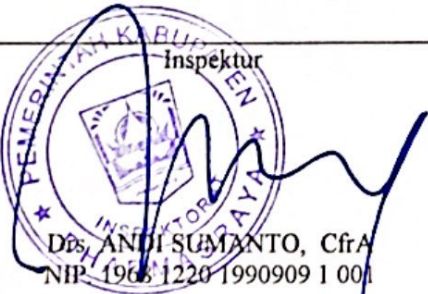

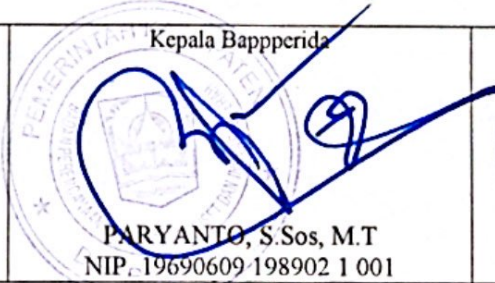
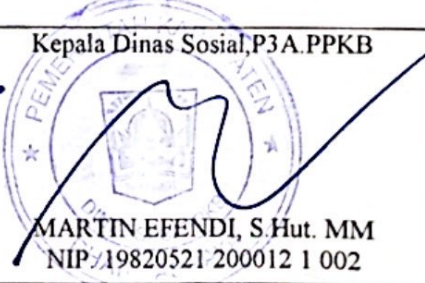
<p>TUJUAN: Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD</p> <p>SASARAN Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan</p>	<p>sebanyak 55 orang peserta laki-laki dan sebanyak 27 orang peserta perempuan</p> <p>Tahun 2022, dari 100 orang yang hadir, diikuti sebanyak 48 orang peserta laki-laki dan sebanyak 52 orang peserta perempuan</p> <p>Tahun 2023, dari 100 orang yang hadir, diikuti sebanyak 72 orang peserta laki-laki dan sebanyak 28 orang peserta perempuan serta ada 4 orang dari perwakilan Forum Anak</p> <p>Tahun 2024 diikuti oleh 100 orang peserta Laki-laki 66 Orang dan 34 orang orang perempuan. serta ada 4 orang dari perwakilan Forum Anak</p>		<p>- Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang</p>	<p>perempuan tidak banyak memberikan pendapat</p>		<p>Menyampaikan saran ke bappeda untuk membuat regulasi tentang keterwakilan Perempuan dan anak di Musrenbang</p> <p>Sosialisasi Musrenbang ke masyarakat</p>	<p><i>Dari Notulen Usulan Musrenbang 2024 jumlah yang dundang 100. laki-laki yang hadir sebanyak 66 Orang, dan yang menyampaikan usulan 34 orang(37%) serta peserta perempuan yang hadir 34 Orang serta yang menyampaikan usulan sebanyak 19 orang (19%)</i></p>	<p>kegiatan yang responsif gender</p> <p>Output: Melakukan Sosialisai Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang</p> <p>Input: Rp.13.344.900,-</p> <p>Outcome: Menigkatnya tingkat kehadiran dan keberanian Perempuan menyampaikan usulan dalam proses pelaksanaan musrenbang, serta tertampungnya pada Musrenbang RKPD Kabupaten yang responsif gender</p>
--	--	--	---	---	--	---	---	--

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Dari Notulen Usulan Musrenbang 2024 jumlah yang dundang 100. laki –lak i yang hadir sebanyak 66 Orang, dan yang menyampaikan usulan 34 orang(37 %) serta peserta perempuan yang hadir 34 Orang serta yang menyampaikan usulan sebanyak 19 orang (19 %)	<u>Kontrol</u> Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya						

Koto Baru, 25 Juni 2024
Camat Koto Baru,


DARMENDRA, S.Sos
NIP. 19791108 200901 1 004

TIM VERIFIKASI

 Inspektur Drs. ANDI SUMANTO, CfrA NIP. 19681220 1990909 1 001	 Kepala BKD ASRIL AP, Msi NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bappperida PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 19820521 200012 1 002
--	---	--	---

FORMAT GBS (1)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) Mengatasi Kesenjangan Gender											
SKPD	: KECAMATAN KOTO BARU										
TAHUN ANGGARAN	: 2024										
PROGRAM	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan										
KODE PROGRAM	7.01.03										
KEGIATAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
HASIL/OUTPUT	Terumuskannya prioritas usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung pada Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2024 yang responsif gender										
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya; Di Kecamatan Koto Baru terdiri dari 4 Nagari masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang</p> <ul style="list-style-type: none"> Tahun 2024 diikuti oleh 100 orang peserta diantaranya 66 orang peserta laki-laki dan 34 orang perempuan serta dari 100 peserta musrenbang hadir 4 orang dari perwakilan Forum Anak <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ol style="list-style-type: none"> Sangat sedikit Keterwakilan perempuan karena belum adanya aturan yang mewajibkan tingkat keterwakilan perempuan dan komitmen pihak terkait tentang pelaksanaan musrenbang. Masih sedikit perwakilan perempuan yang memberikan atau mengajukan usulan dalam kegiatan Musrenbang. 										
RENCANA AKSI	<table border="1"> <tr> <td>Komponen/ Aktifitas</td> <td>Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing – masing usulan yang menjadi prioritas</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Untuk melihat usulan masing –masing nagari yang mendukung adanya kegiatan yang responsif gender</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Melakukan Sosialisai Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang</td> </tr> <tr> <td>Total anggaran</td> <td>Rp. 13.344.900,</td> </tr> </table>	Komponen/ Aktifitas	Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing – masing usulan yang menjadi prioritas	Tujuan	Untuk melihat usulan masing –masing nagari yang mendukung adanya kegiatan yang responsif gender		Melakukan Sosialisai Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang	Tujuan	Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang	Total anggaran	Rp. 13.344.900,
Komponen/ Aktifitas	Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing – masing usulan yang menjadi prioritas										
Tujuan	Untuk melihat usulan masing –masing nagari yang mendukung adanya kegiatan yang responsif gender										
	Melakukan Sosialisai Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang										
Tujuan	Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang										
Total anggaran	Rp. 13.344.900,										
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Menigkatnya tingkat kehadiran dan keberanian Perempuan menyampaikan usulan dalam proses pelaksanaan musrenbang, serta tertampungnya pada Musrenbang RKPD Kabupaten yang responsif gender										




Koto Baru, 25 Juni 2024

Camat Koto Baru

DARMENDRA, S.Sos

NIP. 19791108 200901 1 004

TIM VERIFIKASI

 Inspektur Drs. AND SUMANTO, CfrA NIP. 1968 1220 1990909 1 001	 Kepala BKD ASRIL AP, Msi NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapppperida PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 19820521 200012 1 002
--	--	--	---

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 2

Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat (service delivery)

Kecamatan : KOTO BARU

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

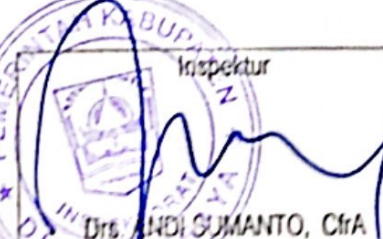

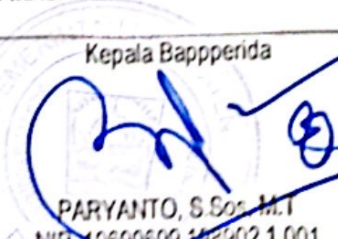

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
KEGIATAN: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Adanya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	<u>Akses :</u> <u>Partisipasi :</u> Disiapkan jalur khusus untuk pelayanan disabilitas, disiapkan loket khusus disabilitas <u>Manfaat :</u> Mempercepat proses alur pelayanan khusus disabilitas <u>Kontrol</u> Memastikan Sarana dan Prasarana penunjang Disabilitas tersedia dan berfungsi dengan baik	Pelayanan khusus untuk disabilitas belum diperhatikan secara khusus	Minimnya warga penyandang Disabilitas mengurus kelengkapan biodata warganegara	Terpenuhinya layanan untuk penyandang Disabilitas	- Menyediakan Sarana dan Prasarana bagi penyandang Disabilitas - Menyediakan loket khusus disabilitas	- Meningkatnya keluarga yang membawa penyandang Disabilitas mengurus pelayanan - Tingkat pelayanan PATEN tahun 2023 Non Disabilitas 100% Disabilitas 0%	Output : Tersedianya pengadaan Kursi roda bagi prnyandang disabilitas sebanyak 3 buah dan tersedianya pembuatan jalur disabilitas Tersediannya loket khusus disabilitas Input: Rp. 55.000.000 Outcome: Terlaksananya Pengadaan Kursi roda dan pembuatan jalur untuk penyandang disabilitas Tersediannya loket khusus disabilitas Output: Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyandang disabilitas Input: Rp. 1.500.000,-
TUJUAN: Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan SOP	Jumlah Layanan Paten 2023 Non Disabilitas 753 org Disabilitas 0 orang							
SASARAN Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan								

umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan								Outcome : Meningkatnya penyanggand disabilitas yang melakukan permohonan dokumen melalui PATEN Kecamatan Output : Terlaksananya koordinasi dengan lintas sector Input : Rp. 1.000.000,- Outcome : Meningkatnya Sinergi/Koordinasi Lintas Sektor
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Koto Besar, 25 Juni 2024
Camat Koto Baru


DARMENDRA, S.Sos
NIP. 19791108 200901 1 004

TIM VERIFIKASI

 Inspektur Drs. ANDI SUMANTO, CfrA NIP. 19681220 1990909 1 001	 Kepala BKD ASRIL AP Msi NIP. 19750226 199501 1 001	 Kepala Bapperida PARYANTO, S.Sos. M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 19820521 200012 1 002
--	---	---	---

FORMAT GBS (2)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat (service delivery)

SKPD	: KECAMATAN KOTO BARU		
TAHUN ANGGARAN	: 2025		
PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
KODE PROGRAM	7.01.02		
KEGIATAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
HASIL/OUTPUT	(Diambil dari GAP langkah 6)		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <p>a. Adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</p> <p>b. Jumlah layanan Paten Tahun 2023 Non Disabilitas 753 orang, Yang Disabilitas tidak ada</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Minimnya warga penyandang Disabilitas mengurus kelengkapan biodata warganegara</p> <p>b. Pelayanan khusus untuk disabilitas belum diperhatikan secara khusus</p> <p>c. Disiapkan jalur khusus untuk pelayanan disabilitas</p> <p>d. Disiapkan loket khusus disabilitas</p>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	(Diambil dari GAP langkah 7)	
	Tujuan	Menyediakan Jalur Khusus dan kursi roda untuk penyandang disabilitas	
	Alokasi Anggaran	Rp. 55.000.000,-	
	Komponen/ aktifitas 2	(Diambil dari GAP langkah 7)	
	Tujuan	Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyandang disabilitas	
	Alokasi Anggaran	Rp.1.500.000,-	
	Komponen/ aktifitas 3	(Diambil dari GAP langkah 7)	
	Tujuan	Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sector	
	Alokasi Anggaran	Rp. .1.000.000,-	
	Total anggaran	Rp. 57.500.000,-	
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Terciptanya Layanan PATEN Kecamatan yang responsif gender		



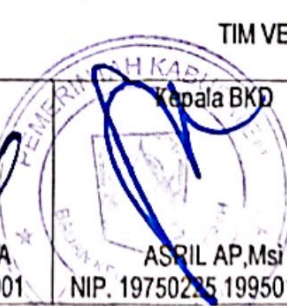
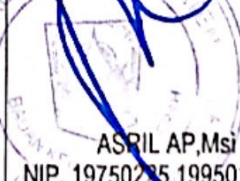
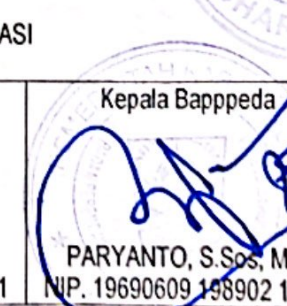
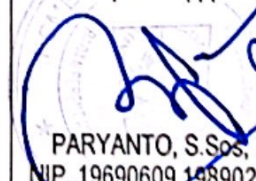
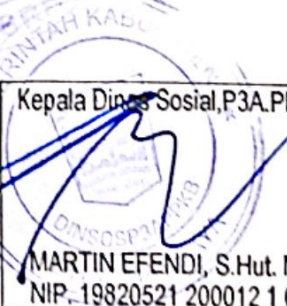

Koto Besar, 25 Juni 2024

Camat Koto Baru



DARMENDRA, S.Sos
NIP. 19791108 200901 1 004

TIM VERIFIKASI

 Inspektur  Drs. ANDI SUMANTO, CfrA NIP. 19681220 1990909 1 001	 Kepala BKD  ASRIL AP, Msi NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bappeda  PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB  MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 19820521 200012 1 002
---	---	--	--

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 1

Mengatasi Kesenjangan Gender

Kecamatan : KOTO BESAR
Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
KEGIATAN: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya Yang di ikuti oleh 7 Nagari (Nagari Koto Besar, Nagari Abai Siat, Nagari Bonjol, Nagari Koto Ranah, Nagari Koto Gadang, Nagari Koto laweh, dan Nagari Koto tinggi)	<u>Akses :</u> <u>Partisipasi :</u> Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang	- belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang	Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang	Terumuskan- nya usulan program Perioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025 yang responsif gender	Mengumpulkan DURKP Nagari Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan Distribusi undangan ke nagari Menjalin koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait secara iinternal sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur Tersusunnya usulan prioritas kecamatan Dari kehadiran tahun 2024 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandinganny a lak-laki 83% dan perempuan 17%	Output: Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing –masing usulan yang menjadi perioritas Input: Rp.11.275.00,- Outcome: Untuk melihat usulan masing – masing nagari yang mendukung
SUB KEGIATAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Di Desa	Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2021 : 50 org Tahun 2022 : 80 org Tahun 2023 : 100 org Tahun 2024 : 96 org	<u>Manfaat :</u> Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang	- Sedikitnya jumlah\kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan - belum paham betul tentang pengasutama an gender	Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang Sosial Budaya Minang kabau,				

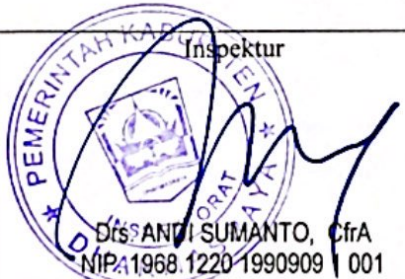

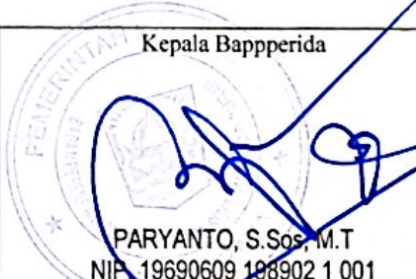
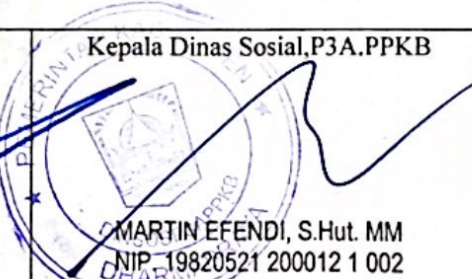
<p>TUJUAN: Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD</p> <p>SASARAN Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan</p>	<p>Tahun 2021 dari 50 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 35 orang peserta laki-laki dan 15 Orang peserta perempuan</p> <p>Tahun 2022 di ikuti oleh 80 orang peserta laki-laki 53 dan 27 orang peserta perempuan</p> <p>Tahun 2023 di ikuti oleh 100 orang peserta laki-laki 71 dan 29 orang peserta perempuan serta ada 8 orang dari perwakilan Forum Anak</p> <p>Tahun 2024 diikuti oleh 96 orang peserta Laki-laki 80 Orang dan 16 orang orang perempuan.</p>		<p>- Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang</p>	<p>dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat</p>		<p>Menyampaikan saran ke bappeda untuk membuat regulasi tentang keterwakilan Perempuan dan anak di Musrenbang</p> <p>Sosialisasi Musrenbang ke masyarakat</p>	<p>Meningkatnya usulan Peserta Laki-laki 28,2 % dan perempuan meningkat 17,24 %</p> <p><i>Dari Notulen Usulan Musrenbang 2024 jumlah yang dundang 100. laki –lak i yang hadir sebanyak 80 Orang, dan yang menyampaikan usulan 20 orang(25 %)</i></p>	<p>adannya kegiatan yang responsif gender</p> <p>Output: Melakukan Sosialisai Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang</p> <p>Input: Rp.6.720.00,-</p> <p>Outcome: Menigkatnya tingkat kehadiran dan keberanian Perempuan menyampaikan usulan dalam proses pelaksanaan musrenbang, serta tertampungnya pada Musrenbang RKPD Kabupaten yang responsif gender</p>
--	---	--	---	--	--	---	---	--

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	<p><i>Dari Notulen Usulan Musrenbang 2024 jumlah yang dundang 100 laki-laki yang hadir sebanyak 80 Orang. dan yang menyampaikan usulan 20 orang(25 %)</i></p> <p><i>peserta perempuan yang di undang 20. orang dan yang hadir 16 Orang serta yang menyampaikan usulan sebanyak 5 orang (89%)</i></p>	<p>Kontrol</p> <p>Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya</p>	<p>Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan</p>				<p><i>peserta perempuan yang di undang 20. orang dan yang hadir 16 Orang serta yang menyampaikan usulan sebanyak 5 orang (80 %)</i></p>	

Koto Besar, 19 Juni 2023
Camat koto Besar,

FAUZIARIES. SH
NIP. 19850419 201001 1 010

TIM VERIFIKASI

<p>Inspektur</p>  <p>Drs. ANDI SUMANTO, CfrA NIP. 1968.1220.1990909 1 001</p>	<p>Kepala BKD</p>  <p>ASRI AP, Msi NIP. 19750225 199501 1 001</p>	<p>Kepala Bapperida</p>  <p>PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB</p>  <p>MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 19820521 200012 1 002</p>
--	---	--	--

FORMAT GBS (1)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) Mengatasi Kesenjangan Gender																		
SKPD	: KECAMATAN KOTO BESAR																	
TAHUN ANGGARAN	: 2024																	
PROGRAM	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan																	
KODE PROGRAM	7.01.03																	
KEGIATAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																	
HASIL/OUTPUT	Terumuskannya prioritas usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung pada Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2024 yang responsif gender																	
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya; Di Kecamatan Koto Besar terdiri dari 7 Nagari masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang</p> <ul style="list-style-type: none"> Tahun 2024 diikuti oleh 96 orang peserta diantaranya 80 orang peserta laki-laki dan 16 orang perempuan. <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ol style="list-style-type: none"> Sangat sedikit Keterwakilan perempuan karena belum adanya aturan yang mewajibkan tingkat keterwakilan perempuan dan komitmen pihak terkait tentang pelaksanaan musrenbang. Masih sedikit perwakilan perempuan yang memberikan atau mengajukan usulan dalam kegiatan Musrenbang. 																	
RENCANA AKSI	<table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Komponen/ Aktifitas 1</td> <td colspan="2">Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing –masing usulan yang menjadi prioritas</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Untuk melihat usulan masing –masing nagari yang mendukung adanya kegiatan yang responsif gender</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td>11.275.000,-</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Komponen/ aktifitas 2</td> <td colspan="2">Melakukan Sosialisai Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td>6.720.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total anggaran</td> <td>Rp. 17.995.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen/ Aktifitas 1	Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing –masing usulan yang menjadi prioritas		Tujuan	Untuk melihat usulan masing –masing nagari yang mendukung adanya kegiatan yang responsif gender	Alokasi Anggaran	11.275.000,-	Komponen/ aktifitas 2	Melakukan Sosialisai Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang		Tujuan	Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang	Alokasi Anggaran	6.720.000	Total anggaran		Rp. 17.995.000,-
Komponen/ Aktifitas 1	Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing –masing usulan yang menjadi prioritas																	
	Tujuan		Untuk melihat usulan masing –masing nagari yang mendukung adanya kegiatan yang responsif gender															
	Alokasi Anggaran	11.275.000,-																
Komponen/ aktifitas 2	Melakukan Sosialisai Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang																	
	Tujuan	Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang																
	Alokasi Anggaran	6.720.000																
Total anggaran		Rp. 17.995.000,-																
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Menigkatnya tingkat kehadiran dan keberanian Perempuan menyampaikan usulan dalam proses pelaksanaan musrenbang, serta tertampungnya pada Musrenbang RKPD Kabupaten yang responsif gender																	



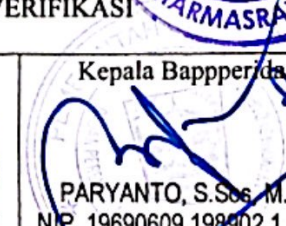

Koto Besar, 19 Juni 2023

Camat Koto Besar

FASZHAIRIES.SH

NIP. 19850419 201001 1 010

TIM VERIFIKASI

 Inspektur Drs. ANDI SUMANTO, CfrA NIP. 1988 1120 199009 1 001	 Kepala BKD ASRIL AP, Msi NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperda PARYANTO, S.Sos. M.T NIP. 19690609 199502 1 001	 Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 19820521 200012 1 002
--	--	---	---

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 2
Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat (service delivery)

Kecamatan : KOTO BESAR





Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
KEGIATAN: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Adanya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	<u>Akses :</u> <u>Partisipasi :</u> Disiapkan jalur khusus untuk pelayanan disabilitas, disiapkan loket khusus dissabilitas	- Pelayanan khusus untuk disabilitas belum diperhatikan secara khusus	Minimnya warga penyangang Disabilitas mengurus kelengkapan birodata warganegara -	Terpenuhinya layananan untuk penyangang Disabilitas	Menyediakan Sarana dan Prasarana bagi penyangang Disabilitas Menyediakan loket khusus dissabilitas -	Meningkatnya keluarga yang membawa penyangang Disabilitas mengurus pelayanan Tingkat pelayanan PATEN tahun 2023 Non Disabilitas 94,3 % Disabilitas 0,25 %	Output : Tersedianya pengadaan Kursi roda bagi prnyandang disabilitas sebanyak 3 buah dan tersedianya pembuatan jalur disabilitas Tersediannya loket khusus dissabilitas Input: Rp. 53.000.000 Outcome: Terlaksananya Pengadaan Kursi roda dan pembuatan jalur untuk penyangang disabilitas Tersediannya loket khusus dissabilitas Output: Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyangang disabilitas Input: Rp. 1.200.000,-
TUJUAN: Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan SOP	Jumlah Layanan Paten 2023 Non Disabilitas 528 org Disabilitas 0 orang Jumlah Data Disabilitas dikecamatan Koto Besar, sebanyak 31 orang	<u>Manfaat :</u> Mempercepat proses alur pelayanan khusus dissabilitas <u>Kontrol</u> Memastikan Sarana dan Prasarana penunjang Disabilitas tersedia dan berfungsi dengan baik						
SASARAN Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan								

umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan								Outcome : Meningkatnya penyandang disabilitas yang melakukan permohonan dokumen melalui PATEN Kecamatan Output : Terlaksananya koordinasi dengan lintas sector Input : Rp. 750.000,- Outcome : Meningkatnya Sinergi/Koordinasi Lintas Sektor
--	--	--	--	--	--	--	--	---


Koto Besar, 19 Juni 2024
Camat Koto Besar
FADZI ARIES.SH
NIP. 19850419 201001 1 010

TIM VERIFIKASI

 Inspektur Drs. ANDI SUMANTO, CfrA NIP. 1968.1220.1990909 1 001	 Kepala BKD ASRIL AP, Msi NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial P3A.PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 19820521 200012 1 002
---	--	---	---


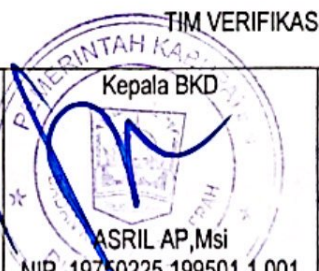

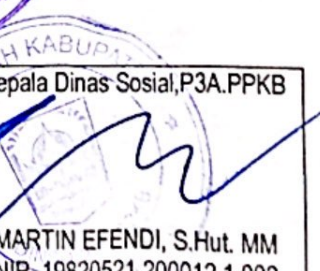
FORMAT GBS (2)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat (service delivery)

SKPD	: KECAMATAN KOTO BESAR		
TAHUN ANGGARAN	: 2025		
PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
KODE PROGRAM	7.01.02		
KEGIATAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
HASIL/OUTPUT	(Diambil dari GAP langkah 6)		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) b. Jumlah layanan Paten Tahun 2023 Non Disabilitas 528 orang, Yang Disabilitas tidak ada c. Jumlah Data Disabilitas diKecamatan Koto Besar sebanyak 31 Orang <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Minimnya warga penyandang Disabilitas mengurus kelengkapan biodata warganegara b. Pelayanan khusus untuk disabilitas belum diperhatikan secara khusus c. Disiapkan jalur khusus untuk pelayanan disabilitas d. Disiapkan loket khusus disabilitas 		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	(Diambil dari GAP langkah 7)	
		Tujuan	Menyediakan Jalur Khusus dan kursi roda untuk penyandang disabilitas
		Alokasi Anggaran	Rp. 53.000.000,-
	Komponen/ aktifitas 2	(Diambil dari GAP langkah 7)	
		Tujuan	Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyandang disabilitas
		Alokasi Anggaran	Rp.1.120.000,-
	Komponen/ aktifitas 3	(Diambil dari GAP langkah 7)	
		Tujuan	Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sector
		Alokasi Anggaran	Rp. .750.000,-
	Total anggaran		Rp. 54.870.000,-
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Terciptanya Layanan PATEN Kecamatan yang responsif gender		

Koto Besar, 19 Juni 2024
Camat Koto Besar

FAUZI ARIES.SH
NIP. 119850449/2010011010

TIM VERIFIKASI			
 Inspektur Dis. ANDI SUMANTO, CfrA NIP. 1968122019909091001	 Kepala BKD ASRIL AP, Msi NIP. 197502251995011001	 Kepala Bappeda PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 196906091969021001	 Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 198205212000121002

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 1

Mengatasi Kesenjangan Gender

Kecamatan : KOTO SALAK
Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan KEGIATAN: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa SUB KEGIATAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Di Desa	Data Pembuka Wawasan Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya. Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang. Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2021: 60 org Tahun 2022 : 60 org Tahun 2023 : 60 org Tahun 2024 60 org Tahun 2021, dari 60 yang ada, diikuti sebanyak 43 orang peserta laki-laki dan sebanyak 17 orang peserta perempuan. Tahun 2022, dari 60 yang ada, diikuti oleh sebanyak 39 orang peserta laki-laki dan 21 orang peserta	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan <u>Akses :</u> <u>Partisipasi :</u> Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang <u>Manfaat :</u> Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang	Sebab Kesenjangan Internal - belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang - Sedikitnya jumlah/kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan - belum paham betul tentang pengasutamaan gender	Sebab Kesenjangan Eksternal Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang Sosial Budaya Minang kabau, dimana	Reformulasi Tujuan Terumuskan- nya usulan program Prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025 yang responsif gender	Rencana Aksi Mengumpulkan DURKP Nagari Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan Distribusi undangan ke nagari Menjalin koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait secara internal sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	Data Dasar (Baseline) Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur Tersusunnya usulan prioritas kecamatan Dari kehadiran tahun 2024 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandingannya laki-laki 40 % dan perempuan 20 %	Indikator Gender Output: Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing –masing usulan yang menjadi prioritas Input: Rp. 5.000.000 Outcome: Untuk melihat usulan masing – masing nagari yang mendukung adannya

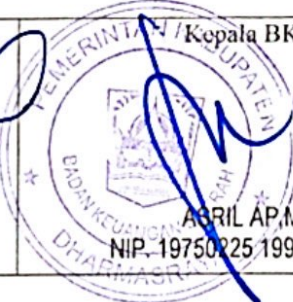
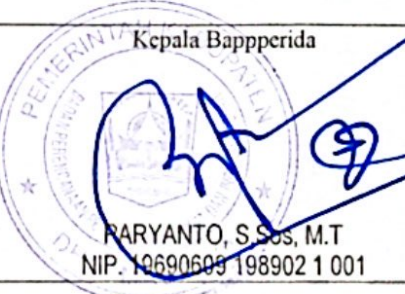

<p>TUJUAN: Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD</p> <p>SASARAN Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan</p>	<p>Tahun 2023 dari 60 orang yang ada terdiri dari 31 laki-laki dan 29 perempuan</p> <p>Dari notulen usulan musrenbang 2022 jumlah peserta laki-laki yang diundang 45 orang, yang hadir 31 orang yang menyampaikan usulan sebanyak 8 orang (20 % dari jumlah peserta laki-laki yang hadir), peserta perempuan yang diundang sebanyak 25 orang yang hadir 21 orang dan yang menyampaikan usulan sebanyak 2 orang (9 % dari jumlah peserta perempuan yang hadir)</p>	<p>- Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang</p>	<p>perempuan tidak banyak memberikan pendapat</p>	<p>Menyampaikan saran ke bappeda untuk membuat regulasi tentang keterwakilan Perempuan dan anak di Musrenbang</p> <p>Sosialisasi Musrenbang ke masyarakat</p>	<p>Meningkatnya usulan Peserta Laki-laki 40 % dan perempuan meningkat 30 %</p> <p><i>Dari Notulen Usulan Musrenbang 2024 jumlah yang diundang 40. laki –lak i yang hadir sebanyak 20 Orang, dan yang menyampaikan usulan 10 orang(12,5 %)</i></p>	<p>kegiatan yang responsif gender</p> <p>Output: Melakukan Sosialisai Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang</p> <p>Input: Rp 7.680.000,-</p> <p>Outcome: Menigkatnya tingkat kehadiran dan keberanian Perempuan menyampaikan usulan dalam proses pelaksanaan musrenbang, serta tertampungnya pada Musrenbang RKPD Kabupaten yang responsif gender</p>
--	---	---	---	---	--	---

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Tahun 2024 dari 60 orang yang ada terdiri dari 40 laki-laki dan 20 perempuan dan Forum anak 3 org Dari notulen usulan usrenbang 2024 yang menyampaikan usulan sebanyak 10 orang (20 % dari peserta yang hadirpeserta	Kontrol Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya	Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan				peserta perempuan yang di undang 20 orang dan yang hadir 17 Orang serta yang menyampaikan usulan sebanyak 5 orang (25 %)	

Koto Salak, 19 Juni 2024
 Camat Koto Salak,

 M. Aulaman, S.Pd
 NIP. 19700202 199403 1 006

TIM VERIFIKASI

 Inspektur Drs. ANDI SUMANTO, CfrA NIP. 1968 1220 1990909 1 001	 Kepala BKD ARIL AP, Msi NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida RARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 19820521 200012 1 002
--	--	--	--

FORMAT GBS (1)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) Mengatasi Kesenjangan Gender																				
SKPD	: KECAMATAN Koto Salak																			
TAHUN ANGGARAN	: 2024																			
PROGRAM	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan																			
KODE PROGRAM	7.01.03																			
KEGIATAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																			
HASIL/OUTPUT	Terumuskannya prioritas usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung pada Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2025 yang responsif gender																			
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data PembukaWawasan (Data Pilah Gender). Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya; Di Kecamatan Koto Salak terdiri dari 5 Nagari masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang</p> <ul style="list-style-type: none"> Tahun 2024 diikuti oleh 60 orang peserta diantaranya 40 orang peserta laki-laki dan 20 orang perempuan. Dan Forum Anak 3 orang <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Sangat sedikit Keterwakilan perempuan karena belum adanya aturan yang mewajibkan tingkat keterwakilan perempuan dan komitmen pihak terkait tentang pelaksanaan musrenbang.</p> <p>b. Masih sedikit perwakilan perempuan yang memberikan atau mengajukan usulan dalam kegiatan Musrenbang.</p>																			
RENCANA AKSI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 15%;">Komponen/ Aktifitas 1</td> <td colspan="2">Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing –masing usulan yang menjadi prioritas</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">Tujuan</td> <td>Untuk melihat usulan masing –masing nagari yang mendukung adanya kegiatan yang responsif gender</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td>5.000.000,-</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Komponen/ aktifitas 2</td> <td colspan="2">Melakukan Sosialisai Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td>7.680.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total anggaran</td> <td>Rp. 12.680.000,-</td> </tr> </table>			Komponen/ Aktifitas 1	Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing –masing usulan yang menjadi prioritas		Tujuan	Untuk melihat usulan masing –masing nagari yang mendukung adanya kegiatan yang responsif gender	Alokasi Anggaran	5.000.000,-	Komponen/ aktifitas 2	Melakukan Sosialisai Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang		Tujuan	Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang	Alokasi Anggaran	7.680.000	Total anggaran		Rp. 12.680.000,-
Komponen/ Aktifitas 1	Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing –masing usulan yang menjadi prioritas																			
	Tujuan	Untuk melihat usulan masing –masing nagari yang mendukung adanya kegiatan yang responsif gender																		
	Alokasi Anggaran	5.000.000,-																		
Komponen/ aktifitas 2	Melakukan Sosialisai Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang																			
	Tujuan	Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang																		
	Alokasi Anggaran	7.680.000																		
Total anggaran		Rp. 12.680.000,-																		
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Menigkatnya tingkat kehadiran dan keberanian Perempuan menyampaikan usulan dalam proses pelaksanaan musrenbang, serta tertampungnya pada Musrenbang RKPD Kabupaten yang responsif gender																			




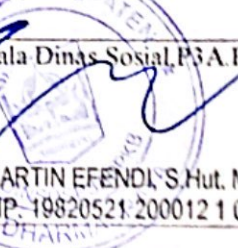
Koto Salak, 19 Juni 2024

Camat Koto Salak

H. Sulungan, S.Pd

NIP. 19702021094031006

TIM VERIFIKASI

 Inspektur Drs. ANDI SUMANTO, CfrA NIP. 1968112019909091001	 Kepala BKD ASRIL AP, Msi NIP. 197502251995011001	 Kepala Bappenda PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 196906091989021001	 Kepala Dinas Sosial P3A PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut, MM NIP. 198205212000121002
--	--	---	---

FORM KAKI / TOR

Program		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Sasaran Program		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan
Kegiatan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaanpe mbangunan di desa
Latar Belakang	Dasar Hukum	Surat Bupati Dharmasraya No. 000.7.2/34/ Bapperida tanggal 16 Februari 2024 perihal Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan
	Gambaran Umum	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti Musrenbang
	Indikator Kinerja	Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Merumuskan Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Mengundang utusan nagari dan stakeholker terkait untuk merumuskan usulan prioritas musrenbang kecamatan dalam satu ruang dan waktu yang telah ditentukan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kecamatan Koto Salak
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Di Desa Penanggung Jawab : Camat Koto Salak
Jadwal		Bulan Februari 2025
Biaya		Rp. 12.680.000

Koto Salak, 19 Juni 2024
 Camat Koto Salak,

 H. Sulaiman, S.Pd
 Nip. 19702121994031006



GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Dinas Pendidikan

TAHUN ANGGARAN : 2024

Program/	Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan/ Sub	Pengelolaan Pendidikan Dasar
Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
KODE PROGRAM	1.01.02
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data peserta didik laki-laki dan perempuan di SD Kabupaten Dharmasraya Laki-laki = 2267 siswa, Perempuan = 1474 siswa - Jumlah peserta didik SD laki-laki dan perempuan yang menerima Biaya Personil (Seragam Sekolah) Laki-laki : 2267 siswa, Perempuan : 1474 siswa <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses :</p> <p>Belum semua siswa yang mendapatkan biaya personal (Seragam Sekolah)</p> <p>Kontrol:</p> <p>Masyarakat khususnya siswa baru di jenjang pendidikan sekolah dasar</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor. 052/ C/ Kep/ D/ 82 "Sekolah secara formal berhak memakai seragam sekolah terhadap siswanya dengan bermacam alasan karena seragam sekolah ialah suatu perlengkapan menciptakan kerapian, ketertiban serta keteraturan siswa dalam melakukan aktivitas pembelajaran. <u>Seragam sekolah sebagai penghilang kesenjangan antara kelas ekonomi dari siswa yang dari berbagai elemen</u>" - Data yang terverifikasi belum lengkap <p>c. Penyebab Eksternal</p> <p>Belum semua masyarakat menerima seragam sekolah baru</p>
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolak Ukur</p> <p>Terlaksananya bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa laki-laki dan perempuan</p> <p>2. Indikator dan Target Kinerja</p> <p>Jumlah peserta didik SD laki-laki dan perempuan yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah</p> <p>Output :</p>

	Jumlah peserta didik SD laki-laki dan perempuan yang tidak mendapatkan bantuan biaya personil (seragam yang menerima bantuan perlengkapan sekolah Outcome : Meningkatnya kesejahteraan peserta didik SD laki-laki dan perempuan		
JUMLAH ANGAUN PROGRAM	Rp 2.451.500.000, -		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Pendataan dan verifikasi data.	
		Masukan-	
		Keluaran	Jumlah peserta didik SD laki-laki dan perempuan
		Hasil	Terverifikasinya data peserta didik SD laki-laki dan perempuan
	Kegiatan 2	Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa	
		Masukan	Rp 2.451.500.000
		Keluaran	Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa
		Hasil	Terlaksananya Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa


Pulau Punjung, Juni 2024

Kepala,



BOBBY P. RIZA, S.STP., M.Si
NIP. 198205212000121002

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB
 <u>Drs. ANDY SUMANTO</u> CfrA NIP 19681220 199009 1 001	 <u>ASRIL AP. M.Si</u> NIP 19750225 199501 1 001	 <u>H. PARYANTO, S.Sos.</u> M.T NIP 19690609 198902 1 001	 <u>MARTIN</u> <u>EFENDI, S.Hut. M.M</u> NIP. 19790905 200801 1 018

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Dinas Pendidikan

TAHIJN ANGGARAN : 2024

Program/	Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan/ Sub	Pengelolaan Pendidikan Dasar
Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
KODE PROGRAM	1.01.02
ANALISA SITUASI	<p>3. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data peserta didik laki-laki dan perempuan di SMP Kabupaten Dharmasraya Laki-laki = 2336 siswa, Perempuan = 1273 siswa - Jumlah peserta didik SMP laki-laki dan perempuan yang menerima Biaya Personil (Seragam Sekolah) Laki-laki : 2336 siswa, Perempuan : 1273 siswa <p>4. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>d. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses :</p> <p>Belum semua siswa yang mendapatkan biaya personal (Seragam Sekolah)</p> <p>Kontrol:</p> <p>Masyarakat khususnya siswa baru di jenjang pendidikan sekolah dasar</p> <p>e. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya anggaran dari Pemerintah Pusat - Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor. 052/ C/ Kep/ D/ 82 "Sekolah secara formal berhak memakai seragam sekolah terhadap siswanya dengan bermacam alasan karena seragam sekolah ialah suatu perlengkapan menciptakan kerapian, ketertiban serta keteraturan siswa dalam melakukan aktivitas pembelajaran. <u>Seragam sekolah sebagai penghilang kesenjangan antara kelas ekonomi dari siswa yang dari berbagai elemen</u>" - - Data yang terverifikasi belum lengkap <p>f. Penyebab Eksternal</p> <p>Belum semua masyarakat menerima seragam sekolah baru</p>
CAPAIAN	<p>3. Tolak Ukur</p> <p>Terlaksananya bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa laki-laki dan perempuan</p>

PROGRAM	4. Indikator dan Target Kinerja Jumlah peserta didik SMP laki-laki dan perempuan yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah Output : Jumlah peserta didik SMP laki-laki dan perempuan yang tidak mendapatkan bantuan biaya personil (seragam yang menerima bantuan perlengkapan sekolah Outcome : Meningkatnya kesejahteraan peserta didik SMP laki-laki dan perempuan		
JUMLAH ANGGAUN PROGRAM	Rp 1.648.500.000, -		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Pendataan dan verifikasi data.	
		Masukan-	
		Keluaran	Jumlah peserta didik SMP laki-laki dan perempuan
		Hasil	Terverifikasinya data peserta didik SMP laki-laki dan perempuan
	Kegiatan 2	Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa	
		Masukan	Rp 1.648.500.000
		Keluaran	Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa
		Hasil	Terlaksananya Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa

Pulau Punjung, Juni 2024

Kepala



BOBBY P. RIZA, S.STP.,M.Si
NIP-198205212000121002

Tim Verifikasi

Inspektur <u>Drs. ANDY SUMANTO</u> CfrA NIP 19681220 199009 1 001	Kepala BKD <u>ASRI LAP, M.Si</u> NIP 19750225 199501 1 001	Kepala Bappeda <u>H. PARYANTO, S.Sos.</u> M.T NIP 19690609 198902 1 001	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB <u>MARTIN EFENDI, S.Hut.M.M</u> NIP. 19790905 200801 1 018
---	---	---	---

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Dinas Pendidikan

TAHUN ANGGARAN : 2024

Program/	Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan/ Sub	Pengelolaan Pendidikan Dasar
Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Dasar/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
KODE PROGRAM	1.01.02
ANALISA SITUASI	<p>5. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data peserta didik laki-laki dan perempuan di PAUD Kabupaten Dharmasraya Laki-laki = 590 siswa, Perempuan = 560 siswa - Jumlah peserta didik PAUD laki-laki dan perempuan yang menerima Biaya Personil (Seragam Sekolah) Laki-laki : 590 siswa, Perempuan : 560 siswa <p>6. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>g. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses :</p> <p>Belum semua siswa yang mendapatkan biaya personal (Seragam Sekolah)</p> <p>Kontrol:</p> <p>Masyarakat khususnya siswa baru di jenjang pendidikan sekolah dasar</p> <p>h. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pembelajaran dan Kebudayaan, Nomor. 052/ C/ Kep/ D/ 82 "Sekolah secara formal berhak memakai seragam sekolah terhadap siswanya dengan bermacam alasan karena seragam sekolah ialah suatu perlengkapan menciptakan kerapian, ketertiban serta keteraturan siswa dalam melakukan aktivitas pembelajaran. <u>Seragam sekolah sebagai penghilang kesenjangan antara kelas ekonomi dari siswa yang dari berbagai elemen</u>" - Data yang terverifikasi belum lengkap <p>i. Penyebab Eksternal</p> <p>Belum semua masyarakat menerima seragam sekolah baru</p>
CAPAIAN PROGRAM	<p>5. Tolak Ukur</p> <p>Terlaksananya bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa laki-laki dan perempuan</p> <p>6. Indikator dan Target Kinerja</p> <p>Jumlah peserta didik PAUD laki-laki dan perempuan yang mendapatkan bantuan</p>

	perlengkapan sekolah Output : Jumlah peserta didik PAUD laki-laki dan perempuan yang tidak mendapatkan bantuan biaya personil (seragam yang menerima bantuan perlengkapan sekolah Outcome : Meningkatnya kesejahteraan peserta didik PAUD laki-laki dan perempuan		
JUMLAH ANGGAUN PROGRAM	Rp Rp 37.500.000, -		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Pendataan dan verifikasi data.	
		Masukan-	
		Keluaran	Jumlah peserta didik PAUD laki-laki dan perempuan
		Hasil	Terverifikasinya data peserta didik PAUD laki-laki dan perempuan
	Kegiatan 2	Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa	
		Masukan	Rp Rp 287.500.000-
		Keluaran	Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa
		Hasil	Terlaksananya Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa

Pulau Punjung, Juni 2024

Kepala,



BOBBY P. RIZA, S.STP.,M.Si
NIP. 198205212000121002

Tim Verifikasi

Inspektur Drs. ANDY SUMANTO CfrA NIP 19681220 199009 1 001	Kepala BKD ASRILAP, M.Si NIP 19750225 199501 1 001	Kepala Bappeda H. PARYANTO, S.Sos. M.T NIP 19690609 198902 1 001	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut. M.M NIP. 19790905 200801 1 018
--	---	--	--



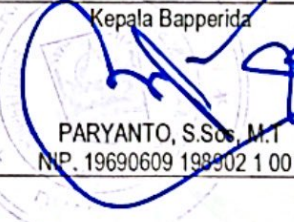
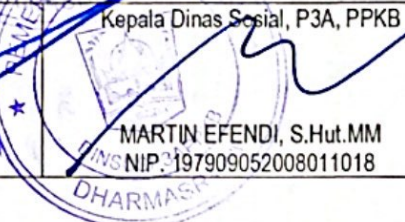
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 2
Mengatasi Kesenjangan Gender

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
KEGIATAN: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Adanya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
TUJUAN: Ketepatan Layanan Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai dengan SOP	Jumlah Layanan Paten 2023 Non Disabilitas 205 org Disabilitas 6 orang	<p>Akses : Belum adanya akses jalan yang nyaman untuk disabilitas</p> <p>Belumtersedianya kusi roda</p> <p>Partisipasi : Masih rendah partisipasi disabilitaas dalam mengurus layanan ke kantor camat</p> <p>Manfaat : Disabilitas belum merasakan manfaat layanan perizinan dan non periziann</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya sarana operasional {kursi Roda} - Masih kurangnya jalur khusus disabilitas. - Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sector. - Belum adanya sosialisasi pentingnya layanan bagi penyandang disabilitas 	Masih rendahnya kesadaran penyandang disabilitas dalam mengurus kelengkapan sebagai warga negara	Terpenuhiny a layananan bagi seluruh lapisan masyarakat	<p>Menyediakan kursi roda untuk penyandang disabilitas sebanyak 3 unit</p> <p>Menambah jalur khusus untuk disabilitas untuk mempermudah akses layan</p> <p>Meningkat koordinasi dengan lintas sector</p> <p>Melaksanakan sosialisasi bagi kepada masyarakat dan penyandang di sabilitas</p>	<p>Jumlah Layanan Paten 2023 Non Disabilitas 205 org Disabilitas 6 orang</p> <p>Jumlah Data Disabilitas dikecamatan Padang Laweh 20 orang Meningkatnya keluarga yang membawa penyandang Disabilitas mengurus pelayanan</p>	<p>1.a Output : Tersedianya pengadaan Kursi roda bagi prnyandang disabilitas sebanyak 3buah Input : Rp. 2.000.000,-</p> <p>Outcome: Terlaksananya Pengadaan kursi roda untukpenyandang disabilitas</p> <p>2.a Output Terlaksananya penambahan jalur disabiilitas</p> <p>Input : Rp. 3..500.000,-</p> <p>Outcome : Terlaksananya penambahanjalur disabilitas</p>

SASARAN Meningkatkan kinerja penyelenggara an tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaa n masyarakat di kecamatan	<u>Kontrol</u> Belum terakomodisnya kebutuhan ddisabilitas dalam pengambilan keputusan/kebijak an						3.a Output : Terlaksananya koordinasi dengan lintas sector Input : Rp. 500.000,- Outcome : Meningkatnya Sinergi/Koordinasi Lintas Sektor 4.a Output : Terlaksananya sosialisasi bagi kepada masyarakat dan penyanggah di sabilas Input : Rp. 2.000.000,- Outcome : Meningnya pemahaman tentang pentingnya layanan bagi penyanggah disabilitas
--	--	--	--	--	--	--	--

Padang Laweh, 26 Juni 2024
Pt. CAMAT PADANG LAWEH

Yohan Sarori, S.STP
NIP. 19930421 201609 1 001

TIM VERIFIKASI			
Inspektur  Drs. ANDI SUMANTO, CfrA NIP. 196812201990909 1 001	Kepala BKD  ASRI LAP, Msi NIP. 19750225 199501 1 001	Kepala Bapperida  PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB  MARTIN EFENDI, S.Hut.MM NIP. 197909052008011018

FORMAT GBS(2)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) Mengatasi Kesenjangan Gender

SKPD : KECAMATAN PADANG LAWEH
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
KODE PROGRAM	7.01.02		
KEGIATAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
HASIL/OUTPUT	Terpenuhinya layanan untuk penyandang Disabilitas		
ANALISIS SITUASI	<ol style="list-style-type: none"> Gender Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender). <ol style="list-style-type: none"> Adanya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Jumlah Layanan Paten 2023 , Non Disabilitas 205 org, Disabilitas 6 orang Jumlah Data Disabilitas dikecamatan Padang Laweh, sebanyak 20 orang Isu dan Faktor Kesenjangan <ol style="list-style-type: none"> Belum adanya akses jalan yang nyaman untuk disabilitas Belum tersedianya kursi roda 		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	(Diambil dari GAP langkah 7)	
		Tujuan	Menyediakan Kursi Roda untuk penyandang disabilitas
		Alokasi Anggaran	Rp.2.000.000,-
	Komponen/ aktifitas 2	(Diambil dari GAP langkah 7)	
		Tujuan	Menambah jalur khusus untuk disabilitas
		Alokasi Anggaran	Rp.3.500.000,-
	Komponen/ aktifitas 3	(Diambil dari GAP langkah 7)	
		Tujuan	Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sector
		Alokasi Anggaran	Rp.500.000,-
	Komponen/ aktifitas 4	(Diambil dari GAP langkah 7)	
		Tujuan	Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyandang disabilitas
		Alokasi Anggaran	Rp.2.000.000,-
	Total anggaran		Rp.8.000.000,-
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Terciptanya Layanan PATEN Kecamatan yang responsif gender		

Padang Laweh, 26 Juni 2024

Plt. Camat Padang Laweh

Yohan Sarori, S.STP

NIP. 19930421 201609 1 001

Kepala Bapperida

Kepala Dinas Sosial, P3A,

PAKB

PARYANTO, S.Sos, MT

MARTIN EFENDI, S.Hut. MM

NIP. 19690609 198902 1 001

NIP. 19790905 200801 1018

Inspektur

Kepala BKD

Drs. ANDI SUMANTO, CfrA

ASRI AP, M.Si

NIP. 1968 1220 1990909 1 001

NIP. 19750225 199501 1 001

FORM KAK/ TOR

Program		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Program		Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Non Perizinan
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
	Gambaran Umum	Kebutuhan Sarana Prasarana Layanan Disabilitas
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Adanya Pelayanan Admnistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
	Indikator Kinerja	Jumlah layanan Non perizinan yang dikeluarkan
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Meningkatkan Pelayanan Admnistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Pengadaan Langsung
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kecamatan Padang Laweh
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Non Perizinan Penanggung Jawab : Camat Padang Laweh
Jadwal		Bulan April 2025
Biaya		Rp. 8.000.000,-



Padang Laweh, 26 Juni 2024

Plt. Camat Padang Laweh.

YOHAN SARORI, S.STP
NIP. 19930421 201609 1 001

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 1
Mengatasi Kesenjangan Gender

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
KEGIATAN: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
TUJUAN: Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang serta keterwakilan forum anak	<u>Akses :</u> <u>Partisipasi :</u> Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang <u>Manfaat :</u> Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang	<ul style="list-style-type: none"> - belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang - Sedikitnya jumlah kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan - Belum adanya keterwakilan usulan anak2 di musrenbang Kecamatan 	Kurang nya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang Kurang nya informasi tentang kegiatan Musrenbang Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang	Terumuskan nya usulan program Perioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025 yang responsif gender	Mengumpulkan DURKP Nagari Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan Distribusi undangan ke nagari Menjalin koordinasi dan Sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur Tersusunnya usulan prioritas kecamatan Dari kehadiran tahun 2024 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandingan nya lak-laki 80% dan perempuan 20%	7.a Output : Tersedianya data DURKP dan data usulan prioritas kecamatan Input : Rp. 1.075.000,- Outcome : Tersusunnya data usulan musrenbang kecamatan 7b.Output Tersalurnya undangan musrenbang Input : Rp. 500.000
	Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun Tahun 2021 : 80 org Tahun 2022 : 80 org Tahun 2023 : 80 org Tahun 2024 : 80 org							

SASARAN Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Tahun 2023, dari 80 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 50 orang peserta laki-laki dan 24 Orang peserta perempuan dan 6 Orang peserta dari forum anak Tahun 2024 dari 80 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 58 orang peserta laki-laki dan 22 Orang peserta perempuan	Kontrol Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang - Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan 	Sosial Budaya Minang kabau, dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat		Mekomendasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang Melakukan sosialisasi internal tentang penting keterwakilan perempuan di musrenbang	Meningkatnya usulan Peserta Laki-laki 16 % dan perempuan meningkat dari 0 % menjadi 3%	Outcome Tersiarnya acara musrenbang 7c. Output Jumlah koordinasi dan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasipenceranaan musrenbang Input: Rp. 8.400.000- Outcome: Meningkatnya pemahaman tentang perencanaan pembangunan
---	---	---	--	---	--	---	--	---

Padang Laweh, 26 Juni 2024
Pt. CAMAT PADANG LAWEH

Yohan Sarori, S.STP
NIP. 1993 201509 1 001

Inspektur, Drs. ANDI SUMANTO, CfrA NIP. 1968 1220 1990909 1 001	TIM VERIFIKASI Kepala BKD ASRIL AP, Msi NIP. 1975 2225 199501 1 001	Kepala Bapperida PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 197909052008011018
---	--	--	---

FORMAT GBS (1)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) Mengatasi Kesenjangan Gender			
SKPD	: KECAMATAN PADANG LAWEH		
TAHUN ANGGARAN	: 2025		
PROGRAM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
KODE PROGRAM	7.01.03		
KEGIATAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
HASIL/OUTPUT	Terumuskan-nya usulan program Prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RPKD Tahun Anggaran 2025 yang responsif		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender). Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya,</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang b. Tahun 2023 dari 80 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 50 orang peserta laki-laki dan 24 Orang peserta perempuan , dan 6 orang peserta dari forum anak c. Tahun 2024 dari 80 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 50 orang peserta laki-laki dan 2 Orang peserta perempuan <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang b. belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang c. Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang 		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	(Diambil dari GAP langkah 7)	
		Tujuan	Mengumpulkan dan merekap DURKP Nagari
		Alokasi Anggaran	Rp. 1.075.000
	Komponen/ Aktifitas 2	Tujuan	Distribusi undangan ke nagari
		Alokasi Anggaran	Rp. 500.000
	Komponen/ Aktifitas 3	Tujuan	Menjalin koordinasi dan Sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar
		Alokasi Anggaran	8.400.000,-
	Total Anggaran		Rp.9.975.000
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RPKD Yang Responsif Gender		

Padang Laweh, 26 Juni 2024

Plt. Camat Padang Laweh,

Yohan Sarori, S.STP

NIP. 19930421 201609 1 001

Kepala Bapperida

Kepala Dinas Sosial, P3A,
P3KB

PARYANTO, S.Sos, MT

NIP. 19690609 198902 1 001

MARTIN EFENDI, S.Hut. MM

NIP. 19790905 2008011018



Drs. ANDISUMANTO, CfrA
NIP. 1968 1220 1990909 1 001



ASRIL AP,MSI
NIP. 19750225 199501 1 001



FORM KAK/ TOR

Program		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Sasaran Program		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Di Desa
Latar Belakang	Dasar Hukum	Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 000.7.2/34/Bappedda tanggal 16 Februari 2024 perihal Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan
	Gambaran Umum	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang
	Indikator Kinerja	Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Merumuskan Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Mengundang utusan nagari dan stakeholker terkait untuk merumuskan usulan prioritas musrenbang kecamatan dalam satu ruang dan waktu yang telah ditentukan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kecamatan Padang Laweh
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Di Desa Penanggung Jawab : Camat Padang Laweh
Jadwal		Bulan Februari 2025
Biaya		Rp. 9.975.000,-


Padang Laweh, 26 Juni 2024
Pt. Camat Padang Laweh,
YOHAN SARORI, S.STP
NIP. 19930421 201609 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (SERVICE DELIVERY)

OPD : RSUD SUNGAI DAREH

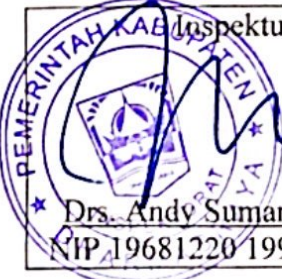
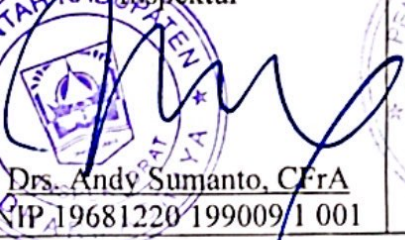

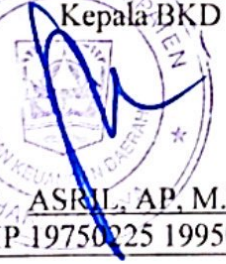

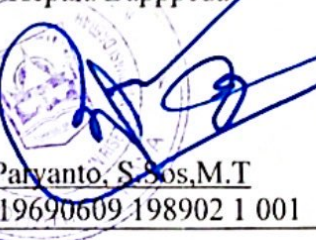

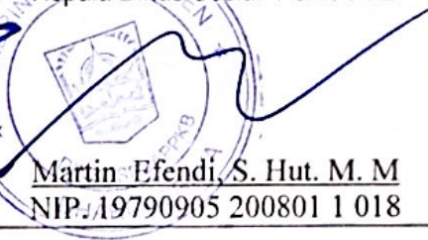
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan: Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1. Pemeliharaan rutin gedung RS merupakan pemeliharaan terhadap gedung RS untuk peningkatan pelayanan kepada pasien yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana 2. Jumlah kunjungan pasien : Tahun 2021 laki-laki 2.922 dan perempuan 3.765 Tahun 2022 laki-laki 4.392 dan perempuan 4.758 Tahun 2023 laki-laki 4.199 dan perempuan 5168	Akses : Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana Manfaat : Meningkatkan mutu pelayanan terutama keselamatan pasien di rumah sakit Partisipasi : Seluruh pasien lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan	1. Belum pahamnya konsep gender pada waktu perencanaan pembangunan gedung Belum adanya survey yang memuat indikator pasien lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan	1. Konsultan perencanaan belum memahami pembangunan gedung berbasis gender 2. Masyarakat belum memahami konsep gender	Peningkatan mutu pelayanan, dengan menyediakan sarana yang responsif gender	Pemeliharaan gedung rumah sakit	Jumlah kunjungan pasien rawat inap : Tahun 2021 laki-laki 2.922 dan perempuan 3.765 Tahun 2022 laki-laki 4.392 dan perempuan 4.758 Tahun 2023 laki-laki 4.199 dan perempuan 5168	Output : Terlaksananya pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Perinatologi, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Paru, Rawat Inap HCU, Rawat Inap Isolasi dan Rawat Inap VIP

<u>Pekerjaan :</u> Pemeliharaan Rutin Gedung RS <u>Tujuan :</u> Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit		<u>Kontrol :</u> Pemahaman dan kesadaran manajemen rumah sakit belum optimal.						<u>Outcome :</u> Meningkatnya keselamatan pasien di RSUD Sungai Dareh
---	--	---	--	--	--	--	--	--


 Pujung, 20 Juni 2024
 Direktur RSUD Sungai Dareh

Sarti Novita, S.Si, AP, M. KM
 NIP. 19771117 200501 2 008

Tim Verifikasi

 Inspektur  <u>Drs. Andy Sumanto, C.FrA</u> NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD  <u>ASRI L., AP, M.Si</u> NIP. 19750225 199501 100	 Kepala Bappeda  <u>Paryanto, S.Sos, M.T</u> NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial P3A PPKB  <u>Martin Efendi, S. Hut. M. M</u> NIP. 19790905 200801 1 018
--	--	---	--

**GENDER BUDGET STATEMENT
(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)**




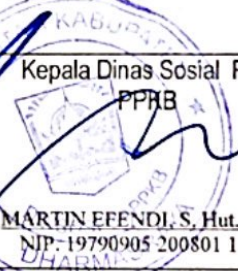
SKPD : RSUD Sungai Dareh			
TAHUN ANGGARAN : 2025			
PROGRAM	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat		
KODE PROGRAM	1.02.02		
KEGIATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
HASIL/OUTPUT	Terlaksananya pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap rawat inap : Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Perinatologi, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Paru, Rawat Inap HCU, Rawat Inap Isolasi dan Rawat Inap VIP		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <p>a. Salah satu indikator penilaian Akreditasi rumah sakit adalah indikator keselamatan pasien, yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung keselamatan pasien.</p> <p>b. Pemeliharaan rutin gedung RS merupakan pemeliharaan terhadap gedung RS untuk peningkatan pelayanan kepada pasien yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana</p> <p>c. Jumlah kunjungan pasien rawat Inap : Tahun 2021 laki-laki 2.922 dan perempuan 3.765 Tahun 2022 laki-laki 4.392 dan perempuan 4.758 Tahun 2023 laki-laki 4.199 dan perempuan 5168</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan Dengan belum tersedianya sarana berupa WC duduk untuk pasien rawat inap untuk pasien disabilitas, lansi, ibu hamil dan ibu melahirkan akan menimbulkan kesenjangan dilihat dari aspek berikut : Akses : Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana Manfaat : Meningkatkan mutu pelayanan terutama keselamatan pasien di ruang rawat inap.</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <p>c. Belum pahamnya konsep gender pada waktu perencanaan pembangunan gedung</p> <p>d. Belum adanya survey yang memuat indikator sarana untuk pasien disabilitas, lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan</p> <p>e. Penyebab Eksternal</p> <p>f. Konsultan perencana belum memahami pembangunan gedung berbasis gender</p> <p>g. Masyarakat belum memahami konsep gender</p>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Tujuan	pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap

	Alokasi Anggaran		Rp.125.000.000,-
	Komponen/ aktifitas 2	Tujuan	
		Alokasi Anggaran	
	Total anggaran		Rp. 125.000.000,-
CAPAIAN PROGRAM	<p>Output :</p> <p>Terlaksananya pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap : Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Perinatologi, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Paru, Rawat Inap HCU, Rawat Inap Isolasi, Rawat Inap Syaraf dan Rawat Inap VIP</p> <p>Outcome :</p> <p>Meningkatnya keselamatan pasien lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan di RSUD Sungai Dareh</p>		

Punjung, 20 Juni 2024
 Direktur RSUD Sungai Dareh

Sarti Novita, S.Si, APT M. KM
 NIP. 19771117 200501 2 008

Tim Verifikasi

 Inspektur <u>Drs. Andy Samanto, CFA</u> NIP. 19651220 199009 1 001	 Kepala BKD <u>ASRIL AP, M.Si</u> NIP. 19750225 199501 100	 Kepala Bappperida <u>Paryanto, S.Si, M.T</u> NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial P3A PPRB <u>MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M</u> NIP. 19790905 200801 1 018
---	--	---	--

FORM KAK/ TOR

Program		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat
Sasaran Program		Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terintegrasi
Kegiatan		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Operasional Pelayanan Rumah Sakit
LatarBelakang	DasarHukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.
	GambaranUmum	Subkegiatan operasional pelayanan rumah sakit dan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Gedung RS dilaksanakan setiap tahunnya.
Kegiatan	UraianKegiatan	pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap
	IndikatorKinerja	Meningkatnya keselamatan pasien lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan di RSUD Sungai Dareh
	BatasanKegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien di RSUD Sungai Dareh.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Membuat perencanaan kegiatan dan pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap : Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Perinatologi, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Paru, Rawat Inap HCU, Rawat Inap Isolasi dan Rawat Inap VIP
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		RSUD Sungai Dareh.
Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan		Pelaksana : PPTK pekerjaan pemeliharaan rutin rumah sakit. Penanggung Jawab : Direktur RSUD Sungai Dareh
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 125.000.0000,-

Pujung, 20 Juni 2024
 Direktur RSUD Sungai Dareh

 Sarti Novita, S.Si, APT M. KM
 NIP. 19771117 200501 2 008

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025

Urusan :						
Unit Organisasi	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh				
Sub Unit Organisasi	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh				
Program	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
Kegiatan	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan	1.02.02.2.02.32	Operasional pelayanan rumah sakit				
Sumber Pendanaan		BLUD				
Lokasi Kegiatan		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh				
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2025				
Kelompok Sasaran						
Jumlah 2022		Rp. 125.000.0000,-				
Jumlah 2023						
Jumlah 2024						
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Hitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah

Punjung, 20 Juni 2024

Direktur RSUD Sungai Dareh


Sarti Novita, S Si, APT M. KM
 NIP. 19771117 200501 2 008

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (SERVICE DELIVERY)

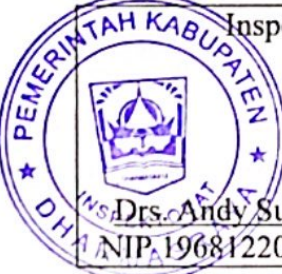

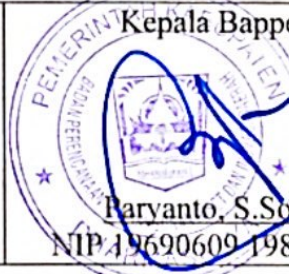

OPD : RSUD SUNGAI DAREH

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan: Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1. Pemeliharaan rutin gedung RS merupakan pemeliharaan terhadap gedung RS untuk peningkatan pelayanan kepada pasien yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana 2. Jumlah kunjungan pasien : Tahun 2021 laki-laki 2.922 dan perempuan 3.765 Tahun 2022 laki-laki 4.392 dan perempuan 4.758 Tahun 2023 laki-laki 4.199 dan perempuan 5168	Akses : Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana Manfaat : Meningkatkan mutu pelayanan terutama keselamatan pasien di rumah sakit Partisipasi : Seluruh pasien lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan	1. Belum pahamnya konsep gender pada waktu perencanaan pembangunan gedung Belum adanya survey yang memuat indikator pasien lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan	1. Konsultan perencanaan belum memahami pembangunan gedung berbasis gender 2. Masyarakat belum memahami konsep gender	Peningkatan mutu pelayanan, dengan menyediakan sarana yang responsif gender	Pemeliharaan gedung rumah sakit	Jumlah kunjungan pasien rawat inap : Tahun 2021 laki-laki 2.922 dan perempuan 3.765 Tahun 2022 laki-laki 4.392 dan perempuan 4.758 Tahun 2023 laki-laki 4.199 dan perempuan 5168	Output : Terlaksananya pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Perinatologi, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Paru, Rawat Inap HCU, Rawat Inap Isolasi dan Rawat Inap VIP

<u>Pekerjaan :</u> Pemeliharaan Rutin Gedung RS <u>Tujuan :</u> Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit		<u>Kontrol :</u> Pemahaman dan kesadaran manajemen rumah sakit belum optimal.						<u>Outcome :</u> Meningkatnya keselamatan pasien di RSUD Sungai Dareh
---	--	---	--	--	--	--	--	--

Punjung, 20 Juni 2024
 Direktur RSUD Sungai Dareh

 Sarti Novita, S.Si, APT M. KM
 NIP. 19771117 200501 2 008

 Inspektur Drs. Andy Sumanto, CFrA NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD ASRI, AP, M.Si NIP. 19750225 199501 100	Tim Verifikasi  Kepala Bapperida Paryanto, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial P3A PPKB Martin Efendi, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018
--	--	--	---

**GENDER BUDGET STATEMENT
(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)**

SKPD : RSUD Sungai Dareh		
TAHUN ANGGARAN : 2025		
PROGRAM	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	
KODE PROGRAM	1.02.02	
KEGIATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
HASIL/OUTPUT	Terlaksananya pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap rawat inap : Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Perinatologi, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Paru, Rawat Inap HCU, Rawat Inap Isolasi dan Rawat Inap VIP	
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <p>a. Salah satu indikator penilaian Akreditasi rumah sakit adalah indikator keselamatan pasien, yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung keselamatan pasien.</p> <p>b. Pemeliharaan rutin gedung RS merupakan pemeliharaan terhadap gedung RS untuk peningkatan pelayanan kepada pasien yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana</p> <p>c. Jumlah kunjungan pasien rawat Inap : Tahun 2021 laki-laki 2.922 dan perempuan 3.765 Tahun 2022 laki-laki 4.392 dan perempuan 4.758 Tahun 2023 laki-laki 4.199 dan perempuan 5168</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan Dengan belum tersedianya sarana berupa WC duduk untuk pasien rawat inap untuk pasien disabilitas, lansi, ibu hamil dan ibu melahirkan akan menimbulkan kesenjangan dilihat dari aspek berikut : Akses : Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana Manfaat : Meningkatkan mutu pelayanan terutama keselamatan pasien di ruang rawat inap.</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <p>c. Belum pahamnya konsep gender pada waktu perencanaan pembangunan gedung</p> <p>d. Belum adanya survey yang memuat indikator sarana untuk pasien disabilitas, lansi, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan</p> <p>e. Penyebab Eksternal</p> <p>f. Konsultan perencana belum memahami pembangunan gedung berbasis gender</p> <p>g. Masyarakat belum memahami konsep gender</p>	
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	
	<table> <tr> <td>Tujuan</td><td>pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap</td></tr> </table>	Tujuan
Tujuan	pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap	

		Alokasi Anggaran	Rp.125.000.000,-
	Komponen/ aktifitas 2		
		Tujuan	
		Alokasi Anggaran	
	Total anggaran		Rp. 125.000.000,-
CAPAIAN PROGRAM	<p>Output :</p> <p>Terlaksananya pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap : Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Perinatologi, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Paru, Rawat Inap HCU, Rawat Inap Isolasi, Rawat Inap Syaraf dan Rawat Inap VIP</p> <p>Outcome :</p> <p>Meningkatnya keselamatan pasien lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan di RSUD Sungai Dareh</p>		

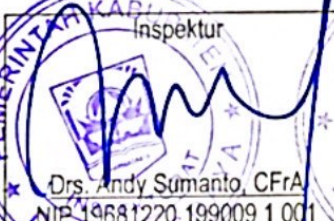

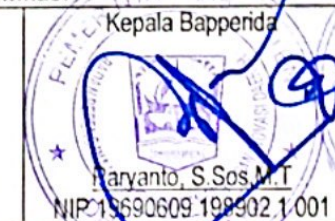
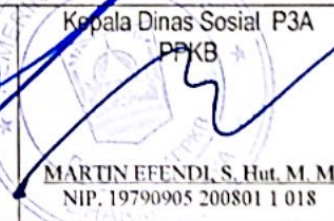
Punjung, 20 Juni 2024

Direktur RSUD Sungai Dareh

Sarti Novita, S Si, APT M. KM

NIP.1977/117 200501 2 008

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapperida	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB
			
Drs. Andy Sumanto, CFA NIP.19681220.199009 1 001	ASRIL, AP, M.Si NIP.19780225 199501 100	Maryanto, S.Sos.M.T NIP.19690609 198902 1 001	MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018

FORM KAKI/ TOR

Program		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat
Sasaran Program		Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terintegrasi
Kegiatan		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Operasional Pelayanan Rumah Sakit
LatarBelakang	DasarHukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.
	GambaranUmum	Subkegiatan operasional pelayanan rumah sakit dan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Gedung RS dilaksanakan setiap tahunnya.
Kegiatan	UraianKegiatan	pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap
	IndikatorKinerja	Meningkatnya keselamatan pasien lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan di RSUD Sungai Dareh
	BatasanKegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien di RSUD Sungai Dareh.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Membuat perencanaan kegiatan dan pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap : Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Perinatologi, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Paru, Rawat Inap HCU, Rawat Inap Isolasi dan Rawat Inap VIP
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		RSUD Sungai Dareh.
Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan		Pelaksana : PPTK pekerjaan pemeliharaan rutin rumah sakit. Penanggung Jawab : Direktur RSUD Sungai Dareh
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 125.000.0000,-



Pujung, 20 Juni 2024

Direktur RSUD Sungai Dareh

Sarti Novita, S Si, APT M. KM

NIP. 19771117 200501 2 008

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025

Urusan :		
Unit Organisasi	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh
Sub Unit Organisasi	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh
Program	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.02.02.2.02.32	Operasional pelayanan rumah sakit
Sumber Pendanaan		BLUD
Lokasi Kegiatan		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2025
Kelompok Sasaran		
Jumlah 2022		Rp. 125.000.0000,-
Jumlah 2023		
Jumlah 2024		
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil		
Rincian Hitungan		
Kode Rekening	Uraian	Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah

Ponjung, 20 Juni 2024
Direktur RSUD Sungai Dareh


 Sarti Novita, S Si, APT M. KM
 19771117 200501 2 008

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat (Service delivery)

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



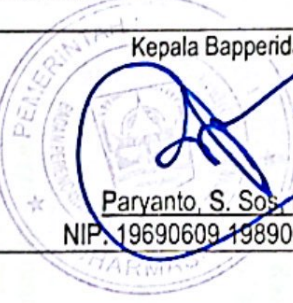

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Tujuan : Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum Sasaran : Operasi Penyakit Masyarakat	-Dalam Operasi penertiban Penegakan Peraturan Daerah, pada umumnya yang terjaning adalah perempuan -Pedagang kakilima mayoritas perempuan -Adanya laporan masyarakat tentang wanita penghibur yang ada di cafe-cafe dan tempat hiburan malam	Akses : Kegiatan Operasi penegakan Perda dan Perkada yang belum maksimal Partisipasi: Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam menjaga Ketenteraman dan ketertiban umum Kontrol: Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya laki-laki yang seharusnya lebih banyak diberi penyuluhan tentang dampak dan bahaya Penyakit Masyarakat. Manfaat : Kurangnya Sosialisasi penyuluhan dan pembinaan dari pihak-pihak terkait tentang Perda dan Perkada	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya Sosialisasi tentang Perda dan Perkada Pemahaman SDM yang kurang tentang Pengarusutamaan Gender 	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya alokasi dana terhadap kegiatan Penegakan Perda dan Perkada Masih kurangnya Sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan Daerah 	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan Sosialisasi Perda dan Perkada di 11 Kecamatan 2. Meningkatkan Jumlah Operasi Penegakan Perda dan Perkada	Berkurangnya Pelanggaran Perda dan Perkada	Output Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Input Rp. 87.000.000,- Outcome Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pulau Punjung, Juni 2024

PIK KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN DHARMASRAYA,



Tim Verifikasi

 <p>Inspektur</p> <p><u>Drs. Andy Sumanto, CfrA</u> NIP. 19681220 199009 1 001</p>	 <p>Kepala BKD</p> <p><u>Asri, AP, M. Si</u> NIP. 19750225 199501 1 001</p>	 <p>Kepala Bapperida</p> <p><u>Paryanto, S. Sos. M.T</u> NIP. 19690609 198902 1 001</p>	 <p>Kepala Dinas Sosial P3A PPKB</p> <p><u>MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M</u> NIP. 19820521 200012 1 002</p>
---	--	--	--

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)


SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
KODE PROGRAM	1.05.02		
KEGIATAN	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
HASIL/OUTPUT	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <p>a) Dalam Operasi penertiban Penegakan Peraturan Daerah, pada umumnya yang terjaring adalah perempuan</p> <p>b) Pedagang kakilima mayoritas perempuan</p> <p>c) Adanya laporan masyarakat tentang wanita penghibur yang ada di cafe-cafe dan tempat hiburan malam.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses : Kegiatan Operasi penegakan Perda dan Perkada yang belum maksimal</p> <p>Partisipasi:</p> <p>Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam menjaga Ketenteraman dan ketertiban umum</p> <p>Kontrol:</p> <p>Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya laki-laki yang seharusnya lebih banyak diberi penyuluhan tentang dampak dan bahaya Penyakit Masyarakat.</p> <p>Manfaat :</p> <p>Kurangnya Sosialisasi penyuluhan dan pembinaan dari pihak-pihak terkait tentang Perda dan Perkada</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <p>a) Kurangnya Sosialisasi tentang Perda dan Perkada</p> <p>b) Pemahaman SDM yang kurang tentang Pengarusutamaan Gender</p> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <p>a) Masih rendahnya alokasi dana terhadap kegiatan Penegakan Perda dan Perkada</p> <p>b) Masih kurangnya Sosialisasi tentang Peraturan Daerah</p> <p>c) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan Daerah</p>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Meningkatkan Sosialisasi Perda dan Perkada di 11 Kecamatan	
		Tujuan	Perempuan lebih memahami tentang Perda dan Perkada
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ Aktifitas 2	Meningkatkan Jumlah Operasi Penegakan Perda dan Perkada	
		Tujuan	Memberikan efek jera kepada terhadap pelangar Perda dan Perkada
		Alokasi Anggaran	Rp. 87.000.000,-
	Total Anggaran	Rp.87.000.000,-	

Capaian Program	Out put Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Out come Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
-----------------	--


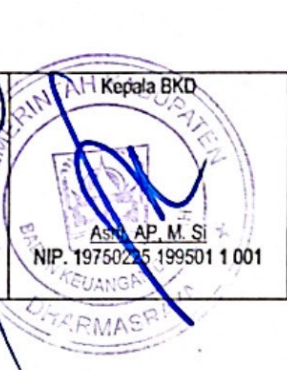

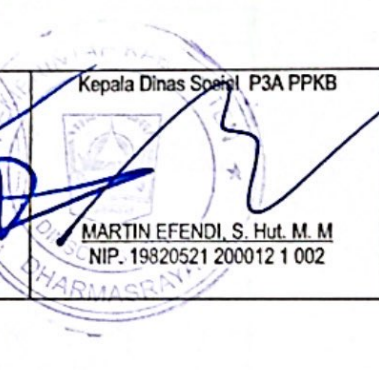
Pulau Punjung, Juni 2024

PIL. KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN DHARMASRAYA,



(YUNISMAN, S.Sos.)
NIP. 19680613 199303 1 004

Tim Verifikasi

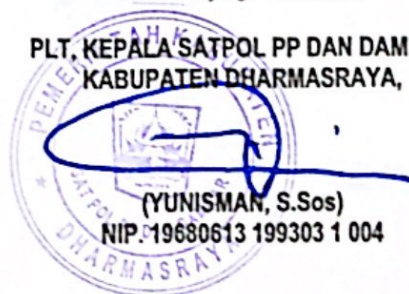
 <p>Inspektur Drs. Andi Sumanto, CHA NIP. 19681221 199004 1 001</p>	 <p>Kepala BKD Asst. AP. M. Si NIP. 19750225 199501 1 001</p>	 <p>Kepala Bapperida Paryanto, S. Sos. M.T NIP. 19690609 198902 1 001</p>	 <p>Kepala Dinas Sport P3A PPKB MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19820521 200012 1 002</p>
---	---	--	--

FORM KAK/ TOR

Program		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sasaran Program		Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Sub Kegiatan		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat 2. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi dan Pembebanan Biaya Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Gambaran Umum	Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peratuan Kepala Daerah
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Perda dan Perkada di 11 Kecamatan
	Indikator Kinerja	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peratuan Kepala Daerah di 11 Kecamatan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Sosialisasi Perda dan Perkada kepada Masyarakat
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		11 Kecamatan
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Penanggung Jawab : Kepala Satpol PP dan Damkar
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 87.000.000,-

Pulau Punjung, Juni 2024

**PLT, KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN DHARMASRAYA,**



(YUNISMAN, S.Sos)

NIP. 19680613 199303 1 004

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat (Service delivery)

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	Dalam Operasi penertiban Pelajar, yang terjaring kebanyakan siswa laki-laki dibanding perempuan. Siswa yang terjaring kedatangan merokok Adanya laporan masyarakat tentang siswa yang berkeliaran pada jam pelajaran diindikasikan menggunakan / menghisap lem.	Akses : Masih kurangnya manfaat Kegiatan Patroli Rutin Satpol PP pelajar laki-laki dibandingkan dengan pelajar perempuan. Partisipasi: Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat tentang penyakit dalam menjaga Ketenteraman dan ketertiban umum Kontrol: Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya laki-laki yang seharusnya lebih banyak diberi penyuluhan tentang dampak dan bahaya Penyakit Masyarakat. Manfaat : Kurangnya Sosialisasi penyuluhan dan pembinaan dari pihak-pihak terkait tentang	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Patroli rutin Saatpol PP yang masih belum mencapai target SPM. Pemahaman SDM yang kurang tentang Pengarusutamaan Gender 	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya alokasi dana terhadap kegiatan Patroli Satpol PP Masih kurangnya Pengawasan bersama baik pihak keluarga maupun sekolah Peraturan sekolah tentang kedisiplinan siswa Kurangnya peran masyarakat tentang pengawasan bersama terhadap anak sekolah 	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan persentase Sosialisasi dan penyuluhan terhadap siswa laki-laki 2. Meningkatkan Patroli rutin Satpol pp	Berkurangnya Pelajar laki-laki yang berkeliaran pada jam pelajaran	Out put - Terlaksananya Patroli Rutin Satpol PP terutama pada Pelajar yang tidak masuk pada jam pelajaran Input : Rp. 253.000.000,- Out Come : Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengamanan, dan Pengawasan		bahaya penyakit masyarakat						
Tujuan : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum								

Pulau Punjung, Juni 2024


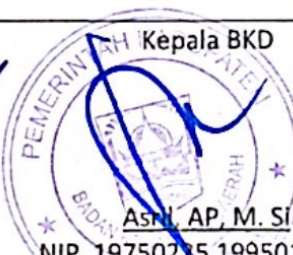
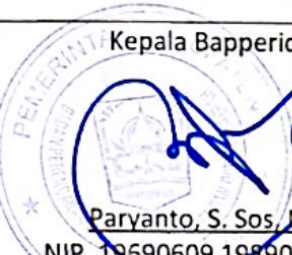

PIt,KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN DHARMASRAYA,



(YUNISMAN, S.Sos.)

NIP. 19680613 199303 1 004

Tim Verifikasi

 Inspektur <u>Drs. Andy Sumanto, CfrA</u> NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD <u>Asri, AP, M. Si</u> NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida <u>Paryanto, S. Sos, M.T</u> NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial P3APPKB <u>MARTIN EFENDI, S.Hut, M.M</u> NIP. 19790905 200801 1 018
---	---	---	---

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

TAHUN ANGGARAN : 2025



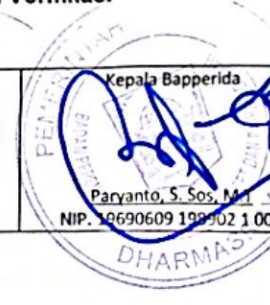

PROGRAM	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
KODE PROGRAM	1.05.02		
KEGIATAN	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
HASIL/OUTPUT	Terlaksananya Patroli Rutin Satpol PP terutama pada Pelajar yang tidak masuk pada jam pelajaran		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Dalam Operasi penertiban Pelajar, yang terjaring kebanyakan siswa laki-laki dibanding perempuan. Siswa yang terjaring kedapatan merokok Adanya laporan masyarakat tentang siswa yang Berkeliaran pada jam pelajaran diindikasikan menggunakan / menghisap lem.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Akses : Masih kurangnya manfaat Kegiatan Patroli Rutin Satpol PP pelajar laki-laki dibandingkan dengan pelajar perempuan.</p> <p>Partisipasi: Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat tentang penyakit dalam menjaga Ketenteraman dan ketertiban umum</p> <p>Kontrol: Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya laki-laki yang seharusnya lebih banyak diberi penyuluhan tentang dampak dan bahaya Penyakit Masyarakat.</p> <p>Manfaat : Kurangnya Sosialisasi penyuluhan dan pembinaan dari pihak-pihak terkait tentang bahaya penyakit masyarakat</p> <p>b. Penyebab Internal a) Jumlah Patroli rutin Saatpol PP yang masih belum mencapai target SPM b) Pemahaman SDM yang kurang tentang Pengarusutamaan Gender</p> <p>c. Penyebab Eksternal a) Masih rendahnya alokasi dana terhadap kegiatan Patroli Satpol PP b) Masih kurangnya Pengawasan bersama baik pihak keluarga maupun sekolah</p>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Meningkatkan persentase Sosialisasi dan penyuluhan terhadap siswa laki-laki	
		Tujuan	Agar pelajar laki-laki tidak berkeliaran pada jam pelajaran
		Alokasi	
		Anggaran	

	Komponen/ Aktifitas 2	Meningkatkan Patroli rutin Satpol pp	
		Tujuan	Memberikan efek jera kepada pelajar yang berkeliaran pada jam pelajaran
		Alokasi Anggaran	Rp. 253.000.000,-
	Total Anggaran	Rp. 253.000.000,-	
Capaian Program	Out put Terlaksananya Patroli Rutin Satpol PP terutama pada Pelajar yang tidak masuk pada jam pelajaran Out come Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum		

Pulau Punjung, Juni 2024
Pit, KEPALA SATPOL PP DAN
DAMKAR
KABUPATEN DHARMASRAYA,


(YUNISMAN, S.Sos)
NIP. 19680613 199303 1 004

Tim Verifikasi

 Inspektur Drs. Andy Samanto, CfrA NIP. 19591221 199009 1 001	 Kepala BKD Ariil, AP, M. Si NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida Paryanto, S. Sos, M. I NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial P3A PPKB MARTIN EFFENDI, S.Hut, M.M NIP. 19790905 200801 1 018
---	---	--	---

FORM KAK/ TOR

Program		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sasaran Program		Terlaksananya Patroli Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat 2. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi dan Pembebanan Biaya Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Gambaran Umum	Patroli Rutin dan Pengamanan Kegiatan Daerah dan Masyarakat
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Patroli Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Indikator Kinerja	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Melakukan Patroli pada tempat-tempat yang diindikasikan adanya Gangguan Trantibum
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Patroli, Sosialisasi dan Pengamanan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Wilayah Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Penanggung Jawab : Kepala Satpol PP dan Damkar
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 253.000.000,-

Pulau Punjung, Juni 2024
 PIt, KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
 KABUPATEN DHARMASRAYA,



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD
SEKRETARIAT DAERAH

OPD : Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

PROGRAM : Penataan Organisasi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : Penataan Organisasi Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	<ul style="list-style-type: none"> 5 dari 27 OPD terlambat dalam penyusunan LAKIP dan dokumen SAKIP lainnya 7 dari 11 Kecamatan terlambat dalam penyusunan LAKIP dan dokumen SAKIP lainnya 2 dari 27 OPD tidak Melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 	Akses : Beberapa Kecamatan memiliki Akses yang sulit, seperti Kecamatan Asam Jujuhan, dan Kecamatan Sembilan Koto Partisipasi : Kontrol : Beberapa Pimpinan Instansi Pemerintah tidak peduli dengan Penyusunan SAKIP dan Implementasi RB Manfaat : Tidak Semua OPD yang melaksanakan pemerintahan secara efektif dan efisien.	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas SDM yang memahami tentang Reformasi Birokrasi dan SAKIP kurang memadai Kurangnya Komitmen Pimpinan Instansi Pemerintah Kurangnya Sosialisasi tentang pentingnya penerapan SAKIP dan RB dalam menjalankan pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan mengenai Penerapan SAKIP dan RB mengalami perubahan dan tidak ada pendampingan dari Provinsi bahkan Menpan-RB tentang strategi peningkatan pelaksanaan SAKIP dan RB Kelengkapan data 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi dengan cara peningkatan implementasi SAKIP dan RB yang berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> meningkatkan kapasitas SDM pengelola SAKIP dan RB dengan melaksanakan Bimtek serta bimbingan langsung ke OPD yang memiliki kesulitan akses terhadap informasi mengenai SAKIP dan RB meningkatkan komitmen pimpinan dengan penandatanganan komitmen terhadap kinerja setra penandatanganan pakta integritas untuk berkinerja baik 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase OPD yang mengumpulkan LAKIP Tepat waktu 81,5% Persentase Kecamatan yang mengumpulkan LAKIP tepat waktu 36,4 % Persentase OPD yang melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 92,6 % Kecamatan yang melakukan PMPRB 0% 	Input : Output : <ul style="list-style-type: none"> Persentase OPD dan Kecamatan yang menerapkan SAKIP dan RB Persentase kecamatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM tentang penerapan SAKIP dan RB Persentase OPD yang mendapatkan sosialisasi mengenai SAKIP dan RB

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
						3. sosialisasi secara massive mengenai pentingnya penerapan SAKIP dan RB terhadap pemerintahan melalui daring maupun luring		Out Come : - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Indeks Reformasi Birokrasi

Pulau Pinang, Juni 2024

KEPALA BAGIAN ORGANISASI
KABUPATEN DHARMASRAYA



SUGEDIYANTO, SE
NIP. 19660620 198601 1 001

Tim Verifikasi

 Inspektur Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD Asril, AP, M. Si NIP 19750225 199501 1 001	 Kepala BAPPERIDA Parvanto, S. Sos, M.T NIP 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial P3APKB MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP 19790905 200801 1 018
---	---	--	--

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya

TAHUN ANGGARAN : 2024

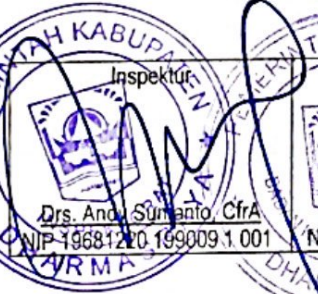



PROGRAM	Penataan Organisasi
KODE PROGRAM	4.01.1.2.13
KEGIATAN	4.01.1.2.13.3
HASIL/ OUTPUT	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 dari 27 OPD terlambat dalam penyusunan LAKIP dan dokumen SAKIP lainnya 7 dari 11 Kecamatan terlambat dalam penyusunan LAKIP dan dokumen SAKIP lainnya - 2 dari 27 OPD tidak Melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses : Beberapa Kecamatan memiliki Akses yang sulit, seperti Kecamatan Asam Jujuhan, dan Kecamatan Sembilan Koto</p> <p>Partisipasi :</p> <p>Kontrol : Beberapa Pimpinan Instansi Pemerintah tidak peduli dengan Penyusunan SAKIP dan Implementasi RB</p> <p>Manfaat : Tidak Semua OPD yang melaksanakan pemerintahan secara efektif dan efisien.</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas SDM yang memahami tentang Reformasi Birokrasi dan SAKIP kurang memadai - Kurangnya Komitmen Pimpinan Instansi Pemerintah - Kurangnya Sosialisasi tentang pentingnya penerapan SAKIP dan RB dalam menjalankan pemerintahan <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan mengenai Penerapan SAKIP dan RB mengalami perubahan dan tidak ada pendampingan dari Provinsi bahkan Menpan-RB tentang strategi peningkatan pelaksanaan SAKIP dan RB - Kelengkapan data
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. TOLAK UKUR Jumlah Dana : 88.570.000,-</p> <p>2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA</p> <p><u>INPUT</u> Dana yang dibutuhkan 88.57.000</p> <p><u>OUTPUT</u> Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan implementasi reformasi birokrasi</p>

	OUTCOME Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Meningkatkan kapasitas SDM pengelola SAKIP dan RB dengan melaksanakan Bimtek serta bimbingan langsung ke OPD yang memiliki kesulitan akses terhadap informasi mengenai SAKIP dan RB Tujuan Peningkatan SDM Pengelola SAKIP dan RB Alokasi Anggaran Rp.50.000.000
	Komponen/ Aktifitas 2	Meningkatkan komitmen pimpinan dengan penandatanganan komitmen terhadap kinerja setra penandatanganan pakta integritas untuk berkinerja baik Tujuan Peningkatan Komitmen Pimpinan Alokasi Anggaran Rp.18.000.000
	Komponen/ Aktifitas 3	Sosialisasi secara massive mengenai pentingnya penerapan SAKIP dan RB terhadap pemerintahan melalui daring maupun luring Tujuan Percepatan penyebaran informasi mengenai SAKIP dan RB Alokasi Anggaran Rp.20.570.000
	Total Anggaran	Rp.88.570.000
	Capaian Program	
	Out put - Persentase OPD dan Kecamatan yang menerapkan SAKIP dan RB - Persentase kecamatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM tentang penerapan SAKIP dan RB - Persentase OPD yang mendapatkan sosialisasi mengenai SAKIP dan RB Out come - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Indeks Reformasi Birokrasi	

Pulau Pinang, Juni 2024
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
KABUPATEN DHARMASRAYA

SUGEDIYANTO, SE
 NIP. 19660620 198601 1 001

Tim Verifikasi

 Drs. Andri Sumanto, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001	 Asn. AP, M. Si NIP. 19750225 199501 1 001	 Paryanto, S. Sos. M. I NIP. 19690609 198902 1 001	 MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018
--	--	---	---

FORM KAK/ TOR

Program		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program		1. Nilai SAKIP 2. Nilai LPPD
Kegiatan		Penataan Organisasi
Sub Kegiatan		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. PERPRES No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 tentang perubahan peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
	Gambaran Umum	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di singkat SAKIP merupakan system yang memastikan jalannya pemerintahan secara efektif dan efisien, sehingga tidak ada satupun anggaran pun yang tidak memiliki manfaat kepada masyarakat, dan Reformasi Birokrasi memastikan pemerintahan yang baik dan bersih
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Melaksanakan Bimbingan teknis, sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi mengenai penerapan SAKIP dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
	Indikator Kinerja	- Nilai SAKIP OPD - Jumlah OPD yang melakukan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
	Batasan Kegiatan	- Bimtek SAKIP RB - Sosialisasi SAKIP RB - Penyusunan Laporan - Penyusunan dokumen SAKIP RB - Pengumpulan data dukung
Maksud dan Tujuan		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Rapat, Koordinasi, sosialisasi
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Pelaksana: Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Dharmasraya Penanggungjawab: Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2024
Biaya		Rp. 88.570.000



GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 1

Mengatasi Kesenjangan Gender

Kecamatan : SUNGAI RUMBAI
Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

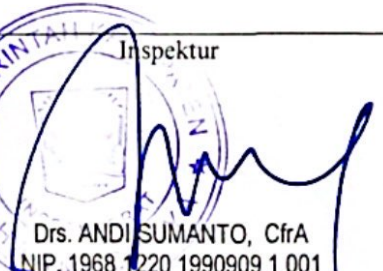
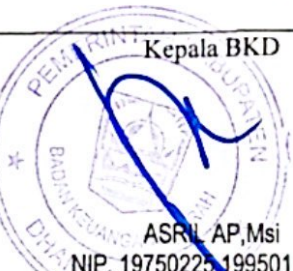
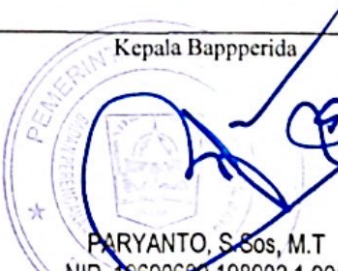

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan KEGIATAN: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa SUB KEGIATAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Di Desa	Data Pembuka Wawasan Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya Yang di ikuti oleh 4 Nagari (Nagari Sungai Rumbai,Nagari Sungai Rumbai Timur, Nagari Kurnia Koto Salak, Kurnia Selatan) Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2021 : 98 org Tahun 2022 : 100 org Tahun 2023 : 123 org Tahun 2024 : 125 org Tahun 2021 dari 98 Orang ada, diikuti oleh	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan Akses : Partisipasi : Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang Manfaat : Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang	Sebab Kesenjangan Internal - belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang - Sedikitnya jumlah/kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan - belum paham betul tentang pengasutan an gender	Sebab Kesenjangan Eksternal Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang Sosial Budaya Minang kabau, dimana	Reformulasi Tujuan Terumuskan-nya usulan program Prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025 yang responsif gender	Rencana Aksi Mengumpulkan DURKP Nagari Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan Distribusi undangan ke nagari Menjalin koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait secara iinternal sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	Data Dasar (Baseline) Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur Tersusunnya usulan prioritas kecamatan Dari kehadiran tahun 2024 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandinganny a lak-laki 68% dan perempuan 32% Meningkatnya	Indikator Gender Output: Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing –masing usulan yang menjadi prioritas Input: Rp.25.000,000,- Outcome: Untuk melihat usulan masing – masing nagari yang mendukung adanya

<p>TUJUAN: Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD</p> <p>SASARAN Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan</p>	<p>sebanyak 52 orang peserta laki-laki dan 46 Orang peserta perempuan</p> <p>Tahun 2022 di ikuti oleh 100 orang peserta laki-laki 55 dan 45 orang peserta perempuan</p> <p>Tahun 2023 di ikuti oleh 123 orang peserta laki-laki 80 dan 43 orang peserta perempuan serta ada 10 orang dari perwakilan Forum Anak</p> <p>Tahun 2024 diikuti oleh 125 orang peserta Laki-laki 85 Orang dan 40 orang orang perempuan.</p>		<p>- Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang</p>	<p>perempuan tidak banyak memberikan pendapat</p>		<p>Menyampaikan saran ke bappeda untuk membuat regulasi tentang keterwakilan Perempuan dan anak di Musrenbang</p> <p>Sosialisasi Musrenbang ke masyarakat</p>	<p>usulan Peserta Laki-laki 32,2 % dan perempuan meningkat 20,25 %</p> <p><i>Dari Notulen Usulan Musrenbang 2024 jumlah yang dundang 100. laki-laki yang hadir sebanyak 85Orang, dan yang menyampaikan usulan 35 orang(42 %)</i></p>	<p>kegiatan yang responsif gender</p> <p>Output: Melakukan Sosialisai Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang</p> <p>Input: Rp.25.000.000</p> <p>Outcome: Menigkatnya tingkat kehadiran dan keberanian Perempuan menyampaikan usulan dalam proses pelaksanaan musrenbang, serta tertampungnya pada Musrenbang RKPD Kabupaten yang responsif gender</p>
--	---	--	---	---	--	---	---	--

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	<p>Dari Notulen Usulan Musrenbang 2024 jumlah yang diundang 100 laki-laki yang hadir sebanyak 85 Orang. dan yang menyampaikan usulan 35 orang(42 %)</p> <p>peserta perempuan yang di undang 60. orang dan yang hadir 40 Orang serta yang menyampaikan usulan sebanyak 23 orang (57%)</p>	<p><u>Kontrol</u></p> <p>Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya</p>	<p>Adanya kekurangan pegawai di bidang PMN yang mengelola Musrenbang Kecamatan</p>				<p>peserta perempuan yang di undang 60. orang dan yang hadir 40 Orang serta yang menyampaikan usulan sebanyak 23 orang (57 %)</p>	



TIM VERIFIKASI

<p>Inspektur</p>  <p>Drs. ANDI SUMANTO, CfrA NIP. 1968 1220 1990909 1 001</p>	<p>Kepala BKD</p>  <p>ASRI AP, Msi NIP. 19750225 199501 1 001</p>	<p>Kepala Bappperida</p>  <p>PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB</p>  <p>MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 19820521 200012 1 002</p>
--	---	---	--

FORMAT GBS (1)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) Mengatasi Kesenjangan Gender			
SKPD	: KECAMATAN SUNGAI RUMBAI		
TAHUN ANGGARAN	: 2024		
PROGRAM	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
KODE PROGRAM	7.01.03		
KEGIATAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
HASIL/OUTPUT	Terumuskannya prioritas usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung pada Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2024 yang responsif gender		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya; Di Kecamatan Sungai Rumbai terdiri dari 4 Nagari masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang</p> <ul style="list-style-type: none"> Tahun 2024 diikuti oleh 125 orang peserta diantaranya 85 orang peserta laki-laki dan 40 orang perempuan. <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Sangat sedikit Keterwakilan perempuan karena belum adanya aturan yang mewajibkan tingkat keterwakilan perempuan dan komitmen pihak terkait tentang pelaksanaan musrenbang.</p> <p>b. Masih sedikit perwakilan perempuan yang memberikan atau mengajukan usulan dalam kegiatan Musrenbang.</p>		
RENCANA AKSI	<p>Komponen/ Aktifitas 1</p> <p>Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing –masing usulan yang menjadi prioritas</p> <p>Tujuan</p> <p>Untuk melihat usulan masing –masing nagari yang mendukung adanya kegiatan yang responsif gender</p> <p>Alokasi Anggaran</p> <p>25.000.000,-</p> <p>Komponen/ aktifitas 2</p> <p>Melakukan Sosialisai Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang</p> <p>Tujuan</p> <p>Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang</p> <p>Alokasi Anggaran</p> <p>25.000.000,-</p> <p>Total anggaran</p> <p>Rp. 50.000.000,-</p>		
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Meningkatnya tingkat kehadiran dan keberanian Perempuan menyampaikan usulan dalam proses pelaksanaan musrenbang, serta tertampungnya pada Musrenbang RKPD Kabupaten yang responsif gender		

Koto Besar, 28 Juni 2023
Camat Sungai Rumbai
ARWINTA
NIP. 19670919 198803 1 004

TIM VERIFIKASI

<p>Inspektur</p> <p>Drs. AMDI SUMANTO, CHA NIP. 1968 1220 1990909 1 001</p>	<p>Kepala BKD</p> <p>ASRIL AP, Msi NIP. 19750225 199501 1 001</p>	<p>Kepala Bapperida</p> <p>PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB</p> <p>MARTIN EFENDI, S.Hut, MM NIP. 19820521 200012 1 002</p>
--	--	---	---

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 2
Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat (service delivery)

Kecamatan : SUNGAI RUMBAI

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik


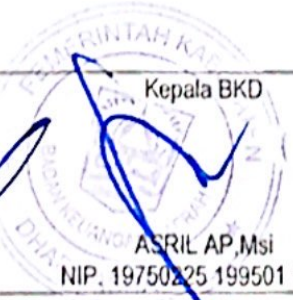


Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Adanya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
KEGIATAN: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Layanan Paten 2023 Non Disabilitas 1.147 org Disabilitas 0 orang	<u>Akses :</u> <u>Partisipasi :</u> Disiapkan jalur khusus untuk pelayanan disabilitas, disiapkan loket khusus disabilitas	- Pelayanan khusus untuk disabilitas belum diperhatikan secara khusus	Minimnya warga penyangang Disabilitas mengurus kelengkapan birodata warganegara -	Terpenuhinya layanan untuk penyangang Disabilitas	Menyediakan Sarana dan Prasarana bagi penyangang Disabilitas Menyediakan loket khusus disabilitas -	Meningkatnya keluarga yang membawa penyangang Disabilitas mengurus pelayanan Tingkat pelayanan PATEN tahun 2023 Non Disabilitas 102 % Disabilitas 0,01 %	Output : Tersedianya pengadaan Kursi roda bagi penyangang disabilitas sebanyak 5 buah dan tersedianya pembuatan jalur disabilitas Tersediannya loket khusus disabilitas Input: Rp. 75.000.000 Outcome: Terlaksananya Pengadaan Kursi roda dan pembuatan jalur untuk penyangang disabilitas Tersediannya loket khusus disabilitas Output: Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyangang disabilitas Input: Rp. 3.500.000,-
TUJUAN: Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan SOP	Jumlah Data Disabilitas dikecamatan Sungai Rumbai, sebanyak 15 orang	<u>Manfaat :</u> Mempercepat proses alur pelayanan khusus disabilitas <u>Kontrol</u> Memastikan Sarana dan Prasarana penunjang Disabilitas tersedia dan berfungsi dengan baik						
SASARAN Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan								

umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan								Outcome : Meningkatnya penyanggah disabilitas yang melakukan permohonan dokumen melalui PATEN Kecamatan Output : Terlaksananya koordinasi dengan lintas sector Input : Rp. 1.500.000,- Outcome : Meningkatnya Sinergi/Koordinasi Lintas Sektor
--	--	--	--	--	--	--	--	---



Sungai Rumbai, 28 Juni 2024
Camat Sungai Rumbai
ARWINTA
NIP. 19670919 198803 1 004

TIM VERIFIKASI

 Inspektur Drs. ANDJ SUMANTO, CfrA NIP. 1968 1220 1990909 1 001	 Kepala BKD ASRIL AP, Msi NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bappperida PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial P3A.PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 19820521 200012 1 002
---	--	--	---

FORMAT GBS (2)

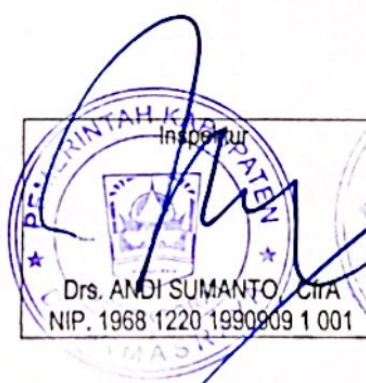
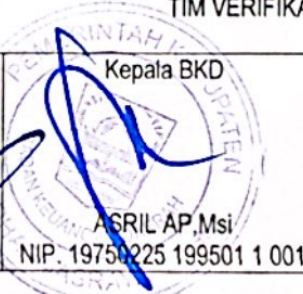
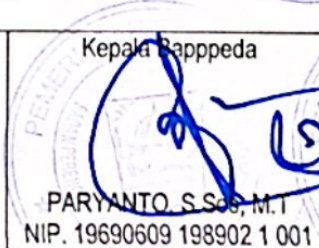
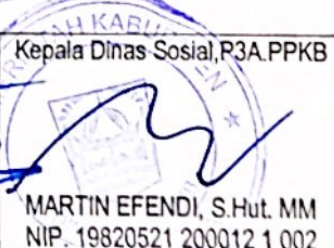
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat (service delivery)

SKPD	: KECAMATAN SUNGAI RUMBAI		
TAHUN ANGGARAN	: 2025		
PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
KODE PROGRAM	7.01.02		
KEGIATAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
HASIL/OUTPUT	(Diambil dari GAP langkah 6)		
ANALISIS SITUASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) b. Jumlah layanan Paten Tahun 2023 Non Disabilitas 1.147 orang, Yang Disabilitas tidak ada c. Jumlah Data Disabilitas diKecamatan Sungai Rumbai sebanyak 15 Orang 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender <ol style="list-style-type: none"> a. Minimnya warga penyandang Disabilitas mengurus kelengkapan biodata warganegara b. Pelayanan khusus untuk disabilitas belum diperhatikan secara khusus c. Disiapkan jalur khusus untuk pelayanan disabilitas d. Disiapkan loket khusus dissabilitas 		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	(Diambil dari GAP langkah 7)	
	Tujuan	Menyediakan Jalur Khusus dan kursi roda untuk penyandang disabilitas	
	Alokasi Anggaran	Rp. 75.000.000,-	
	Komponen/ aktifitas 2	(Diambil dari GAP langkah 7)	
	Tujuan	Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyandang disabilitas	
	Alokasi Anggaran	Rp.3.500.000,-	
	Komponen/ aktifitas 3	(Diambil dari GAP langkah 7)	
	Tujuan	Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sector	
	Alokasi Anggaran	Rp. 1.500.000,-	
	Total anggaran	Rp. 80.000.000,-	
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Terciptanya Layanan PATEN Kecamatan yang responsif gender		

Sungai Rumbai, 28 Juni 2024
Camat Sungai Rumbai

ARWINTA
NIP. 19670919 198803 1 004

TIM VERIFIKASI

 Inspektur Drs. ANDI SUMANTO, CTA NIP. 1968 1220 199009 1 001	 Kepala BKD AGRIL AP, Msi NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bappeda PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 19820521 200012 1 002
--	---	---	--

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 1

Mengatasi Kesenjangan Gender

Kecamatan : TIUMANG
Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM :	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
KEGIATAN: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya Yang di ikuti oleh 4 Nagari (Nagari Tiumang, Nagari sipangkur, Nagari sungai langkok, Nagari Koto beringin), Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang	<u>Akses :</u> <u>Partisipasi :</u> Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang	- belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang - Sedikitnya jumlah/kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan - belum paham betul tentang pengasutan an gender	Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang Sosial Budaya Minang kabau, dimana	Terumuskan- nya usulan program Prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025 yang responsif gender	Mengumpulkan DURKP Nagari Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan Distribusi undangan ke nagari Menjalin koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait secara internal sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur Tersusunnya usulan prioritas kecamatan Dari kehadiran tahun 2024 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandingannya laki-laki 87,5% dan perempuan 12,5%	Output: Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing –masing usulan yang menjadi prioritas Input: Rp. 10.810.000,- Outcome: Untuk melihat usulan masing – masing nagari yang mendukung
SUB KEGIATAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2021 : 80 org Tahun 2022 : 80 org Tahun 2023 : 100 org Tahun 2024 : 80 org	<u>Manfaat :</u> Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang						

<p>TUJUAN: Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD</p> <p>SASARAN Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan</p>	<p>Tahun 2022 di ikuti oleh 80 orang peserta laki-laki 49 dan 31 orang peserta perempuan</p> <p>Tahun 2023 di ikuti oleh 100 orang peserta laki-laki 66 dan 30 orang peserta perempuan serta ada 4 orang dari perwakilan Forum Anak</p> <p>Tahun 2024 diikuti oleh 80 orang peserta Laki-laki 70 Orang dan 10 orang orang perempuan.</p>		<p>- Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang</p>	<p>perempuan tidak banyak memberikan pendapat</p>		<p>Menyampaikan saran ke bappeda untuk membuat regulasi tentang keterwakilan Perempuan dan anak di Musenbang</p> <p>Sosialisasi Musrenbang ke masyarakat</p>	<p>Meningkatnya usulan Peserta Laki-laki 50 % dan perempuan meningkat 50 %</p> <p><i>Dari Notulen Usulan Musrenbang 2024 jumlah yang dundang 80. laki –lak i yang hadir sebanyak 70Orang, dan yang menyampaikan usulan 10 orang(12,5 %)</i></p>	<p>adannya kegiatan yang responsif gender</p> <p>Output: Melakukan Sosialisai Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang</p> <p>Input: Rp1.290.000,-</p> <p>Outcome: Menigkatnya tingkat kehadiran dan keberanian Perempuan menyampaikan usulan dalam proses pelaksanaan musrenbang, serta tertampungnya pada Musrenbang RKPD Kabupaten yang responsif gender</p>
--	--	--	---	---	--	--	--	--

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	<p><i>Dari Notulen Usulan Musrenbang 2024 jumlah yang dundang 80 laki-laki yang hadir sebanyak 70 Orang. dan yang menyampaikan usulan 10 orang(12,5 %)</i></p> <p><i>peserta perempuan yang di undang 10. orang dan yang hadir 10 Orang serta yang menyampaikan usulan sebanyak 5 orang (50%)</i></p>	<p>Kontrol</p> <p>Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya</p>	<p>Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan</p>				<p><i>peserta perempuan yang di undang 10. orang dan yang hadir 10 Orang serta yang menyampaikan usulan sebanyak 5 orang (50%)</i></p>	



TIM VERIFIKASI

 <p>Inspektur</p> <p>Drs. ANDI SUMANTO, CfrA NIP. 1190312201990909 1 001</p>	 <p>Kepala BKD</p> <p>ASRIL AP, Msi NIP. 19750225199501 1 001</p>	 <p>Kepala Bapperida</p> <p>RARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609198902 1 001</p>	 <p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB</p> <p>MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 19820521200012 1 002</p>
---	--	---	---

FORMAT GBS (1)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)
Mengatasi Kesenjangan Gender

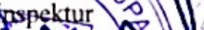
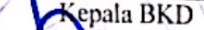


SKPD	: KECAMATAN TIUMANG		
TAHUN ANGGARAN	: 2024		
PROGRAM	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
KODE PROGRAM	7.01.03		
KEGIATAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
HASIL/OUTPUT	Terumuskannya prioritas usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung pada Musrenbang RKPD Tahun Anggaran 2025 yang responsif gender		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data PembukaWawasan (Data Pilah Gender). Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya; Di Kecamatan Tiumang terdiri dari 4 Nagari masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang</p> <ul style="list-style-type: none">Tahun 2024 diikuti oleh 80 orang peserta diantaranya 70 orang peserta laki-laki dan 10 orang perempuan. <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Sangat sedikit Keterwakilan perempuan karena belum adanya aturan yang mewajibkan tingkat keterwakilan perempuan dan komitmen pihak terkait tentang pelaksanaan musrenbang.</p> <p>b. Masih sedikit perwakilan perempuan yang memberikan atau mengajukan usulan dalam kegiatan Musrenbang.</p>		
RENCANA AKSI	<p>Komponen/ Aktifitas 1</p>	<p>Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing –masing usulan yang menjadi prioritas</p>	
		<p>Tujuan</p>	<p>Untuk melihat usulan masing –masing nagari yang mendukung adanya kegiatan yang responsif gender</p>
		<p>Alokasi Anggaran</p>	<p>10.810.000,-</p>
	<p>Komponen/ aktifitas 2</p>	<p>Melakukan Sosialisai Internal tentang Pentingnya keterwakilan perempuan di Musrenbang</p>	
		<p>Tujuan</p>	<p>Supaya perwakilan perempuan lebih aktif untuk menyampaikan usulan kegiatan pada kegiatan musrenbang</p>
		<p>Alokasi Anggaran</p>	<p>1.290.000</p>
	<p>Total anggaran</p>		<p>Rp. 12.100.000,-</p>
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	<p>Menigkatnya tingkat kehadiran dan keberanian Perempuan menyampaikan usulan dalam proses pelaksanaan musrenbang, serta tertampungnya pada Musrenbang RKPD Kabupaten yang responsif gender</p>		

Tiumang, 19 Juni 2024
Caturat Tiumang

Marjilis, SH, MH

NIP.197004022008011016

TIM VERIFIKASI

 Inspektur Ors. ANDI SUMANTO, CnA NIP. 1968122019909091001	 Kepala BKD ASRIL AP, Msi NIP. 197502251995011001	 Kepala Bapperida FARYANTO, S.Sos. M.T. NIP. 196906091989021001	 Kepala Dinas Sosial P3A.PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 198205212000121002
---	--	--	---

FORM KAKI / TOR

Program		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Sasaran Program		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan
Kegiatan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaanpe mbangunan di desa
Latar Belakang	Dasar Hukum	Surat Bupati Dharmasraya No. 000.7.2/34/ Bapperida tanggal 27 Februari 2024 perihal Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan
	Gambaran Umum	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti Musrenbang
	Indikator Kinerja	Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Merumuskan Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Mengundang .utusan nagari dan stakeholker terkait untuk merumuskan usulan prioritas musrenbang kecamatan dalam satu ruang dan waktu yang telah ditentukan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kecamatan Tiumang
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Di Desa Penanggung Jawab : Camat tiumang
Jadwal		Bulan Februari 2025
Biaya		Rp. 12.100.000

Tiumang, 19 Juni 2024
 Camat Tiumang,

 MARJILIS, SH, MH
 Nip. 197002042008011016

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
Kesenjangan Gender antara Laki – Laki dan Perempuan

OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik





PROGRAM : Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p>Program : Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ketahanan ekonomi social dan budaya</p> <p>Tujuan : Meningkatkan pemahaman tentang Penyalagunaan Pemakaian Narkoba bagi Generasi Muda</p>	<p>Dilihat dari sebelumnya kegiatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba mengundang pelajar dan mahasiswa se- Kab. Dharmasraya dalam ke ikut sertaannya lebih di dominasi oleh kaum laki-laki di karenakan lebih banyaknya kaum laki-laki yang menyalahgunakan Narkoba di Bandingkan Perempuan. Kaum perempuan juga harus bisa berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba agar tidak timbul kesenjangan gender/ responsive gender.</p>	<p>Akses: Pada umumnya Keikutsertaan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan penyalahgunaan Narkoba lebih di dominasi Kaum Laki-Laki</p> <p>Partisipasi: Perempuan Kurang berperan Aktif dalam Ke ikut sertaan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</p> <p>Control: Masih kurangnya Pemahaman pengetahuan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar dan Mahasiswa</p> <p>Manfaat : Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda</p>	<p>Peserta laki-laki lebih banyak dari pada peserta Perempuan dan keterlibatan Laki-laki dalam penyalahgunaan narkoba lebih banyak karena kurangnya pengawasan dari orang tua</p>	<p>Kurangnya peserta perempuan dikarenakan yang lebih banyak terpengaruh oleh lingkungan dalam penyalahgunaan narkotika adalah laki-laki</p>	<p>1. Meningkatkan Pemahaman tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda se-Kab. Dharmasraya</p> <p>2. Meningkatkan Peran Aktif Bagi Generasi Muda dalam mensosialisasikan kepada Masyarakat yang tidak tau akan pentingnya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.</p>	<p>Memberikan Penyuluhan Kepada Generasi Muda agar meningkatkan kesadaran akan bahaya peredaran/Penggunaan Narkotika</p>	<p>Dalam Kegiatan ini akan mengundang Pelajar dan Mahasiswa sebanyak 30 orang peserta yang responsive gender</p>	<p>Input : Jumlah Dana Kegiatan ini sebesar Rp. 14.991.000</p> <p>Output:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman tentang Penyalahgunaan Pencegahan Narkoba Bagi Generasi Muda 2. Bertambahnya jumlah Generasi Muda yang paham tentang bahaya Penyalagunaan pemakaian Narkoba <p>Outcome : Meningkatnya Pemahaman Generasi Muda tentang bahaya Narkoba</p>

Pulau Punjung, Juni 2024



TIM VERIFIKASI,

 <p>Inspektur <u>Drs. ANDY SUMANTO, CfrA</u> NIP. 19681220 199009 1 001</p>	 <p>KEPALA BKD <u>ASRIL, AP., M.Si</u> NIP.19750225 199501 1 001</p>	 <p>Kepala BAPPERIDA <u>PARYANTO, S.Sos, M.T</u> NIP.19690609 198902 1 001</p>	 <p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB <u>MARTIN EFENDI, HS, S.Hut, MM</u> NIP. 19750905 200801 1 018</p>
---	--	--	---

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
KEGIATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ketahanan ekonomi social dan budaya		
KODE KEGIATAN	8.01.05		
HASIL / OUTPUT	1. Meningkatnya pemahaman tentang Penyalahgunaan Pencehagan Narkoba Bagi Generasi Muda 2. Bertambahnya jumlah Generasi Muda yang paham tentang bahaya Penyalagunaan pemakaian Narkoba		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Dilihat dari sebelumnya kegiatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba mengundang pelajar dan mahasiswa se- Kab. Dharmasraya dalam ke ikut sertaannya lebh di dominasi oleh kaum laki-laki di karenakan lebih banyaknya kaum laki-laki yang menyalahgunaan Narkoba di Bandingkan Perempuan. Kaum perempuan juga harus bsa berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba agar tidak timbul kesenjangan gender/ responsive gender. Dalam kegiatan ini <i>Mengundang Pelajar dan Mahasiswa</i> 30 Orang.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses: Pada umumnya Keikutsertaan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan penyalahgunaan Narkoba lebih di dominasi Kaum Laki-Laki</p> <p>Partisipasi: Perempuan Kurang berperan Aktif dalam Ke ikut sertaan Penyuluhan Pencehagan Penyalahgunaan Narkoba</p> <p>Control: Masih kurangnya Pemahaman pengetahuan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar dan Mahasiswa</p> <p>Manfaat : Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peserta laki-laki lebih banyak dari pada peserta Perempuan dan keterlibatan Laki-laki dalam penyalahgunaan narkoba lebih banyak karena kurangnya pengawasan dari orang tua <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya peserta perempuan dikarenakan yang lebih banyak terpengaruh oleh lingkungan dalam penyalahgunaan narkotika adalah laki-laki 		
RENCANA AKSI	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan Penyuluhan Kepada Generasi Muda agar meningkatkan kesadaran akan bahaya peredaran/Penggunaan Narkotika 		
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolak Ukur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dana Kegiatan ini sebesar Rp. 14.991.000 <p>2. Indikator dan Target Kinerja</p> <p>Input :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dana Kegiatan ini sebesar Rp. 14.991.000.- <p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pemahaman tentang Penyalahgunaan Pencehagan Narkoba Bagi Generasi Muda - Bertambahnya jumlah Generasi Muda yang paham tentang bahaya Penyalagunaan pemakaian Narkoba <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Pemahaman Generasi Muda tentang bahaya Nakoba 		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 14.991.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Memberikan Penyuluhan Kepada Generasi Muda agar meningkatkan kesadaran akan bahaya peredaran/Penggunaan Narkotika	
	Masukan	Rp. 14.991.000,-	
	Keluaran	Jumlah Generasi Muda yang paham tentang bahaya Penyalagunaan pemakaian Narkoba	
	Hasil	Meningkatnya pemahaman tentang Penyalahgunaan Pencehagan Narkoba Bagi Generasi Muda	

Pulau Punjung, Juni 2024



VERIFIKASI KEGIATAN

 Inspektur Dr. S. ANDY SUMANTO, Cfra NIP. 19681120 199009 1 001	 KEPALA BKD ASRI, AP. M.Si NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala BAPPERIDA PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB MARTIN EFENDI, HS, S.Hut, MM NIP. 19750905 200801 1 018
--	--	--	--

FORM KAK/ TOR

Program		Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,social dan Budaya
Sasaran Program		Generasi Muda (Pelajar dan Mahasiswa)
Kegiatan		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan ekonomi social dan budaya
Sub Kegiatan		Pencegahan Penyalagunaan Narkoba,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan di Daerah
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peringatan Hari HANI
	Gambaran Umum	
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Penyuluhan Pencegahan Penyalagunaan Narkoba,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan di Daerah kepada anak remaja
	Indikator Kinerja	Bertambahnya pengetahuan pelajar dan siswa terhadap bahayanya pemakaian Narkoba
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Bertambahnya wawasan tentang bahaya pemakaian Narkoba bagi generasi muda
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Memberikan penyuluhan kepada peserta
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Penanggung Jawab : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
Jadwal		Januari s/d Desember 2024
Biaya		14.991.000

Pulau Punjung, Juni 2024



RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024

Urusan		: Pemerintahan Umum				
Unit Organisasi	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
Sub Unit Organisasi	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
Program	-	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya				
Kegiatan	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi social dan Budaya				
Sub Kegiatan	8.01.05.2.01.03	Pencegahan Penyalagunaan Narkoba,Fasilitasi Kerukunan Umat beragama dan penghayat Kepercayaan di Daerah				
Sumber Pendanaan		APBD				
Lokasi Kegiatan		Menyesuaikan				
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2024				
Kelompok Sasaran						
Jumlah 2022						
Jumlah 2023						
Jumlah 2024		14.991.000				
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja						
Indikator		Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Hitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah

Pulau Punjung, Juni 2024

KEPALA

ASRI, S.Pd, MM
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19691225 199109 1 001